

65 TAHUN HIDUP DALAM KEBHINEKAAN

**PANDANGAN KRITIS DARI
SISI PENDIDIKAN POLITIK**

Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si

Editor: Dr. Dra. Mesta Limbong, M.Psy



**65 TAHUN HIDUP DALAM KEBHINEKAAN
Pandangan Kritis dari Sisi Pendidikan Politik**

Penulis : Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si.

Editor : Dr. Dra. Mesta Limbong, M.Psy.

ISBN : 978-623-6508-90-9

Copyright © September 2020

Ukuran: 14.8 cm X 21 cm; Hal: xxxvi + 132

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Ahmad Ariyanto

Desainer Sampul : Moh. Faizal Arifin

Cetakan I, September 2020

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

*Takut Akan Tuhan Dan Turut Perintahnya
Merupakan Awal Dari Kesempurnaan Hidup*

SEKAPUR SIRIH

FAUZI BOWO

Gubernur Provinsi DKI Jakarta (2007—2012)

Saya menyaksikan sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, banyak hal yang berubah di negeri ini. Salah satunya, diskursus dan kepedulian mengenai Pancasila. Ini amat kontras, tentu saja, dengan era Orde Baru, dimana secara eksekutif kata Pancasila digunakan sebagai mantra yang sakti disemua bidang kehidupan. Berbeda dengan sekarang ini dimana ketidakpedulian terhadap Pancasila justru semakin memprihatinkan .

Oleh karena itulah, usaha penulis yang memberanikan diri untuk mengangkat kembali masalah Pancasila, khususnya prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”, dalam konteks yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman adalah sangat membanggakan. Membanggakan, karena pada saat-saat dimana bangsa ini mengalami benturan antar kelompok dan cenderung terbelah, karena adanya sikap dan pandangan yang berbeda. Di satu pihak mempertahankan Pancasila sebagai Staats Fundamental Norm (Pokok-Pokok Kaidah Negara) dan disisi lain dihadapkan dengan kelompok yang punya tafsir tersendiri terhadap Pancasila. Penulis tampil sebagai “pengingat” bahwa Pluralisme di Indonesia merupakan Warisan Nenek moyang dan kekayaan bangsa Indonesia, jadi jangan dirusak.

Saudara Penulis yang saat menerbitkan buku ini berusia 65 Tahun, bukanlah pribadi yang asing dengan Pancasila. Sebab masa sekolah SD sudah mendapat pelajaran Budi Pekerti (Toleransi) dan di tempat tinggalnya masa kanak-kanak , hidup berbaur dengan teman-temannya yang berlainan suku, agama, dan Ras. Dan masa aktif sebagai ASN di Pemprov DKI Jakarta sudah beberapa kali mengikuti Penataran P4 baik di tingkat

Daerah maupun tingkat Pusat. Dia beruntung dalam hidupnya mengalami zaman di 3 Era, yaitu Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi, sehingga banyak mengalami episode politik dalam Negara ini yang banyak berubah-ubah dari era yang satu ke era yang lain. Dirinya menyaksikan dan mengalami saat-saat dimana Pancasila hampir hilang dari bangsa kita, dan Alhamdulillah beliau mengikuti “jejak” saya untuk merawat dan menjaga “Bhinneka Tunggal Ika” Pancasila Sakti melalui bukunya ini.

Semoga terbitnya buku ini memberi nilai tambah bagi pengetahuan masyarakat.

Selamat berkarya.

SAMBUTAN

DJAUHARI ORATMANGUN

Duta Besar Republik Indonesia

untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia

Saya dengan Penulis buku ini merupakan sahabat lama sejak kami tinggal bersama di Asrama Mahasiswa Realino Yogyakarta tahun 1976 s.d. 1978. Penulis adalah seorang pemikir dan penganalisis yang serius, dengan gaya khas nya yang meledak-ledak. Saat memperjuangkan hal yang dianggap benar namun mendapat hambatan, Penulis tak ragu untuk mendebatnya.

Kami berdua punya cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Saya cenderung melakukan *lobby* atau pendekatan, tapi jika sudah kelewatan, barulah saya ambil cara Penulis. Sejak mahasiswa saya sudah terbentuk menjadi seorang negosiator, dan hingga saat ini pun berkecimpung di dunia diplomasi yang penuh dengan negosiasi.

Membaca buku ini, saya sangat tertarik dengan bagian keempat tentang Asrama Mahasiswa Realino. Benar apa yang diutarakan Penulis, alumnus Asrama Realino (Forsino) setelah mentas dari Asrama mengakui betapa besar arti hidup rukun dan guyub dalam keberagaman, dan bingkai kesatuan keluarga Asrama Realino. Kehidupan di Realino menumbuhkan kesadaran untuk menerima perbedaan, serta hidup berdampingan dalam lingkungan kekeluargaan dan kebersamaan. Di dalam diri setiap penghuni asrama sangat kental terasa jiwa keindonesiaan yang “Bhinneka Tunggal Ika” dan dijiwai oleh semangat “Sapientia et Virtus” (Bijak dan Bajik). Asrama Realino adalah pengejawantahan dari Indonesia di ruang lingkup versi “mini”. Inilah yang menjadi jiwa bagi setiap alumnus Realino dalam

menjalani kehidupan sebagai Warga Negara Indonesia.

Memasuki dunia global dengan kecanggihan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hambatan bagi alumnus Asrama Realino. Apalagi untuk memimpin masyarakat yang pluralis, baik di tingkat nasional maupun Internasional, para alumnus Asrama Realino akan siap menjalaninya. Tak perlu diragukan lagi Integritas, loyalitas dan kontribusi mereka bagi bangsa ini.

Jadi saya berpandangan bahwa pola pembinaan kebhinekaan yang dilakukan oleh Asrama Realino perlu dipikirkan oleh semua *stakeholder* di bidang pendidikan. Mendidik dengan pola yang sarat unsur kebhinekaan, seperti membangun Asrama untuk pelajar SMA dan Perguruan Tinggi di perkotaan yang penduduknya pluralis. Asrama yang dihuni oleh pelajar dengan berbagai latar belakang suku dari Sabang sampai Merauke, dibangun secara *virtual* atau *real*, sesuai dengan perkembangan saat ini.

Buku ini menarik untuk dikaji, karena ide-ide yang disampaikan oleh Penulis sangat relevan bagi bangsa ini untuk memasuki “Masyarakat Indonesia Modern”.

Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Abang dan Sahabat terbaik saya Witarsa Tambunan. Sehat, bahagia dan sukses selalu!

Salam hangat dari Beijing.

SAMBUTAN

Dr. Arie Budhiman, M.Si.

Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara

Periode 2019 – 2024

Apabila kita mencermati situasi dan kondisi aktual saat ini, tampak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang menghadapi suatu cobaan yang sangat berat, yaitu krisis multi dimensi diseluruh aspek kehidupan nasional. Situasi dan kondisi tersebut disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat, termasuk kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, kita diajak menengok ke belakang untuk mencermati sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia berjuang dengan semangat kebangsaan yang tinggi serta sikap ikhlas berkorban yang dilandasi oleh iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat tersebut merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap patriotik dan perilaku yang heroik sebagai idealisme meraih kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Potret karakter tersebut, menjadi sangat relevan dihadapkan dengan kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Penulis mencoba melakukan perenungan melalui transformasi semangat perjuangan masa lalu, guna bekal menghadapi kondisi krisis multi-dimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masa kini. Pengalamannya yang beragam bisa menjadi contoh praktik-praktik baik bagi kita semua yang sedang menjalani dinamika perjalanan hidup yang sangat kompleks. Inilah yang nampak dari buku Witarsa Tambunan, seorang sahabat yang saya kenal memiliki kemauan keras, antusiasme dan

semangat yang tinggi. Dia mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama mengabdikan dan membela negara yang kita cintai ini.

Penulisan gagasan ini merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa, utamanya bagi generasi muda dan para mahasiswa calon warga bangsa yang terpelajar.

Kehadiran buku ini sekaligus merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang berkarakter kebangsaan, yaitu memiliki watak, moral, dan etika dalam rangka menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Saya tentu merasa bangga dan bahagia mendapat kehormatan memberi sambutan dalam buku saudara saya ini, yang selalu saya panggil “Bang Wit”. Kami sudah lama saling mengenal dan bergaul sejak sama-sama bertugas di Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta. Bang Witarsa sebagai kolega yang mendapat amanah sebagai Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Barat ketika saya bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

Akhirnya, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun buat Bang Witarsa. Buku ini sungguh mencerminkan semangat untuk terus berjuang di tengah dunia yang tidak berkepastian. Dan yang istimewa, tentu sebagai “warisan” berharga bagi dunia pendidikan yang digelutinya.

SAMBUTAN

Putra Nababan

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan

Manajemen Urut Kabel dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Buku 65 Tahun Hidup Dalam Kebhinekaan (Pandangan Kritis Dari Sisi Pendidikan Politik), yang ditulis Bapak.Dr.Drs.Witarsa Tambunan,M.Si, mengungkap kegelisahan sekaligus gagasan dari seorang pemerhati, sekaligus praktisi yang peduli dengan kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam pandangan beliau, kondisi pendidikan saat ini masih menganut pada pola-pola yang usang yang kurang dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu suatu reformasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.

Tentu saja berbicara tentang masalah pendidikan, bukan berarti membicarakan keadaan pendidikan yang berada di kota-kota besar melainkan juga berusaha memotret kondisi pendidikan yang berada di pelosok daerah yang nun jauh disana. Ketimpangan pendidikan menjadi salah satu tantangan tiap jaman yang tidak mampu dijawab secara tuntas oleh para pemangku kepentingan. Selalu saja ada tantangan-tantangan baru dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain tantangan baru yang muncul, persoalan klasik dari tiap jaman juga masih bergumul hebat, sehingga membuat pendidikan ini menjadi seperti benang kusut yang tidak berkesudahan. Hal ini pula yang membuat konsep pemerataan pendidikan yang menjadi nafas dari sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia semakin sulit untuk diwujudkan walaupun pemerintah dari periode ke periode sudah berusaha untuk mewujudkannya.

Pendidikan tidak hanya selalu dilihat berpusat pada sisi demand side semata. Seperti bagaimana menghasilkan siswa yang cerdas atau intelek sehingga mampu bersaing di pasar global. Pendidikan juga harus melihat dari sisi supply side yaitu bagaimana kapasitas seorang guru dalam memberikan proses pembelajaran, melatih kemampuan soft skill sebagai bekal di kehidupan kelak. Supply side juga harus melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah yang ada saat ini di tiap level pendidikan, kurikulum yang ada, faktor teknologi hingga faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Jika ingin membenahi pendidikan maka tentunya kita harus melakukan apa yang disebut sebagai “manajemen urut kabel”. Artinya harus dilihat kabel atau bagian mana yang mengalami konslet, bagian mana yang membelit, dan bagian mana yang tidak berfungsi sehingga harus diletakan kembali posisinya agar prosesnya bisa berjalan dengan baik dan benar. Tentu ini membutuhkan cetak biru atau peta jalan pendidikan nasional yang harus dapat berjalan dari periode satu ke periode berikutnya sehingga bisa mencapai golden goal manusia Indonesia di masa mendatang.

Era pandemik, bisa dibilang menjadi suatu penanda bahwa dunia pendidikan dipaksa untuk beralih kepada metoda baru dalam proses pembelajaran dan pengajaran terhadap siswa didik melalui teknologi yang membuat semua pihak harus mampu mengoperasikan teknologi sebagai penunjang demi lancarnya proses pendidikan di Indonesia. Bisa dibilang manajemen urut kabel yang pertama harus dilakukan adalah melakukan tranformasi pada peran guru sebagai pengajar atau peserta didik. Konsep guru yang sehari-harinya berperan sebagai fasilitator pembelajaran lambat laun akan ditanggalkan. Kalau dulu guru sebagai master of knowing, atau tahu segala-galanya, menjadi nakhoda pengetahuan, sehingga apapun yang diajarkan oleh guru menjadi sumber pengetahuan baru, maka sekarang kondisinya sudah jauh berubah. Siswa sudah jauh lebih dulu menerima

pengetahuan dari berbagai sumber terutama dari internet, youtube hingga media sosial. Guru dalam proses transformasi yang saat ini bertindak sebagai fasilitator yang berperan memandu siswa melakukan aktivitas belajar agar proses dialektika dua arah antara guru dan siswa bisa terjadi dengan baik. Proses ini dapat melatih siswa melakukan critical analysis yang membuat siswa bisa memiliki improvisasi pengetahuan yang memadai.

Manajemen urut kabel yang kedua adalah melakukan transformasi pada peran siswa. Jika dulu siswa cenderung pasif karena hanya menerima pengetahuan dari para guru, maka di era sekarang siswa bisa terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Siswa membutuhkan konten-konten yang tidak saja melatih nalar kritis melainkan juga melatih rasa sehingga menimbulkan kepekaan terhadap berbagai masalah-masalah yang ada di sekitar. Karenanya, guru juga tidak perlu membebani siswa dengan banyak tugas-tugas yang hanya membuat siswa tidak berpikir nalar sehingga mematikan daya kreatifitas. Sebaiknya guru bisa memberikan soal-soal yang dapat melatih nalar kritis siswa terutama yang dekat dengan keseharian mereka.

Manajemen urut kabel yang ketiga adalah pada transformasi materi konten ajar. Mengedepankan peran siswa adalah menjadi spirit dari merdeka belajar sehingga ini menjadi bentuk penguatan tanggung jawab agar peserta didik mampu mengelola kesadaran kritis sebagai bagian penting dari subjek perubahan di dalam masyarakat. Para siswa sudah saatnya diberi porsi lebih besar dalam menentukan, merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi sendiri apa yang hendak mereka kuasai. Konten materi ajar tidak semata dipelajari untuk mengejar ketuntasan kompetensi lewat soal ujian. Relasi guru dan murid, tidak cukup hanya berpindah dari pendekatan monologis menuju dialogis, tetapi juga mesti kolaboratif. Pendidik beserta seluruh peserta didiknya harus terbiasa bekerja sama dan sama-sama belajar dalam kedudukan yang sama.

Berikutnya adalah manajemen urut kabel pada transformasi kelas ajar. Tentu perlu rekonsepsi peran guru di ruang pembelajaran yang terbaru. Pendidik pada era transformasi kelas ajar, harus mampu mewujudkan ekosistem pembelajaran yang autentik. Interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar, sebagai tiga prasyarat dasar terjadinya pembelajaran harus diwujudkan pada lokus yang tidak hanya terbatas di ruangan kelas. Ruang-ruang baru pembelajaran bisa dikembangkan pada spektrum yang menjangkau semua sumber belajar, yang bisa dipelajari siswa secara langsung dan nyata. Ruang baru pembelajaran bisa berbentuk proyek pemecahan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga ruang kelas ke depannya tidak harus identik dengan bangunan ruang kelas sebagaimana yang kita pahami hari ini. Ruang baru pembelajaran juga memerlukan penyegaran paradigma tata kelola kelas ajar yang disebut manajemen kelas multiliterat.

Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana pendidikan ini tidak saja membekali siswa dengan pengetahuan, tetap juga bagaimana melatih soft skill para peserta didik. Peran ini tidak dapat diambil alih oleh kemajuan Teknologi Informasi yang paling canggih sekalipun. Soft-skill yang meliputi nilai-nilai: kejujuran, penghargaan, sikap toleran, kemampuan mendengar, empati, kerjasama, sikap sopan dan santun dalam berperilaku, disiplin dan kontrol diri. Hal ini hanya dapat dipromosikan oleh para pendidik yang profesional. Maka keistimewaan sekolah-sekolah abad intensive learning society ada dua yaitu kemampuan para pendidik menggunakan teknologi dalam pembelajaran; dan kemampuan para pendidik mentransfer nilai-nilai kehidupan (living values) pada setiap peserta-didik yang belajar di sekolah tersebut.

SAMBUTAN

PALAR BATUBARA

Tokoh Nasionalis Mantan Ketua Umum PA . GMNI .

MERDEKA 3 X

Menulis sebuah buku bukan pekerjaan yang mudah apa lagi dikaitkan dengan kehidupan kebangsaan kita yang sangat prularistik dan kemampuan itu adalah yang dilihat, dirasakan dan dilakukan secara langsung ber interaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai latar belakang yang berbeda karena berhadapan dengan perbedaan kita juga harus dapat merasakan apa yg dirasakan orang arti perbedaan itu dan tidak banyak mampu menterjemahkan pada diri sendiri kecuali kita telah menghadapi langsung dan biasa nya adalah yang pengalaman dalam ber interaksi organisasi tertentu, oleh sebab itu sekali lagi sebagai orang yang berkecimpung dalam organisasi yang pluralistik dimulai aktif di GMNI Jakarta semasa mahasiswa , pimpinan KNPI di Jakarta dan DPP KNPI , mantan anggota DPR RI tiga Priode serta terakhir mimpin Persatuan Alumni GMNI sebagai Ketua Presidium tahun 1996-2001 dapat merasakan dan menghayati nya didalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berwawasan Nasionalis.

Saya sangat menghargai buku yang ditulis oleh DR Witarso Tambunan yang sangat mendalam juga didasarkan pengalaman dalam pendidikannya di UGM Yogyakarta dan bekerja di DKI Jakarta serta sebagai pendidik di UKI jadi sangat lengkap .

Membaca buku ini khususnya Bagian Pertama , saya lihat betapa analisa penulis jauh kedepan untuk merawat kebhinekaan (pluralisme) yang hidup di Indonesia dan membangunkan generasi muda agar bersama-sama bangkit mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Dan buku ini terbit sesuai dgn momentum hari kebangkitan

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober.

Sekali lagi saya sambut terbitnya buku ini dgn harapan dapat menyadarkan anak bangsa ini untuk konsisten mempertahankan Pancasila.

Akhirnya saya ucapkan selamat Ulang Tahun yang ke 65 buat ponakan ku yang baik ini, maju terus dan sukses.

SAMBUTAN

Dr. Drs. Suyoto HS , M.Si., MMA

(Tokoh GMKI Yogyakarta - Ketua BKS Persekutuan

Gereja-Gereja Indonesia-GMKI; Tokoh PIKI DIY;

Pengajar Sekolah Pascasarjana UGM)

Puji Tuhan, dalam memberi komentar terhadap buku sahabat ku ini , saya sulit untuk tidak bercerita masa kuliah di Fakultas Sospol UGM, masa tinggal di Asrama dan masa menjadi aktivis GMKI Yogja. Sebab kami berdua hampir selalu bersama, berdebat dan bercengkerama.

Sebagai teman kuliah dan seperjuangan di GMKI Yogja, bagi saya penulis buku ini, yang merupakan seorang sahabat dan kawan karib, tidak meragukan kelayalannya terhadap Pancasila, sebab kami sama-sama tinggal di Asrama Mahasiswa Katholik Realino yang sering disebut dengan Asrama Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penghuni berasal dari berbagai lintas suku, agama dan latar belakang. Tinggal di asrama Realino, kami dididik dan diajarkan hidup Toleransi , menghargai sesama teman dan tidak boleh ada perbedaan.

Membaca bagian keempat buku ini , saya langsung teringat kepada mata kuliah “Ilmu Pancasila” yang diampu oleh Bpk.Mariun. BA, sebab saya dengan penulis satu angkatan dan satu kelas. di Jurusan Pemerintahan Fak.Sospol UGM , memang benar dosen kami pak.Mariun, telah membuktikan bahwa Pancasila itu adalah suatu ilmu (saint), jadi adalah benar atau sah-sah saja kalau ada pihak-pihak yang ingin mendiskusikan Pancasila itu, tetapi harus diingat sebagai Staats Fundamental Norm (Pokok Kaidah Negara) Pancasila itu tidak diperkenankan untuk dihapus/diganti dengan ideologi lain.

Demikian juga masa kami menjadi Aktifis GMKI di Yogja,

disamping berlatih kepemimpinan juga kader GMKI dilatih menjadi pemimpin di tengah Pluralisme , sehingga kader GMKI tidak akan pernah mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila ini , sebab GMKI menganggap bahwa Sila Ketiga Pancasila itulah merupakan hidup “toleransi” , jadi tidak mungkin ada persatuan apabila tidak ada sikap toleransi . Itulah yang ditanamkan kepada kami, artinya memperjuangkan hidup bertoleransi sebagai mana motto GMKI : UT OMNES UNNUM SINT (Semua satu adanya) , merupakan Visi pelayanan mahasiswa Kristen ditengah Medan pelayanan.

Menurut saya Buku ini enak dibaca dan mampu memperkaya wawasan anak bangsa untuk tidak meragukan kehebatan Pancasila sebagai way of live bangsa.

Selamat dan sukses, semoga kebersamaan anak negeri akan memperkokoh Indonesia yang kita cintai bersama.

SAMBUTAN

BAHARUDDIN SILAEN

(Jurnalis tinggal di Tangerang)

Buku ini bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Penulis buku ini punya ingatan masa lalu (masa anak-anak) yang kuat. Buktinya ia masih mampu mengingat peristiwa pembakaran gereja HKBP di Airjoman, Asahan, 1968. Kejadian 51 tahun lalu masih bisa dia uraikan dengan jelas dalam buku ini .

Peristiwa yang sama ternyata masih terjadi di era reformasi ini. Termasuk pelarangan terhadap orang yang mau beribadah dan mempersulit izin membangun gedung rumah ibadah.

Penulis buku ini juga menyinggung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kurang tepat sebab cara itu merupakan tindakan reaktif. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan pembinaan terhadap guru di setiap tingkatan sekolah agar bisa menjadi panutan/ccontoh kepada murid-muridnya . Jadi kepada guru ditanamkan bahwa masalah korupsi merupakan bahaya yang dapat merusak mental anak didik. Menurut penulis untuk memberantas korupsi haruslah bersinergi antara tindakan pencegahan dan tindakan hukum.

Buku ini menarik dan perlu dibaca yang menggeluti bidang ilmu komunikasi politik.

PENGANTAR PENULIS

Indonesia terdiri dari Kepulauan yang bersifat alamiah, ada perbukitan dan dataran rendah, ada pedalaman dan pesisir, ada subur dan tandas, hutan rimba tak terjamah dan padat penduduk. Berbagai agama ada di Indonesia sejak dahulu kala. Ada Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu. Bagaimana sistim iman yang berbeda-beda ini hidup berdampingan secara damai di Indonesia.

Nenek moyang bangsa Indonesia sebelum masuk agama - agama “asing” ke Indonesia telah memiliki beraneka sistim kepercayaan pada setiap suku. Suku-suku di Indonesia tersebut tidak pernah menista, memusuhi dan berperang karena perbedaan sistim kepercayaan suku (Jakob Sumardjo, Kompas, 20 Nov 2016). Namun, tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda sering dianggap menyimpang oleh sebagian masyarakat. Apalagi, ada pihak yang belakangan ini gencar mengkampanyekan pemurnian agama, bahkan menebarkan ancaman bagi kelompok lain .

Hal itu bertolak belakang dengan fakta bahwa bangsa Indonesia beragam suku, Bahasa dan agama sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ironisnya, fanatisme terhadap golongan mereka buta tentang arti menghargai perbedaan. Padahal Wali Sanga dalam menyiarkan agama Islam (proses islamisasi) bukanlah dengan jalan kekerasan, tetapi dengan kelembutan (Ulil Absor , Kompas . 4 Juni 2014) .

Kisaran merupakan kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, sekaligus ibu kota Kabupaten Asahan. Kota Kisaran meliputi dua kecamatan: Kisaran Barat dan Kisaran Timur. Kisaran selain dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera juga terletak di Jalur KA Trans Sumatera Divre I Sumut dan Aceh. Kota Kisaran ternyata punya kebanggaan tersendiri sebab di kota kelahiran

penulis ini juga merupakan kelahiran tokoh nasional Letjen. Ahmad Taher mantan menteri pariwisata dibawah pemerintahan ORBA .

Status Kisaran sebelumnya adalah kota administratif, sayang pada tahun 2003 statusnya sebagai “kota” dihapus menjadi “kecamatan” karena tidak memenuhi persyaratan peningkatan menjadi daerah otonom sebagai mana tuntutan dari UU Otonomi Daerah .

Luas kota Kisaran 62,98 km² dan jumlah penduduk 133,824 jiwa, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sebanyak 82,42 persen. Selebihnya menganut agama Kristen, Protestan, Buddha, Katolik, Hindu dan sebagian kecil menganut agama Konghucu. Data BPS tahun 2017 mencatat bahwa mayoritas Suku penduduk Kisaran adalah Suku Jawa (38.01%), kemudian Suku Melayu (25.69%), Suku Batak 23.88%, Tionghoa 5.27%, suku lainnya (7.15%).

Ditempat tinggal penulis kampung Tempel Gang Berdikari kehidupan masyarakatnya rukun dan damai, silaturahmi dan gotong royongnya sangat kuat. Contohnya kalau ada hajatan dirumah kami, tetangga ikut membantu memasak dan menyediakan rumahnya bagi tamu-tamu yang muslim karena kami adalah nasrani demikian juga suku batak yang nasrani ikut membantu keperluan hajatan dirumah.

Tetangga kami terdiri dari suku jawa, minang, batak toba, batak karo, batak simalungun, batak mandailing, aceh, melayu dan cina. Mayoritas penduduknya suku jawa yang sering disebut dengan jawa kotrak (Jakon) karena memang asal nenek moyangnya dari jawa (timur) dan Jawa Tengah (Jateng), sebagai bukti ada satu desa tetangga kami diberi nama kampoeng “Siderejo”. Dugaan penulis nama kampoeng siderejo ini dari asal kata “Sidoarjo” nama satu kabupaten di Provinsi Jawa timur, karena dialek orang suku batak sulit mengucapkan huruf “oa” menjadi “e” jadilah kata Sidoarjo menjadi Siderejo. Sama halnya dengan kata “Magelang” saudara penulis dari suku batak

mengucapkannya “Mageelang”. Disamping itu secara sosiologis budaya orang Jawa kalau mau bertransmigrasi ada kebiasaan yang disebut dengan “bedol desa”, dimana orang-orang yang bertransmigrasi membawa apa-apa yang bisa menjadi tanda ingatan dari desa asalnya (misalnya segenggam tanah atau pohon). Mayoritas mereka bekerja di perkebunan karet milik perusahaan Belanda dulunya dan berganti menjadi perkebunan milik Amerika yang diberi nama Uniroyal.

Kehidupan masyarakat yang guyub dengan tingkat ekomi rata-rata (rendah) telah membangun rasa kebersamaan dan hidup gotong royong yang tinggi seperti yang diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila (persatuan) dan memang itulah sesungguhnya “ciri” masyarakat Indonesia yakni masyarakat yang hidup dalam perbedaan (Diversity), Bhinneka Tunggal Ika, tentunya Bhinneka Tunggal Ika itu akan hidup dengan subur dan berbuah lebat memerlukan kondisi-kondisi dimana individu satu dengan yang lain punya rasa kebersamaan dan adanya pengakuan terhadap kesetaraan (equal) dan hak azasi manusia serta mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Namun, di Era Reformasi sekarang ini yang ditandai dengan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi) berbenturan dengan IPOLEKSOSBUD (Ideologi Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya), terjadi benturan budaya dan sosial politik bahkan mengarah kepada medegradasi Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Buku ini merupakan tulisan tentang pengalaman masa kecil dan sukses story mulai dari pendidikan SR/SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 dikaitkan dengan pandangan “kritis” penulis terhadap masalah IPOLEKSOSBUD, yang sering disebut dengan Pendidikan Politik. Mengapa hal ini perlu dikritisi, sebab Indonesia sudah berumur 74 tahun dan sudah mengalami tiga Era sistim politik yakni Era ORLA, ORBA dan Reformasi seharusnya tegak lurus dengan kemajuan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang disebutkan oleh sila kelima Pancasila. Memang harus diakui bahwa di Era Reformasilah pembangunan fisik (Infra Struktur)

mengalami kemajuan yang signifikan, berbeda dengan pembangunan sosial politik dalam arti pemahaman akan arti hidup dalam kebhinnekaan dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen dirasakan mengalami degradasi . Itulah sebabnya diperlukan Pendidikan Politik untuk membangun “marwah” Pancasila di Indonesia.

Pendidikan politik sering juga disebut pembelajaran politik (political learning) atau sosialisasi politik (political socialization) ialah proses pembentukan serta pengembangan sikap dan perilaku politik. Pendidikan politik tidak dibatasi dalam pengertian formal politik, seperti keterlibatan dalam kampanye partai politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum atau pilkada (Adelabu dan Akinsolu : 2009 ; Orit : 2004).

Pendidikan politik memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan untuk memahami persoalan politik dalam pengertian yang luas, termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok (komunitas). Pendidikan politik menumbuhkan keterlibatan seseorang dalam diskusi politik dengan banyak orang; melakukan deliberasi tentang persoalan-persoalan kehidupan lainnya (luas). Pendidikan politik juga membuat seseorang mampu memberi pengaruh terhadap orang-orang tentang persoalan-persoalan politik (Adelabu dan Akinsolu: 2009; Clarke: 2007; Davies :2005).

Dari pengertian tersebut, ada tiga misi atau fungsi utama pendidikan politik. Pertama, pendidikan politik ialah revitalisasi pemahaman tentang politik. Pendidikan politik bukan mengajarkan peserta didik tentang berapa kursi di badan legislatif, melainkan memberi pemahaman atau kesadaran kepada publik bahwa fungsi-fungsi kekuasaan itu sebagai a constitutive force, bagaimana pembagian kekuasaan, pertarungan kekuasaan, serta bagaimana kekuasaan dimanfaatkan wakil rakyat dan untuk siapa (Ruitenberg ; Dumas dan Dumas: 1996; Davies: 2005). Kedua, pendidikan politik ialah pendidikan emosi politik (educating

political emotion). Dalam hal ini, emosi bukan dalam pengertian private domain, yaitu perasaan pribadi atau kelompok yang didasarkan pada konsepsi identitas diri. Namun, emosi dipahami dalam konteks tatanan sosial politik atau kolektif politik, yaitu pandangan terhadap hubungan sosial yang hegemonic. Dari fungsi ini, pendidikan politik ialah menumbuhkan dan mengembangkan rasa solidaritas, komitmen terhadap kelompok masyarakat yang tidak berdaya (tertindas), dan (meningkatkan) kemampuan melawan ketidakadilan. Ketiga, pendidikan politik ialah mengembangkan melek politik atau kesadaran politik (political literacy). Melek politik mempunyai hubungan dengan keterampilan, isu dan aksi penerapan politik yang demokratis, serta pendidikan global, yaitu pembelajaran afektif dan pendekatan holistik tentang isu-isu dunia. Pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kesukarelaan untuk berbuat sesuatu di masyarakat (Davies: 2005), kemampuan seseorang membaca landscape politik dalam konfigurasi pada era kini dan masa lalu (historisitas). Dalam pembelajaran politik, peserta didik didorong (enabling) memahami tatanan sosial dan politik melalui, misalnya, deliberasi tentang kebebasan, persamaan, dan relasi sosial yang hegemonic. Melek politik ialah kemampuan memahami konflik kepentingan dan cita-cita dari tiap-tiap kelompok. Sikap-sikap yang mencirikan melek politik dan demokrasi substantive, seperti menghargai kebebasan, persamaan, toleransi, menghargai keyakinan, dan pemikiran orang lain (Clarke, 2007).

Itulah sebabnya tulisan dalam buku ini diawali dari kehidupan masa kecil di kota Kisaran, masa kuliah di Yogyakarta dan menetap dan bekerja di Jakarta, kesemuanya disikapi/dikritisi oleh penulis dengan kondisi yang berlaku saat itu yakni Sistem Politik di Era Orde Lama (ORLA), Era Orde Baru (ORBA) dan Era Reformasi, jadi pembahasan tiga Era tersebut merupakan satu kesatuan artinya walaupun situasi penulis berada ditingkat sekolah dasar (tahun 1960 – 1967), tapi untuk mempertajam analisis digunakan situasi IPOLEKSOSBUD Era

Orla itu sendiri dan Era Orba serta Era Reformasi demikian juga sebaliknya.

Tujuan buku ini adalah untuk membangkitkan dan menggelorakan semangat perjuangan tanpa akhir untuk exisnya BHINNEKA TUNGGAL IKA dikalangan generasi muda dan anak bangsa yang selama ini telah merawat dan menjaga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , berdasarkan UUD 1945 , dan Pancasila , dengan cara mengkritisi hal-hal yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi tujuan buku ini adalah menjawab kegelisahan penulis terhadap munculnya banyak masalah yang berkembang akhir-akhir ini yang dapat menggiring kearah konflik baru antar kelompok, khususnya kelompok yang menginginkan “mengganti” Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelompok Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Jika kecendrungan konflik baru ini tetap berlanjut maka akan berakibat pada adanya benturan, sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa ini.

Buku ini terdiri dari Enam Bagian pembahasan, **BAGIAN PERTAMA**, Ideologi Negara Dan Kemiskinan, membahas 6 topik:

Pemahaman Terhadap Lambang Garuda Pancasila, ternyata masih banyak orang Indonesia belum memahami akan arti dan pemakaian dari lambang-lambang negara, seperti : Lambang Garuda Pancasila, Foto Presiden dan Wakil Presiden, Bendera Merah Putih dan lain-lain, demikian juga bagaimana cara memberi sikap menghormat terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menghormat terhadap bendera merah putih/serentak masih rendah dan belum seragam.

Pendidikan Karakter Dan Sila Kedua, ternyata pendidikan karakter itu sangat diperlukan pada saat ini / sekarang sebab dalam memberantas korupsi (KKN) factor karakter ikut mempengaruhi integritas seseorang. Pendidikan karakter itu tidak terlepas dari kehidupan politik, ekonomi, hukum dan

kebudayaan suatu bangsa. Itulah sebabnya dalam krisis saat ini merupakan pula refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Toleransi Dan Sila Ketiga, ternyata paguyuban yang bersifat kedaerahan anak Kisaran yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kisaran (KKK) yang tinggal di Jabodetabek dapat mendorong terbentuknya toleransi seperti yang diinginkan oleh sila ketiga Pancasila. Sebab tujuan dibentuknya organisasi ini (KKK) adalah membangun silaturahmi dan tolong menolong sesama anak Kisaran dan juga merupakan media untuk komunikasi dengan saudara – saudara yang ada di Kisaran.

Kemiskinan Struktural Dan Sila Kelima, ternyata gelar bapak pembangunan yang diberikan kepada Soeharto dalam kenyataannya tidak tepat (salah), sebab nasib anak bangsa ini ternyata berkorelasi positif dengan kemampuan pemimpin (Presiden) dalam mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya kalau pemimpin salah dalam mengurus (mengelola), maka akan terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akibatnya terjadilah ketidakadilan/ketimpangan sosial yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni terjadinya ketimpangan antara sikaya dan simiskin akibat lebih jauh terjadilah kemiskinan struktural, kerusakan moral dan tindakan - tindakan kriminal ditengah masyarakat.

Krisis Ekonomi 1959, ternyata kesulitan ekonomi akibat krisis moneter (sanering) yang menimpa Negara ini berdampak luas dan memicu kemiskinan keluarga, itulah yang menyebabkan kelak dikemudian hari orang tua kawan-kawan penulis banyak yang terjebak dalam permainan politik yang dimainkan oleh PKI yakni dengan memberikan bantuan cangkul/pacul untuk bertani lalu bergabung dalam organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi sayap PKI. 6) Pemberontakan PKI tahun 1965, ternyata rezim ORBA dalam menangani pemberontakan PKI di Indonesia

tidak sesuai dengan azas hukum yakni equality before the law artinya orang yang dituduh sebagai pengikut/anggota PKI sebelum diadili di Pengadilan sudah dihukum dengan cara hukum rimba (dibunuh) .

BAGIAN KEDUA, Kepemimpinan dan Konflik, membahas dua topik:

Terbangunnya Sikap Kritis. Ternyata pengalaman sebagai ketua kelas 1, 2 dan 3 yang terus menerus dan menjadi ketua OSIS di SMP Methodis ; demikian juga menjadi ketua kelas 1, 2 dan 3 terus menerus serta menjadi sekretaris OSIS SMANSA, dan menjadi Wakil ketua Senat Mahasiswa Fisipol UGM, Ketua Komisariat GMKI Fisipol UGM, menjadi anggota Badan Verifikasi GMKI BPC. Yogyakarta ikut membangun kepemimpinan (*leadership*) penulis dan itu berpengaruh terhadap sikap “kritis” penulis terhadap sesuatu yang kurang sesuai dalam keseharian sehingga terkadang membuat teman-teman ada yang salah pengertian apabila mendapat kritikan .

Konflik SARA, semula penulis menganggap bahwa konflik SARA itu terjadi karena adanya pengaruh anasir-anasir /orang-orang PKI yang saat itu (1965) existensinya dihabisi oleh rezim ORBA. Tapi, tahun berganti tahun dan kejadian itu sudah berjalan 51 tahun dan Indonesia sudah merdeka 74 tahun dan kini Indonesia memasuki era globalisasi yang ditandai dengan “IT”, dan pemerintahan rezim ORBA sudah berganti kerezim Reformasi, ternyata masalah penutupan rumah ibadah (gereja) masih berlangsung dan pembangunan rumah ibadah (gereja) prosesnya sangat sulit dan cenderung tidak diberi ijin, itu artinya masih ada pihak-pihak yang belum menghayati akan arti sesungguhnya “Bhinneka Tunggal Ika” .

BAGIAN KETIGA, Pendidikan Dan Pembebasan, membahas tiga topik:

SMA Ku Candra Dimuka. Ternyata seiring dengan kemajuan peradaban mau tidak mau masalah sistim pengajaran dimasa lalu (SMA) yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik itu kurang tepat bila dikaitkan dengan Pendidikan Era reformasi ini. Sebab Pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang secara individual. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan akan terus selalu ada dan tidak akan pernah hilang, seperti yang dijelaskan dalam arti pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut penulis ingin memperkenalkan teori Perennialisme.

Guruku Mengajari Korupsi. Ternyata masalah korupsi di Indonesia, rakyat dipertontonkan “sinetron” penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi yang masih jauh dari kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. Dikalangan akademisi, ada rasa pesimis mengatakan bahwa kajian akademis seputar korupsi kurang menarik bila dibandingkan dengan wacana kecaman terhadap korupsi dan pelakunya yang berproses diruang publik. Padahal pendidikan adalah pembudayaan, pendidikan bahkan diharapkan menciptakan kebudayaan baru (produces new culture). Itulah sebabnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dikaji strategi kebudayaan dan politik, sebab strategi kebudayaan akan dapat menciptakan perubahan - perubahan antara lain : mengubah budaya Idonesia menjadi lahan tandus bagi segala jenis bentuk korupsi ; mengubah segenap manusia Indonesia untuk berani dan tegas mengatakan “tidak pada korupsi” ; mengubah pemilih Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang terindikasi korupsi.

Pemilu Pertama ORBA Sandiwara. Ternyata di jaman pemerintahan orde baru di bawah presiden Soeharto, bahwa : Penyelenggara Pemilu adalah Penguasa/ Pemerintah. Bukan lembaga independen;
Partai Pendukung Pemerintah (Golkar) selalu menang

mutlak. Itulah sebabnya mengapa Soeharto bisa berkuasa 30 tahun lebih;

Hasil pemilu sudah bisa diketahui, bahkan sebelum pemilu dilaksanakan, orang sudah tahu hasilnya, dan sudah dapat dipastikan siapa yang menang. Lebih cepat dari metode Quick Count sekarang ini;

Semua organisasi yang terkait dengan pemerintah, pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, termasuk pegawai negeri dan BUMN dimobilisasi untuk mendukung dan memilih partai Pemerintah (Golkar);

Sebagian TPS didirikan di kantor lembaga pemerintahan dan kantor BUMN. Hari Pemilu bukan hari libur. Di semua TPS yang didirikan di kantor-kantor, partai pendukung Pemerintah (Golkar) menang 100%. Pegawai Negeri/BUMN yang tidak memilih Golkar akhirnya pasti akan ketahuan/tertangkap dan diinterogasi habis-habisan, dan akhirnya dapat konduite jelek bahkan bisa dipecat.

BAGIAN KEEMPAT, Philosophy Pancasila, membahas empat topik :

Pancasila sebagai Ilmu. Ternyata Pancasila sudah terbukti sebagai Ilmu dan juga sumbernya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri, tapi mengapa masih ada orang Indonesia yang mau mengganti Pancasila sebagai Ideologi bangsa ? Dan bahkan tidak mau mengakuinya sebagai Pokok Kaidah Negara (Staat Fundamental Norm) ?

Haluan Ideologi Pancasila, dalam membahas RUU HIP di DPR muncul perbedaan sikap yang pro dan kontra yang cukup tajam, ini bisa terjadi karena “Ada pihak-pihak yang secara sengaja hendak menggunakan agama sebagai alat politik yang memecah belah dengan cara menghembuskan fitnah dan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Perdebatan (pro-kontra) tersebut seharusnya tidak perlu

terjadi apabila semua pihak punya kesepakatan apa sebenarnya yang menjadi “pokok masalah” artinya dengan mencari faktor -faktor penyebab dari pokok masalah tersebut dan apakah akibat yang terjadi dari pokok masalah tersebut. Sehingga dalam perdebatan terjadi kesalahan pengambilan kesimpulan, sebagai contoh apa korelasinya pengusul draf RUU HIP itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga kesimpulannya Partai pengusul draf tersebut dituduh PKI dan harus dibubarkan?

Asrama Mahasiswa REALINO – BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Ternyata alumnus Asrama Realino (Forsino) setelah keluar dari Asrama mengakui betapa besar arti hidup rukun dan guyub dalam keberagaman dalam bingkai kesatuan keluarga Asrama Realino. Kehidupan di Realino membangun kesadaran menerima orang lain yang berbeda dari kita sendiri serta hidup bersama dengannya di suatu lingkungan kehidupan kekeluargaan. Benar benar terasa dan mengalir dalam diri setiap penghuni asrama bertumbuh dan berkembang ke-Indonesia-an yang “Bhinneka Tunggal Ika” dijiwai oleh semangat “Sapientia et Virtus”. Asrama Realino adalah wadah nyata dari Indonesia Mini. Inilah yang menjiwai setiap alumnus Realino sampai saat ini dalam menjalani kehidupan sebagai warga Negara Indonesia.

BAGIAN KELIMA, Pancasila Dan Trinitas, membahas tentang Sila Pertama Pancasila Coba Dibenturkan, ternyata Indonesia yang sudah berumur 74 tahun masih ada segilintir orang yang membenturkan arti Ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dengan Trinitas keyakinan orang Kristen dengan sasarannya untuk tidak mengakui orang yang beragama Kristen sebagai bangsa Indonesia sebab orang Kristen mempunyai Tuhan yang tidak sesuai dengan sila pertama.

BAGIAN KEENAM, Reformasi Pendidikan, membahas

tentang Pandangan Kritis terhadap Sistem Pendidikan Nasional. Ternyata untuk Pembentukan sistem pendidikan di Indonesia dapat dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

Sederhanakan kurikulum nasional sesuai usianya, dan muatannya harus bersifat mendasar, humanis, dan kultural.

Ajarkan kembali pelajaran Pancasila, sejarah, budi pekerti, agama dalam cakupan rasional dan kontekstual, kesenian dan kebudayaan, khususnya bagi murid SD, SMP dan SMA.

Bebaskan sekolah dan kampus dari ancaman dogma-dogma radikalisme agama.

Bebaskan sekolah dan kampus dari perilaku diskriminatif dari segala bentuk parameter SARA.

Perbaiki mekanisme dan sistem evaluasi pendidikan nasional secara berkala dan rutin.

Negara harus hadir dalam menjamin kualitas pendidikan nasional dan sekolah harus imun dari segala bentuk penyusupan paham-paham ideologi sesat yang dilakukan oleh guru-guru dan alumni yang ujung-ujungnya menggoyahkan Pancasila, keutuhan NKRI dan merusak Kebhinekaan Indonesia.

Buku ini merupakan persembahan/hadiah ulang Tahun penulis yang ke 65 Tahun yang dipersembahkan buat bangsa dan negara yang kebanggaan ini dan khususnya buat istri tercinta Selvina Manotor Panjaitan yang dengan sabar mendorong penulis agar buku ini bisa diterbitkan dan juga buku ini dipersembahkan buat anak- mantu yang tersayang yang merupakan motivasi penulis.

Akhirnya, dengan hadirnya buku ini dihadapan sidang pembaca penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, berkat dorongan saudara yang tulus ikhlaslah maka buku ini terbit. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman : Alumni SMANSA Kisaran Angkatan 71-75, teman-teman Paguyuban Kerukunan Keluarga Kisaran (K 3), teman-teman Alumni Angkatan 75 Jurusan Politik

Pemerintahan (JPP) FISIPOL UGM Yogyakarta, teman-teman Alumni Asrama Mahasiswa REALINO (FORSINO) Angkatan 76-78 Yogyakarta. teman-teman Senior Friend GMKI Angkatan 74-80 Yogyakarta, teman-teman Alumni Batak Yogyakarta yang tergabung dalam Parsadaan Batak Alumni Yogyakarta (PABAYO), teman-teman alumni Program Pascasarjana Kebijakan Publik UI Angkatan 1999-2000 dan teman-teman Alumni Doktoral Prodi M.Pd Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2003 . Dan akhirnya kepada teman-teman dosen Prodi M.Pd Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Salam dari Cibubur Jakarta Timur
Jakarta 20 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih.....	iii
Sambutan	vii
Pengantar Penulis	xxiii
Daftar Isi.....	xxxv

BAGIAN PERTAMA:

Ideologi Negara dan Kemiskinan	1
Bab 1 Masa Sekolah Rakyat	2
Pemahaman Terhadap Lambang Garuda Pancasila	2
Pendidikan Karakter dan Sila Kedua	10
Toleransi Dan Sila Ketiga	12
Kemiskinan Struktural Dan Sila Kelima	17
Krisis Ekonomi 1959	21
Pemberontakan PKI tahun 1965	24

BAGIAN KEDUA: Kepemimpinan dan Konflik

Bab 2 Masa Sekolah Menengah Pertama (SMP)	32
Terbangunnya Sikap Kritis	32
Konflik SARA	38

BAGIAN KETIGA: Pendidikan dan Pembebasan.....

Bab 3 Masa Sekolah Menengah Atas	44
SMA Ku Candra Dimuka	44
Guruku Mengajari Korupsi.....	51
Pemilu Pertama ORBA, Sandiwara	58

BAGIAN KEEMPAT: Philosophy Pancasila

Bab 4 Masa Study S1 Di Yogyakarta	66
Mahasiswa Fakultas Sospol UGM	66
Pancasila Sebagai Ilmu	66
Haluan Ideologi Pancasila	70
Asrama Mahasiswa Realino Bhinneka Tunggal Ika	75

BAGIAN KELIMA:

Sila Pertama Pancasila dan Trinitas 83

Bab 5 Masa Study S2 di Universitas Indonesia

Sila Pertama Pancasila Coba Dibenturkan 84

Latar Belakang 84

Benarkah Agama Kristen Bertentangan
dengan Pancasila 84

Trinitas Bukan Ideologi Negara 85

Kelemahan Pancasila di Lingkungan Sekolah 97

Kekeliruan Memandang dan Menafsirkan Pancasila 99

BAGIAN KEENAM: Reformasi Pendidikan 105

Bab 6 Masa Study S3 di Universitas Negeri Jakarta

Pandangan Kritis Terhadap Sistim Pendidikan

Nasional 106

Latar Belakang 106

Tujuan Pendidikan 108

Metode Pendidikan 109

Kurikulum 112

Guru 116

Penutup 121

Daftar Pustaka 123

Tentang Penulis 129

**BAGIAN PERTAMA:
Ideologi Negara dan Kemiskinan**

*“Apabila ekonomi rakyat morat – marit,
bukan Ideologi Negara yang dibutuhkan
tapi kemiskinan itu sendiri yang
dijadikan musuh bersama
yang harus dilawan.”*

BAB 1

MASA SEKOLAH RAKYAT

Pemahaman Terhadap Lambang Garuda Pancasila

Penulis masih ingat waktu pertama kali masuk sekolah SR No.1 Kisaran, di dinding kelas ada dipajang foto Presiden Ir. Soekarno, Undang – Undang Dasar 1945 dan Lambang Garuda Pancasila yang warnanya didominasi warna kuning emas, merah – putih terdapat pada ruangan perisai di tengah-tengah dan garis hitam ditengah-tengah perisai. Tapi aneh tahun 2014 dan tahun 2019 tepatnya pada saat Pilpres di Indonesia Lambang Negara Garuda Pancasila yang dipakai salah satu pendukung capres warnanya “merah” dan dikenakan di dada tanpa merasa risi dan bersalah bahwa lambang Negara Garuda yang dikenakannya bertentangan dengan pasal 49 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Pertama kali melihat gambar burung garuda itu, penulis tertarik dan mengesankan sebab begitu gagahnya dan indahnya kedua sayapnya dengan buluhnya berwarna kuning emas serta kokoh kakinya mencengkeram tulisan BHINNEKA TUNGGAL

IKA. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada saat itu (SR) penulis tidak tau dan mengerti apa artinya, barulah sesudah SMP mengerti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya “Berbeda – beda tetapi tetap satu” dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan Motto atau semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan makna Bhinneka itu sendiri sebagai pemersatu bangsa, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau, 60% wilayah laut yang memisahkan beragam pulau, dan terdapat 714 suku dan lebih dari 1100 bahasa daerah atau ras yang berbeda – beda. Harapannya dengan perbedaan yang sangat besar antara tiap daerah di Indonesia ini, membuat Indonesia harus bisa disatukan dengan sebuah cara yakni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika merupakan cara bangsa Indonesia dalam menyatukan wilayah yang memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda tiap daerahnya.

Disamping Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada juga yang sangat penulis sukai disekolah yakni saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, bait – baitnya menyentuh hati dan membangkitkan kebanggaan sebagai anak Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya itu selalu penulis nyanyikan dengan jiwa sanubari dan terkadang pada saat dinyanyikan tanpa sadar air mata meleleh, terbayang betapa beratnya perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mendapatkan kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya kami nyanyikan waktu upacara bendera disekolah, harinya kalau tidak salah setiap hari senin. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya kami semua dengan sikap sempurna yakni berdiri tegak dengan meluruskan lengan ke bawa dan melekatkan tapak tangan dengan jari – jari rapat pada paha serta pandangan lurus ke depan. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan “Hendaknyalah mengibarkan Sang Merah Putih dan melagukan Indonesia Raya terus dipakai sebagai penjaga terpeliharanya semangat patriot Indonesia (Najelaa Sihab. 2016). Oleh karena itu sekolah

hendaknya memelihara dan kuatkanlah rasa cinta nusa dan bangsa dalam hati sanubari murid-murid dan pelajar-pelajar dengan memasukkan semangat kebangsaan dalam segala pelajaran, serta menghapuskan segala isi yang dapat melemahkan semangat itu.

Pada era ORBA penulis sedih melihat orang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sikapnya berbeda – beda, ada yang bernyanyi saat bendera ditarik seraya memberi hormat dan ada yang berdiri tegak sambil tangannya memegang dada, dan ada juga yang bernyanyi lagu kebangsaan dengan sikap berdiri santai.

Di era Reformasi upacara resmi kenegaraan mengalami perubahan yang sangat drastis artinya setiap upacara kenegaraan lagu Indonesia Raya dinyanyikan langsung setiap peserta upacara tidak lagi dengan kaset. Hanya saja pada waktu acara pengundian nomor urut calon presiden (Capres) dan wakil presiden (Wapres) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, 21 – 9 – 2018, saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan, hanya calon Presiden Petahana Joko Widodo yang memberi hormat dengan mengangkat tangan keatas dan menempelkannya ke dahi. Sementara itu, pasangan Jokowi, Ma'ruf Amin dan rival mereka pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, berdiri dengan sikap sempurna. Ketiganya berdiri menghadap depan dan meluruskan lengan ke bawah.

Yang menyedihkan dan disayangkan ada anggota masyarakat bahkan anak siswa didik yang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak mau menghormat bendera merah putih dengan alasan yang tidak jelas, bahkan tidak mau ikut upacara menaikkan bendera. Sangat disayangkan guru yang sudah tau ada anak didiknya tidak mau mengikuti upacara menaikkan bendera tidak memberikan sanksi berupa pembinaan untuk menyadarkan anak didik bahwa lagu Indonesia Raya merupakan wajib dinyanyikan oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958

Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ; Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ; dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018, Pedoman Upacara Bendera di Sekolah. Sehingga dalam kasus tersebut sepatutnya ada pembiaran oleh guru.

Bahkan dikalangan PNS tidak merasa bersalah pada saat mengikuti apel upacara penaikan bendera, tidak memberi hormat dengan berdiri tegak dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya malah sibuk ngerumpi ngobrol ngalor - ngidul, Seperti kasus Pemprov DKI Jakarta saat melaksanakan upacara 17 Agt 2019, yang dilansir dari www.rmoljakarta “Puluhan Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dipergoki duduk-duduk atau mengobrol dengan rekannya saat upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 di atas lahan Pantai Maju atau Pulau D, Jakarta Utara, Sabtu (17/8). Bahkan terpantau ada yang memilih berjalan-jalan di kawasan tersebut. Padahal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selaku inspektur upacara sedang berpidato soal semangat kemerdekaan. Mereka tampak berdiri berkelompok dan tidak menghiraukan upacara yang bersejarah tersebut. Terlebih saat momen lagu Indonesia Raya berkumandang mengiringi pengibaran bendera merah putih, puluhan PNS ini masih terlihat bermalas-malasan dan terkesan cuek. Diketahui, upacara bendera di Pantai Maju ini diikuti oleh sekitar 4.000 PNS Pemprov DKI Jakarta. Adapun alasan Anies Baswedan menggelar upacara bendera di atas lahan reklamasi tersebut adalah simbol bahwa lahan itu milik negara bukan milik swasta. “Kita menyelenggarakan upacara disini sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta,” kata Anies sangat disayangkan Gubernur DKI tidak melakukan tindakan tegas terhadap ASN yang nota bene adalah anak buahnya yang sudah jelas – jelas melanggar UU tentang ASN.

Di Era Orba, terasa sekali terjadi demoralisasi terhadap nasionalisme dikalangan abdi negara (ASN) hal ini dapat dilihat saat upacara resmi seperti apel bulanan setiap tanggal 17 di Kantor-kantor pemerintahan sering terjadi peserta apel yang berada dibelakang duduk-duduk terkadang merokok dengan sembunyi – sembunyi. Apalagi setiap apel bendera lagu kebangsaan Indonesia Raya tidak dinyanyikan secara bersama / serentak oleh peserta, sehingga bait / syair kata – kata lagu Indonesia Raya itu tidak menggetar dalam sanubari setiap peserta apel, karena lagu Indonesia Raya hanya diputar dengan kaset tidak dinyanyikan secara serempak oleh peserta apel. Dengan model upacara kebangsaan seperti itu membuat rasa nasionalisme dikalangan PNS dan masyarakat menurun.

Menurunnya penghormatan orang perorangan, kelompok masyarakat terhadap lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga, terjadi di Prov. Lampung. Menjelang memperingati HUT RI 74 tahun 2019, ada warga masyarakat yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Berita itu dilansir dalam Internet yang judulnya: “Ken Setiawan: Pilih Mati daripada Pasang Bendera Merah Putih”.

Peristiwa ini terjadi di salah satu kabupaten di provinsi Lampung, gara gara bendera merah putih hampir saja terjadi konflik antar warga dikarenakan seorang warga tidak terima di pinggir jalan tepat di depan rumahnya di pasang bendera merah putih oleh warga.

Seperti biasanya jelang peringatan 17 agustus warga beramai ramai secara gotong royong memasang bendera di sepanjang jalan desa untuk memeriahkan acara agustusan, tapi ternyata hal itu berujung konflik karena ada yang tidak terima bila di depan rumahnya yang dipinggir jalan itu dipasang bendera merah putih padahal warga yang lain semuanya di pasang semua, alasan orang tersebut katanya berhubungan dengan tauhid dan keimanan, bahkan katanya sampai dalam tahap menggadaikan iman bila bendera merah putih yang katanya taghut/berhala maka

dianggap ia keluar dari Islam.

Sebuah alasan yang tidak masuk akal tapi akhirnya bisa diselesaikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Warga yang menolak memasang bendera merah putih itu memang terkenal dengan pendukung khilafah yang anti terhadap demokrasi dan anti Pancasila, tapi pemasangan bendera itu kan di pinggir jalan, bukan di rumahnya dia, kata warga.

Kejadian terkait bendera juga terjadi di beberapa sekolah di provinsi Lampung, ada beberapa sekolah yang tidak mewajibkan upacara bendera, alasannya tidak wajib dan mungkin alasan sebenarnya adalah karena masalah keimanan seperti warga yang menolak memasang bendera pada peringatan 17 agustus.

Menurut Ken Setiawan yang juga merupakan mantan aktifis kelompok radikal dan Pendiri NII Crisis Center, memang persoalan bendera sama halnya persoalan syahadat, jadi dalam doktrin radikal, dianggap membatalkan syahadat sebab sama-sama meyakini pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, padahal umat Islam sumber hukum hanyalah Alquran, jadi kalau meyakini pancasila dan memasang bendera merah putih sama - sama mengimani Pancasila yang dianggapnya sebagai taghut/berhala yang wajib diingkari, di tolak dan ditinggalkan.

Jadi kalau masih meyakini Pancasila dan mengibarkan merah putih sama-sama dianggap belum beriman alias masih kafir sehingga ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT.

Bagi Ken, penolakan Pancasila dan bendera merah putih bukanlah persoalan biasa, tapi sudah merupakan pelanggaran jadi wajib ditindak.

“Nasionalisme” mereka pun dipertanyakan karena tidak mau menghormati Pancasila dan bendera merah putih. Padahal Merah Putih adalah jiwa raga bangsa Indonesia, simbol merah darah-perjuangan dan putih tulang para pejuang kemerdekaan, Tegas Ken.

Bila ada warga di sekitarnya terjadi penolakan Pancasila dan pemasangan bendera merah putih, Ken menyarankan agar warga melapor ke aparat agar segera ditindak dan supaya tidak terjadi konflik main hakim sendiri, sebab sekarang banyak sekali orang yang menolak Pancasila dan juga menolak memasang bendera merah putih, Tutup Ken.

Sumber:

<http://kamtibmasnkri.com/2019/07/31/ken-setiawan-pilih-mati-daripada-pasang-bendera-merah-putih>

Di Era ORBA Pancasila ditafsirkan secara tunggal oleh pemerintah melalui BP 7 dan P 4 dan Pancasila dijadikan sebagai persyaratan untuk lolos menjadi PNS dan masuk ABRI serta masuk Perguruan Tinggi, bahkan bagi setiap warga Negara wajib mengikuti Penataran P4 sehingga tidak asing lagi kata Pancasila di era ORBA, namun kata Pancasila yang selalu didengung – dengungkan, diumbar bahkan dalam olah raga sepakbola organisasinya yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) diberi kata Pancasila, sehingga jadilah PSSI Pancasila, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran makna, ambigu kotradiksi karena dalam kehidupan sehari – hari elit politik dan tokoh masyarakat jauh dari implementasi Pancasila, sebab dilingkarkan mereka sendiri terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan membentuk dinasti – dinasti politik serta kalangan PNS (pegawai negeri sipil) terdapat segelintir orang yang hidup mewah yang tidak seimbang dengan besarnya gajinya. Apalagi kalangan PNS ketika itu kata Pancasila sepertinya hambar hanya sebagai suatu simbol yang tidak punya makna, sebab kata Pancasila sudah menjadi rutinitas sehari-hari kalangan PNS.

Di Era Reformasi masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, beliau begitu konsern terhadap Kebhinnekaan dan nasionalisme. Hal ini dapat dilihat pada setiap upacara nasional baik di Istana Negara maupun diluar Istana selalu diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan peserta upacara wajib

menyanyikan secara bersama dan serentak. Dan yang membanggakan, Pak Jokowi merubah tradisi lama di Istana, yakni dalam setiap upacara perayaan memperingati HUT RI peserta diberi kebebasan memakai pakaian budaya daerahnya masing – masing. Kenapa saya bangga? Sebab dengan kebijakan Jokowi itu memperlihatkan betapa Presiden punya perhatian dan niat yang tulus untuk membangun KEBHINNEKAAN Indonesia, artinya bahwa kebijakan itu mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa pentingnya menghargai budaya yang sudah ada sejak dulu kala yang diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia artinya mari kita rawat dan jaga budaya nasional itu. Masalahnya bagaimana kita merawat Kebhinekaan itu ?

Disinilah, diperlukan pemikiran yang komprehensif artinya dalam memecahkan masalah jangan berfikir parsial (akibat) tapi berfikir komprehensif yakni Model **berfikir komprehensif integral** yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan hubungan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah dapat terselesaikan.

Dengan berfikir model komprehensif yang utama diperlukan adalah penetapan “pokok masalah”, pokok masalah ini dapat diuji dengan faktor penyebab artinya faktor -faktor apa yang menyebabkan pokok masalah tersebut dan apabila sudah terbukti factor penyebabnya, maka pokok masalah tersebut diuji apa akibat yang terjadi dari pokok masalah. Demikian, juga apabila hendak menguji mengapa rendahnya pemahaman terhadap lambang Garuda Pancasila, maka terlebih dahulu dicari faktor -faktor penyebab, ternyata penyebabnya:

Rendahnya pendidikan politik guru

Rendahnya pendidikan politik anak didik,

Rendahnya pendidikan budi pekerti.

Setelah diketahui faktor penyebabnya maka langkah berikutnya menguji apakah akibat dari rendahnya pemahaman terhadap lambang Garuda Pancasila, ternyata akan

mengakibatkan menurunnya Nasionalisme Bangsa Indonesia. Sehingga apabila ingin membangun pemahaman terhadap lambang Garuda Pancasila, maka yang pertama dianalisa adalah melakukan sosialisasi politik kepada guru dan anak didik dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Yang disebut dengan budi pekerti atau watak yaitu bulatnya jiwa manusia (karakter) yaitu jiwa yang sudah “berazas hukum kebatinan”. Orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap (Najelaa Sihab. 2016). Jadi “budi” itu berarti pikiran - perasaan – kemauan dan “pekerti” itu sifatnya jiwa manusia, mulai angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga.

Itulah sebabnya untuk merawat kebangsaan Indonesia yang harus dilakukan adalah mengintensifkan Pendidikan politik (sosialisasi politik) di sekolah – sekolah mulai dari tingkat TK sampai tingkat Perguruan Tinggi, bukannya melakukan Pendidikan Meliter di kampus (wajib meliter) seperti yang di programkan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan (**KEMENHAN**). Akan tetapi mulailah dengan Pendidikan dan pengajaran kebangsaan semurni mungkin ; lambat laun mengikuti kecerdasan jiwa anak-anak yang dengan sendirinya makin lama makin luas alamnya hingga kelak akan mendekati alam yang lebih luas daripada alam kebangsaannya sendiri ; disitulah anak-anak kita menjadi dewasa dan dapat berdiri sebagai manusia di seluruh dunia, tidak mengandung perasaan “asing”, tidak merasa berderajat rendah.

Pendidikan Karakter dan Sila Kedua

Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju kearah

hidup yang lebih baik

Sebagai anak bungsu dari enam bersaudara dengan jarak umur yang relative jauh, penulis 65 tahun sedangkan abang yang paling tua Afner berumur 85 tahun, jadi jarak umur kami 20 tahun, dengan bang Victor 18 tahun dan dengan bang Sorta 15 tahun, itulah sebabnya ada kendala komunikasi dengan ketiga abang itu, disamping itu mereka mulai SMP sudah bersekolah dikota Medan. Sehingga kalau mereka bertiga pulang dari Medan ke Kisaran biasanya kebebasan untuk bermain terbatas dan kalau mereka sudah menyuruh saya, saya tidak berani membantah mereka. Itulah sebabnya kalau mau bermain dengan kawan-kawan penulis harus seijin mereka, jadi mereka sangat peduli (*protect*) terhadap penulis, mereka takut kalau-kalau berkelahi (berantam) dengan kawan-kawan, sehingga setiap penulis mau ijin bermain kepada mereka pesannya hanya satu: “jangan pulang kerumah menangis karena habis berkelahi (berantam)”. Apabila penulis pulang kerumah dalam keadaan menangis pasti yang kudapat adalah bentakan/omelan dan pukulan dari bang Sorta sembari mengatakan siapa suruh kau bermain keluar rumah dan kenapa tidak kau lawan, itulah yang selalu diucapkannya kalau pulang kerumah dalam keadaan menangis, lain halnya dengan bang Juntar.... Pas tulisan ini sedang penulis kerjakan bang Juntar tepat jam 01.00 dini hari, tanggal 28 April 2019 anaknya si Prianto Tambunan menelpon mengabarkan bahwa bapaknya (Juntar) telah dipanggil Tuhan jam 00.40 wib di RS. POLRI Kramatjati Jakarta Timur. Bang Juntar merupakan abang yang nomor lima jarak umur kami relative dekat 3 tahun tapi dia punya perhatian khusus dengan penulis, bagi penulis dia sebagai pelindung sebab kalau dia tahu penulis berkelahi dan pulang kerumah menangis sudah pasti dia tidak akan memperlakukan seperti bang Sorta tapi dia akan mendatangi dan mencari siapa lawan berkelahi itu untuk membalasnya tak jarang orang tua yang dihajar/dipukuli sama bang Juntar itu mencari dia untuk membalas karena anaknya

dipukul. Dari kedua sikap yang berbeda dari bang SORTA dan JUNTAR itu tentunya ada plus minusnya.

Sikap bang Sorta itu mendidik penulis “agar masalah yang dihadapi diluar jangan dibawa kerumah, selesaikan saja diluar artinya bang Sorta menanamkan jiwa sportifitas kalau salah minta maaf dan kalau benar lawan”. Sedangkan sikap perlindungan yang diberikan bang Juntar itu menunjukkan “sebagai seorang abang yang lebih tua wajib bertanggung jawab dan melindungi adiknya apabila menemui kesulitan/ masalah”. Sikap bang Juntar yang terlalu melindungi (protect) itu membuat penulis menjadi anak pengecut, tidak pemberani atau jagoan dan efek lebih jauh penulis menjadi orang penakut untuk berkelahi, dengan pengertian lain menjadi orang manja (anak mami). Secara tidak langsung terbentuklah sikap ganda dalam diri penulis yakni watak yang keras dan perilaku yang terkadang menjadi orang pemberani dan disatu sisi menjadi orang yang penuh pertimbangan (*compromise*).

Pengalaman pendidikan masa kanak – kanak itulah yang mendorong penulis berobsesi bagaimana agar sistim pendidikan di Indonesia dirubah kearah perkembangan jaman artinya bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat survive di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebab dalam kenyataannya dewasa ini bangsa Indonesia masih dilanda krisis korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada gilirannya dapat merendahkan integritas dan karakter bangsa dan tidak dapat disangkal juga memicu terjadi krisis pendidikan. Memang pendidikan tidak terlepas dari kehidupan politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan suatu bangsa. Itulah sebabnya dalam krisis saat ini merupakan pula refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Toleransi dan Sila Ke Tiga

Toleransi merupakan pengakuan masyarakat yang majemuk yang mengakui perdamaian dan menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari, aturan, serta menghargai atau

menghormati setiap tindakan orang lain. Dengan pengertian lain, sikap toleransi adalah sikap dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat yang majemuk. Toleransi dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik meskipun dalam masyarakat terdiri dari beragam agama, ras, suku, dan golongan.

Toleransi akan dapat meningkatkan rasa persaudaraan, karena dalam diri seseorang akan menimbulkan kasih sayang di dalam dirinya sehingga rasa persaudaraan terhadap sesama anak bangsa akan semakin besar. Apabila lahir rasa persaudaraan yang tinggi maka masyarakat secara umum akan terhindar dari perpecahan. Disamping itu Toleransi juga akan meningkatkan rasa nasionalisme, bila individu mempunyai sikap positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari - hari.

Demikian juga Ki Hadjar Dewantara, mengatakan: Toleransi artinya sikap murah hati, yaitu membiarkan orang lain hidup menurut kehendaknya sendiri. Sikap inilah yang menjadi pupuk untuk berkembangnya rasa bebas dan merdeka pula rasa tanggung jawab (Najelaa Sihab. 2016. h. 159).

Kawan bermain masa anak-anak mungkin maaf sudah ada yang almarhum seperti: Efendi Ritonga, adiknya si Thamrin Ritonga yang rumahnya didepan rumah kami, Fendi Nasution yang disamping rumah kami, Lampon Sitorus yang rumahnya persis di jalan Cokroaminoto, Djono yang rumahnya dibelakang rumah ku, Jannes Panjaitan rumahnya jajaran dengan rumah si Fendi Nasution, Poniran, Usman Nasution yang rumahnya dibelakang rumah kami. Kenapa kawan-kawanku itu kusebut karena ada cerita yang lucu-lucu bercampur nakal tapi nakal anak-anak.

Pernah kami habis main alip benteng pada malam hari karena haus muncul ide mencuri tebu punya pak Zakir (Orang minang), lagi kami asyik memotong tebu tiba-tiba pak zakir sudah berdiri didepan dengan wajah yang sangar (marah) dan menangkap lalu mau memukul dengan batang sapu ijuk yang

sudah disiapkannya, dengan mengiba-iba sambil menangis minta ampun agar jangan dipukul, eh... begitu dilihatnya muka penulisrupanya dia mengenal katanya kau si UCOK anak pak Tambunan?. Loloslah penulis dari amarah murkanya tapi golok yang kami gunakan untuk memotong tebu milik si Thamrin disitanya, dan terpaksa kami mengganti goloknya si Thamrin itu.

Cerita lain ada lagi yang mengesankan habis main petak umpet dan gala panjang malam hari sekitar jam 23.00 wib perut kami lapar lalu bagaimana untuk mengatasi lapar itu ? Muncullah ide curi ayam tetangga, tapi bagaimana caranya agar ayam itu saat ditangkap dikandang tidak berkotek dengan maksud agar orang yang punya tidak dengar, lalu Poniranlah yang siap dan mau menangkapnya sendiri dan ternyata ayam yang ditangkapnya itu tidak sedikitpun berkotek begitu kutanya kenapa koq ayam yang ditangkap tidak berkotek-kotek lalu dia kasih tau rahasianya bahwa sebelum menangkap ayam tadi tangannya terlebih dulu disapu bawang merah.

Begitulah kenakalan masa anak-anak yang sampai sekarang bingung mengenangnya dan menimbulkan pertanyaan - pertanyaan, antara lain, faktor-faktor apakah yang membuat kami seberani itu dengan tingkat umur muda (anak-anak), apakah mungkin didorong faktor kemiskinan karena memang masa itu makan susah dan juga fasilitas untuk bermain dan hiburan dirumah tidak ada seperti TV, Radio, Komputer, Laptop, HP, Gadget bahkan rumah kawan-kawan ada yang tidak punya lampu listrik. Atau apakah karena masa itu belum dikenal program KB (keluarga berencana), atau apakah mungkin faktor pengawasan orang tua yang lemah terhadap anak? karena orang tua kawan-kawan punya kesibukan mengurus kebutuhan rumah tangga (keluarga) dan kebutuhan anak-anaknya dirumah. Ataukah mungkin tingkat pendidikan orangtua kawan-kawan rendah, sebab bapak penulissaja sekolahnya hanya setingkat SD yaitu H I S (Hollandsch-InlandscheSchool) yaitu sekolah Belanda

untuk bumiputera merupakan sekolah pada zaman penjajahan Belanda (Sekolah ini, pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1914), itupun tidak tamat dan mama sendiri termasuk yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan alias buta huruf.

Hubungan pergaulan diantara anak-anak sangat dekat dan toleransinya sangat baik, anak-anak kalau mau bermain petak umpat malam hari harus selesai belajar mengaji dulu artinya kami sejak anak-anak sudah dikenalkan dengan suatu nilai (*value*) “toleransi” yakni menghormati orang lain yang lagi beribadah dan juga menghormati yang berbeda keyakinan. Waktu masih anak-anak nilai itu sangat penulis junjung dan yakini baik sebab agama saya juga mengatakan: sesama mu hendaklah saling menghormati, tapi sesudah beranjak dewasa ternyata nilai itu bersifat “deskriminatif” hanya sebatas pernyataan bahkan cenderung larangan bagi umat non muslim, karena dalam praktek nilai itu hanya berlaku kepada umat muslim ketika umat muslim beribadah dilarang ada gangguan (suara berisik), tapi sebaliknya bagi umat beragama lain ketika beribadah tidak diperbolehkan membuat suara keluar dari rumah ibadah artinya rumah ibadah dilarang menggunakan TOA yang suaranya sama dengan suara yang dari masjid.

Demikian juga ketika memasuki bulan suci ramadhan (kata suci bulan Ramadhan penulis tidak setuju sebab kalau ada satu bulan suci berarti 11 bulan tidak suci), biasanya kami yang beragama non muslim diminta menghormati kawan-kawan kami yang sedang berpuasa, artinya jangan makan - makanan didepan kawan yang sedang puasa dan selama bulan puasa warung dan rumah makan pada siang hari tutup. Dan begitu hari lebaran tiba kawan-kawan yang muslim datang kerumah mengantarkan kue-kue yang dibuat oleh keluarganya dan tak jarang juga mengantarkan makanan berikut daging ayam dan rendang padang. Sebaliknya begitu hari Natal atau Tahun Baru tiba giliran penulis sibuk mengantar makanan kepada tetangga-tetangga yang muslim yang jumlah orangnya relative banyak, itu dilakukan

oleh keluarga kami dari tahun ketahun dengan senang hati dan suka cita, tapi sekarang saya tidak tau apakah nilai yang saling menghormati itu masih ada di kota Kisaran?.

Begitulah harmonisnya hubungan kami sampai-sampai penulis dibolehkan ikut belajar mengaji bersama dengan mereka walaupun penulis beragama nasrani. Pengalaman masa anak-anak itu membawa keberuntungan juga sebab jadi tau mengaji dan pasih mengucapkan “Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” (ASWW). Disamping itu ada keberuntungan bergaul dengan kawan-kawan yang muslim itu, sebab pernah suatu ketika penulis diajak ikut sunat/khitanan masal dan gratis pulak, penulis hanya disuruh menyiapkan kain sarung dan kulit kelapa untuk ganjal kain sarung. Demikian juga masalah budaya dan kesenian jawa sering penulis nikmati karena kawan-kawan kebanyakan orang suku jawa sehingga budaya dan adat istiadat jawa dalam keseharian secara tidak langsung berpengaruh dalam permainan kami, seperti ikut acara “tumpengan” makan-makanan jawa karena ada sunatan, nonton wayang kulit semalam suntuk karena ada mantenan dan ada tarian kuda lumping (jara kepang) karena ada acara syukuran keluarga.

Sesudah penulis menikah dan bekerja di Pemprov DKI Jakarta kerukunan masa anak-anak itu terbawa terus, sehingga kami anak Kisaran yang tinggal di Jabodetabek tanggal 14 Juli 1985 membentuk organisasi yang diberi nama K3 (Kerukunan Keluarga Kisaran). Dalam K3 ini anggotanya bermacam-macam suku dan agama yang kesemuanya anak Kisaran. Tujuan organisasi ini adalah membangun silaturrahi dan tolong menolong sesama anak Kisaran dan juga merupakan media untuk silaturrahi dengan saudara-saudara yang ada di Kisaran. Bila bulan suci Ramadhan biasanya diadakan buka puasa bersama yang tempatnya bergiliran dirumah anggota dan saya biasanya diundang untuk hadir, demikian juga setelah lebaran kami mengadakan “Halal Bil Halal” dan ini merupakan kegiatan rutin

tahunan yang kami laksanakan dan yang membuat guyub di setiap acara K3 itu yang hadir tidak hanya beragama muslim tapi kami yang non muslim juga hadir bahkan saya selalu memberi sambutan. Terkadang apabila ada anggota yang akan menunaikan ibadah haji biasanya kami lakukan acara adat yang namanya “Tepung Tawar”. Jadi ditengah perbedaan tersebut terbangun rasa kebersamaan diantara kami anak Kisaran yang ada di Jabodetabek dan tidak sekalipun anggota organisasi K3 terjadi konflik dikarenakan masalah SARA, bahkan K3 itu membangun rasa persaudaraan yang kuat dan kompak.

Toleransi antar Suku, antar Ras dan antar Agama yang hidup di tengah masyarakat yang ditanamkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah dengan jalan kekerasan, melainkan dengan sifat toleransi, sifat terbuka terhadap budaya yang masuk, melestarikan budaya yang sudah ada. Itulah sebabnya bangsa ini harus berani mengambil sikap tegas terhadap isu SARA membuka wawasan dan memaknai kehidupan sosial yang lebih terbuka, serta bijaksana memahami segala bentuk keragaman budaya sebagai langkah awal membina persatuan dan kesatuan bangsa.

Itulah sebabnya persatuan itu terbentuk memerlukan syarat-syarat yakni: 1) Janganlah menyatukan apa yang tidak dapat dipersatukan ; 2) Janganlah menyatukan apa yang tidak perlu dipersatukan; 3) Kesatuan dalam dasar dan azas, dalam pokok-pokoknya cukuplah, bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan yang kokoh dan abadi.

Kemiskinan Struktural dan Sila Ke Lima

Teori tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi diklasifikasikan sebagai teori modernisasi. Artikel Walt Whitman Rostow yang dimuat dalam Economics Journal pada Maret 1956 berjudul The Take-Off Into Self-Sustained Growth (Wikipedia: 23 Okt 2010) pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah

pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus.

Dalam strategi pembangunan 25 tahun Indonesia, teori Rostow tersebut oleh rezim ORBA diterapkan yang dikenal dengan teori ekonomi rembesan, yang artinya konsep pembangunan nasional terlebih dulu membangun “kue nasional” dengan harapan daerah-daerah akan kena rembesan/titisan dari pembangunan pemerintah pusat, teori yang diterapkan pemerintah rezim Soeharto ini ternyata “gagal total” paling tidak untuk kasus kawan-kawan yang tinggal dikampung Tempel Kisaran.

Kasus kawan - kawan seperti Riduan dan adiknya si Chairudin waktu kami masih anak-anak kerja bapaknya penarik becak, penulis berangkat kuliah ke Yogyakarta akhir 1973 dan bekerja di Pemprov DKI Jakarta (1981), ternyata mereka berdua (kakak beradik) kerjanya juga sebagai penarik becak artinya mereka berdua tidak mampu merubah profesi bapaknya malah mengikuti jejak bapaknya sebagai penarik becak, demikian juga si Pendi Ritonga dan adiknya si Thamrin kerjanya penarik becak (bapak mereka waktu itu sudah alm.), yang aneh si Pendi Nasution bapaknya polisi artinya kehidupan keluarganya relative lebih baik bila dibanding dengan keluarga kami, tapi karena si Pendi putus sekolah SR sehingga dia tidak bias melanjut ke SMP dan lapangan kerja sulit (terbatas bagi pendidikan SD) sehingga yang mudah atau tersedia lapangan kerja adalah sebagai penarik becak dan disamping itu mereka belum terbiasa hidup bersaing menjadi yang unggul dalam bekerja dan tidak mau berkompetitif di perkotaan (misalnya kota Medan) atau mungkin dalam dirinya sudah tertanam sikap “pasrah” akibat kesusahan hidup sehari-hari, hal ini terlihat dari anaknya si Pendi juga ikut meneruskan profesi bapaknya menjadi penarik becak. Entah apa daya tarik menjadi penarik becak itu penulis pun tidak mengerti

karena kawan-kawan yang lain seperti bang Umar dan bang Poniran, Usman Nasution, Djono, Selamat, Kliwon, Chairudin (adiknya si Usman) dan lain-lain kebanyakan menjadi penarik becak atau menjadi RBT (Rakyat Banting Tulang) yang sekarang namanya tukang Ojek apakah karena menjadi penarik becak modalnya cukup “OTOT” bukannya “OTAK” penulis pun tidak mengerti. Ketidaksetujuan kepada mereka menjadi penarik becak bukan karena penulis menganggap kerja sebagai penarik becak itu pekerjaan “hina” justru sebagai penarik becak merupakan kerja yang mulia dan rezekinya halal, justru yang menjadi permasalahan/ pertanyaan atau ketidaksetujuan penulis adalah mengapa pemerintah tidak bisa meningkatkan status ekonomi kawan-kawan itu ?, artinya REPELITA dan PELITA yang dibangga-banggakan oleh rezim ORBA itu apa realisasinya ? Dan kenapa SOEHARTO diberi gelar bapak Pembangunan kalau pada kenyataannya pembangunan di Indonesia gagal atau dengan pengertian lain jurang antara kaya dan miskin semakin tajam?. Padahal tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan perekonomian rakyat atau dengan pengertian lain mensejahterahkan rakyat !.

Orang tua penulis dalam melihat keberhasilan pembangunan di Indonesia sederhana saja yakni ukurannya adalah “pendidikan” artinya sejauh mana orang tua itu menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya atau dengan kata lain bapak selalu memprioritaskan pendidikan didalam keluarga, sebab dalam anggapannya bila pendidikan berhasil maka akan tau arti kesehatan paling tidak dapat menjaga kesehatannya (orang sehat) dan dengan sekolah yang tinggi memper muda mencari pekerjaan artinya semakin tinggi tingkat pendidikannya maka lapangan kerja tersedia, itulah sebabnya beliau selalu berpesan kepada anak-anaknya: “kamu harus sekolah setinggi-tingginya dan jangan ikuti jejak bapak yang hanya sekolah Hollandsch – Inlandsche School (HIS) kelas 4 dan hanya jadi pedagang kecil

dipasar, kalau kamu hanya menjadi pedagang berarti bapak gagal dalam membina keluarga ini”. Kata-kata itulah yang terus mengiang dikuping dan bahkan menjadi motivasi dalam masa-masa study dan berkarya sebaik mungkin ditempat kerja. Dan terbukti pesan almarhum bapak menjadi motivasi yang kuat bagi kami anak-anaknya karena ternyata dari 6 orang anaknya 3 orang bisa masuk perguruan tinggi (PT) ternama di Indonesia yakni 2 orang di UGM Yogyakarta dan 1 orang USU Medan, bahkan penulis sendiri bisa meraih gelar Doktor (S3).

Itulah sebabnya seandainya bapak dan mama masih hidup mungkin mereka berdualah orang yang paling berbahagia melihat anak-anaknya yang dalam ukuran mereka berhasil dan memenuhi harapan (ekspektasi) mereka, artinya bapak berhasil memutus rantai kemiskinan dengan cara menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya. Padahal pendidikan bapak hanya setingkat SD itupun tidak tamat dan mama tidak pernah mengenyam dan bersentuhan dengan bangku sekolah alias butahuruf, tapi mereka berdua sudah punya “tekad” kalau orang sekarang (zaman now) bilang bapak itu sudah punya “visi” dalam mendidik anak-anaknya yakni: “tumbuh menjadi orang yang berkualitas dan unggul dalam pendidikan”. Agar VISI itu dapat dilaksanakan, Bapak mendidik kami dengan keras dan disiplin yang tinggi, sedangkan modal mama dalam mendukung sukses study kami hanya “doa”, yang disetiap doanya ada namaku dan semua anak-anaknya disebut, dia tidak pernah lupa menyerahkan kami anak-anaknya kepada Tuhan Yesus semoga Tuhan menolong anaknya dalam sekolah. Dan, yang penulis ingat mama kalau kami mau ujian doanya panjang benar dan terkadang membosankan, tapi sekaranglah penulis sadari bahwa hanya itulah yang bisa diperbuat mama kepada kami anak-anaknya, sebab didalam soal tulis menulis dan membaca mama tidak bisa sama sekali (buta huruf). Jadi sesungguhnya alam keluarga itu bukannya pusat individu saja, tapi juga suatu pusat pendidikan sosial. Sebab adanya rasa cinta kasih inilah yang biasanya

menimbulkan rasa bersedia untuk berkorban.

Dari kisah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep trilogy pembangunan yang diagung-agungkan oleh rezim Soeharto (stabilitas, pembangunan dan pemerataan) boleh dikatakan jauh dari harapan masyarakat dikampung kami yang tinggal di Gang Berdikari Kampung Tempel Kisaran, karena selama rezim Soeharto memerintah ternyata tidak dapat merubah nasib kawan-kawan untuk hidup lebih baik dan nyaman serta keluarga yang sejahterah sebagai mana yang diamanatkan oleh alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang terjadi secara sosiologi justru pemerataan kemiskinan atau kemiskinan struktural, kejahatan dan disorganisasi keluarga (Soerjono Soekanto, 2015). Kemiskinan disini sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan kejahatan disini terjadi disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, demikian juga terjadinya disorganisasi keluarga yang merupakan perpecahan keluarga sebagai suatu kelompok kecil dikarenakan anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.

Yang lebih parah lagi kawan-kawan tidak sedikit yang terjerumus jadi pengguna dan penjual narkoba (ganja), melakukan tindakan kriminal dan penjudi yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Itulah sebabnya cerita nasib kawan-kawan yang tidak seberuntung seperti penulis bahwa nasib anak bangsa ini ternyata berkorelasi positif dengan kemampuan pemimpin (Presiden) dalam mengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya kalau pemimpin salah urus yakni terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akibatnya terjadilah ketidakadilan sosial sebagaimana yang diharapkan oleh sila kelima Pancasila,

yakni terjadinya ketimpangan antara sikaya dan simiskin akibat lebih jauh terjadilah kemiskinan struktural, kerusakan moral dan tindakan-tindakan kriminal ditengah masyarakat.

Krisis Ekonomi 1959

Krisis ekonomi tahun 1959 yang menimpa Indonesia berbuntut kepada kehidupan keluarga kami, karena bang Bachtiar yang nomor dua memutuskan untuk melanjutkan studynya kuliah ke Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, pada saat itu orang tua merestui niat dan cita-citanya untuk menjadi sarjana ekonomi, tapi diluar dugaan dan perhitungan orang tua saat kapal laut berangkat berlayar meninggalkan Pelabuhan Belawan menuju Tanjung Priok Jakarta, tiba-tiba ditengah pelayaran ada pengumuman dari pemerintah bahwa terjadi pemotongan nilai rupiah (*sanering*), yakni dengan dikeluarkannya UU No.2 Prp Thn 1959 tanggal 25 Agustus 1959, untuk menurunkan nilai uang Rp. 500 (uang bergambar macan) dan uang Rp. 1.000 (uang bergambar gajah) menjadi Rp. 50 dan Rp.100. Sejak saat itu keuangan keluarga kami mulai mengalami kegoncangan bahkan usaha orang tua berubah dari semula berjualan beras menjadi berjualan ember kaleng, piring pecah belah dan lain-lain.

Perubahan ini dilakukan orang tua karena faktor biaya uang sekolah kami anak-anaknya, bang Afner kuliah di Fak.MIFA USU dan bang Sorta sekolah di Medan, kakak nomor empat Manginar dan bang Juntar kami bersekolah di Kisaran sehingga orang tua kami sangat membutuhkan biaya sekolah, disamping itu faktor usia bapak juga ikut mepengaruhi, artinya tidak ada lagi yang membantu orang tua untuk berjualan beras, karena berjualan beras dimasa itu membutuhkan tenaga fisik yang kuat sebab dagangan beras yang bergoni/berkarung itu dari Kisaran harus dibawa kekobun/pondok (tempat tinggal pekerja karet) naik sepeda untuk dijual.

Penulis tidak tau mengapa orangtua kami punya tekad kuat agar anak-anaknya bisa bersekolah dan mencapai cita-citanya

dan jangan sampai putus sekolah, artinya orangtua kami punya keyakinan bahwa rantai kemiskinan dan kebodohan harus diputus melalui pendidikan, maka mama (sebagai ibu rumah tangga) berinisiatif, berusaha melakukan penghematan pengeluaran keuangan rumah tangga, seperti biaya dapur untuk memasak mama yang semula “membeli” kayu bakar diganti dengan “mencari” kayu bakar yang dicari dari kebun karet (pohon rambung).

Dalam mencari kayu di kebun karet (rambung) tidaklah seperti yang dibayangkan orang yakni tinggal tebang pohonnya lalu bawa pulang kerumah kayunya, ohhh... tidak arena kayu (kebun karet) itu merupakan milik perkebunan PT. HAPAM artinya milik perusahaan swasta yang resmi, jadi kalau kami mau mencari kayu harus dengan cara sembunyi-sembunyi atau main kucing-kucingan dengan centeng sebab apabila ketangkap centeng kebon (pengawas) habislah kami dan sudah dapat dipastikan kami akan dihukum berupa denda. Untuk itulah kalau kami mau mencari kayu biasanya pergi jauh-jauh ketengah kebun rambung dengan maksud agar tidak dilihat centeng kebon, dan terkadang kami kalau mau mencari kayu pura-pura mengangon kambing biar centeng tidak tau kalau kami akan menebang pohon karet untuk dibawa pulang, tapi suatu kali pada saat kami sedang mengikat kayu untuk dipanggul, tiba-tiba centeng menangkap kami lalu kami dibawa ke kantor administrasi kebun namanya kantor “podok kucingan” dan kayu yang telah kami ambil itu disuruh untuk dikembalikan, golok/parang yang kami gunakan untuk memotong kayu disita.

Kapok dengan kejadian penangkapan centeng kebon itu agar tidak terulang lagi, mama memutuskan mengganti kayu bakar tidak lagi menggunakan kayu pohon rambung (karet) diganti dengan kulit kayu. Kulit kayu bakar dicari di stasiun kereta api (DSM) yang letaknya kira-kira 5 km dari rumah kami. Distasiun KA ini kami hanya untuk mencari kulit kayu pembakar kereta api,

karena masa itu KA dihidupkan dengan kayu bakar (api) tidak dengan kekuatan listrik seperti sekarang ini. Biasanya kami mencari kayu kulit bakar ini pada waktu pagi hari sebelum KA jalan, karena kayu-kayu yang akan dimasukkan dalam dok KA itulah yang kami kupas/kuliti lalu kulitnya itu kami masukkan dalam karung goni untuk dibawa pulang. Begitulah rutin kerja penulis membantu mama mencari kulit kayu bakar distasiun KA.

Suatu hari mama lagi ayik kerja mencongkel kulit kayu di DOK stasiun KA, tidak jauh dari tempat itu ada gundukan berbentuk gunung lalu tanpa sepengetahuan mama penulis pergi kegundukan itu bermain dan dengan berlari meloncat keatasnya waduh, waduh.... panas, panas dan menjerit-jerit kedua kaki mulai dari pangkal paha sampai jari-jari kaki merah dan lecet, rupanya gundukan yang penulis loncat itu merupakan sisa bara api yang semalam dibuang dari kepala gerbong KA.

Gara-gara kecelakaan itu yakni terbakarnya kaki penulis, mamapun tidak mau lagi cari kulit kayu distasiun KA, lalu mama mengganti kayu bakar dirumah dengan bambu yang merupakan sisa-sisa dan bekas keranjang buah jeruk manis dan keranjang sayur kol. Demi, cita-cita kami anak-anaknya mama tidak mau menyerah kepada keadaan, mama rela berkorban (tidak malu) setiap sore pulang dari pajak (kios) mama membawa bekas keranjang bambu buah jeruk manis maupun keranjang kol dari pedagang buah orang batak karo, dia angkat diatas kepalanya keranjang-keranjang itu seraya tangannya memegang sisir pisang mas untuk penulis. Diujung gang rumah setiap sore, penulis sudah menunggu mama pulang dari pajak/kios dengan harapan bisa digendongnya seraya dapat pisang mas yang dibawanya.

Kesulitan ekonomi akibat krisis moneter (sanering) yang menimpa Negara ini berdampak luas dan memicu kemiskinan keluarga, itulah yang menyebabkan kelak dikemudian hari orang tua kawan-kawan banyak yang terjebak dalam permainan politik yang dimainkan oleh PKI yakni dengan memberikan bantuan

cangkul/pacul untuk bertani lalu bergabung dalam organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi sayap PKI.

Pemberontakan PKI Terhadap Pancasila

Tahun 1965 tepatnya tanggal 30 september, saat meletusnya pemberontakan G 30 S / PKI penulis duduk di kls IV SR/SD, semula penulis tidak mengerti apa itu gerakan 30 September mungkin karena usia yang masih muda (anak-anak). Suatu ketika habis bermain layang-layang dengan kawan-kawan penulis pulang kerumah, entah apa yang terjadi dirumah banyak orang berkumpul sembari mendengar radio karena memang dilingkungan tetangga hanya kami yang punya radio. Dipimpin Pak. Hasan Zaini guru sekolah yang kebetulan mengkontrak rumah kami yang disebelah rumah, samar-samar terdengar pidato orang Jakarta yang mengatakan bahwa telah terjadi pemberontakan dan penculikan jenderal-jenderal, waktu itu tidak terpikir dan tidak tau kenapa ada kalimat yang mengatakan bahwa pemberontakan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang penulis ingat PKI di Kisaran itu kalau ada upacara memperingati hari kemerdekaan RI dan hari nasional, partai ini dalam setiap pawai keliling kota Kisaran memanggul baliho palu arit warna merah yang besar dan digotong oleh anggota – anggotanya. Demikian juga, pada saat upacara nasional dilapangan bola Polri tokoh-tokoh PKI jago berpidato bias berjam-jam sehingga disebut singa mimbar dimasa itu. Apabila tokoh-tokoh PKI berpidato terkadang penulis mau mendengarkannya sebab mereka pintar mempengaruhi pendengarnya dan mereka menggunakan teori komunikasi persuasive, yakni komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku pendengarnya sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si tokoh.

PKI merupakan partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan

RRT. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Jadi PKI tidak hanya mempunyai basis di ORMAS tapi sudah merambah disegala kehidupan organisasi massa dan birokrasi pada waktu itu.

Dirumah kami ada seorang anak muda yang indekost dan termasuk masih ada hubungan keluarga, namanya Bachtiar Tambunan penulis memanggilnya abang. Dialah salah satu tokoh ormas pemuda dari unsur Kristen yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Sesudah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI tepatnya akhir tahun 1965 dan tahun 1966. Di Kisaran tiada hari tanpa demo yang digerakkan oleh pelajar – pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI) yang tokohnya antara lain Iwan Mehta dan Amran Nasution. Sedangkan pemuda-pemudi bergabung dalam ormas pemuda seperti Pemuda Pancasila yang pentolannya antara lain Kamaludin, Azis Nasution ; Pemuda Marhaen pentolannya antara lain Samin ; Pemuda Ansor pentolannya antara lain Hamid ; Pemuda Kristen Gamki pentolannya antara lain Bactiar Tambunan, PP Muhammadiyah, Pemuda Ktholik, dll yang digerakkan dan dikordinir oleh tentara (seksi I) Kodim.

Demo-demo yang dilakukan oleh para pelajar yang tergabung dalam KAPPI menarik, sebab dengan gelora kepemudaannya demonya terkesan sporadis dan tidak fokus sebab Ruko (tempat berdagang) milik pedagang cina yang dirazia dengan dalih mau memeriksa apakah ada penimbunan beras dan juga demonya melebar kepada ibu-ibu yang dianggap sebagai GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) diperiksa bahkan sampai kebabalasan bagian terlarang ibu-ibu tersebut diperiksa dengan alasan mencari tato bergambar palu arit disekitar alat vitalnya.

Dan penulis masih ingat gara-gara masalah itulah kedua pentolan KAPPI tersebut diadili dan dijatuhkan hukuman meringkuk dipenjara.

Lain lagi aksi-aksi yang dilakukan ormas pemuda ini mereka terkesan sebagai alatnya ABRI untuk mengganyang atau menghabisi orang-orang yang dituduh PKI. Bang Bactiar setiap malam sekitar jam 20.00 wib keluar rumah untuk bergabung dengan teman-temannya ormas pemuda untuk apel dikantor tentara (kodim) dan lanjut melakukan tugas mengeksekusi orang-orang yang dituduh terlibat PKI walaupun yang dituduh PKI itu sampai saat ini tidak pernah diadili didepan pengadilan.

Biasanya bang Bactiar itu pulang kerumah antara jam 05.00 - 06.00 setelah melakukan pembantaian, dan pernah suatu ketika penulis mau berolah-raga pagi ketemu dengan bang Bactiar, penulis lihat baju putihnya ada bercak darah lalu penulis tanya koq ada darah dibaju abang?, Spontan dia jawab baru menghabisi orang PKI, apakah abang tidak takut?, lalu bang Bactiar mengeluarkan dari kantong celananya bungkusan kecil warna putih, lalu penulis tanya apa isinya? dia jawab bahwa isinya “?????” dan yang semalam itu adalah “?????” orang yang kami bunuh itu. Supaya apa abang bungkus dengan kain putih dan dibawa kerumah?, dia jawab biar tidak terbawa mimpi.

Sejak diadakannya pemberantasan terhadap PKI melalui pembunuhan baik massal maupun perorangan yang dituduh PKI, berdampak terhadap kawan-kawan sepermainan karena tanpa dinyana bapak kawan penulis ada beberapa orang menghilang setelah dijemput pemuda dari rumahnya. Padahal sepengetahuan penulis bapaknya hanya pekerja sebagai buruh/kuli angkat barang penompang di stasiun bus, lalu dituduh sebagai anggota SBKI (Serikat Buruh Kerja Indonesia) yang berafiliasi kepada PKI. Ada lagi yang menyedihkan bapak kawan kami sebagai kepala Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan dia adalah sintua (pengetua gereja) di gereja HKBP, hilang setelah dijemput rombongan pemuda pada malam hari. Pernah sewaktu

kami lagi latihan liturgi natal di gereja HKBP Jln. Singamangaraja, tiba-tiba terdengar suara tangis histeris menjerit-jerit dari rumah depan gereja, seketika itu juga kami anak-anak berlari menuju rumah yang ada tangisnya itu, kepingin tau apa yang terjadi?. Ternyata, bapaknya (Manurung) menjadi korban pembantaian dengan dalih terlibat PKI tanpa pengadilan.

Bapak kawan kami yang hilang setelah dijemput pemuda yang bekerja sebagai kuli angkut ternyata korban persaingan pimpinan (Mandor) karena bapak teman kami ini menjadi mandor jadi dia harus disingkirkan melalui cara fitnah tanpa fitnah tidak ada yang berani kepadanya karena memang badannya kekar dan kumisnya tebal seperti Pak. Raden. Demikian juga bapak kawan kami yang kepala sekolah SMEP itu ternyata merupakan korban dari ambisi perebutan jabatan kepala sekolah, sebab secara logika dimana mungkin seorang penetua (sintua) gereja terlibat dalam partai komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan?.

Untuk memahami tentang komunis, agar tidak terjebak dalam politik praktis kaum kapitalis, perlu dipahami Istilah “kiri”. Istilah kiri acapkali digambarkan dan diidentikan dengan komunisme, radikal, berbahaya, bahkan kejam. Padahal jika kita menelisik kembali sejarahnya, istilah itu telah ada sejak akhir abad ke-18 dan tidak sedikitpun kata itu mengarah pada apa yang selama ini kita ketahui ; komunis, kejam, radikal, berbahaya, dll. Istilah ini (kiri) lahir dan muncul bukan tanpa asal-usul, sebab-musabab, dan latar belakang. Maka sangat disayangkan jika ada anggapan dan dengan nada yang menyudutkan, tetapi sesungguhnya tidak mengerti seluk-beluk istilah kiri itu sendiri. Juga sangat disayangkan sekali jika ada seorang atau sekelompok orang yang dengan sinis tentang bahayanya istilah kiri itu, tetapi nihil pengetahuan dan sejarah tentang istilah kiri yang digembar-gemborkan itu sendiri. Akan tetapi lebih sangat disayangkan sekali jika ada orang yang menelan mentah-mentah,

terprovokasi, dan tanpa sikap kritis mempercayai segala sesuatu atau apapun yang disampaikan oleh orang atau sekelompok orang, baik lisan maupun tertulis, termasuk tentang sejarah bangsa dan yang berbau kiri itu, yang notabene “tabu” dibicarakan dan didiskusikan di negara yang katanya menjunjung demokrasi ini. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seorang individu yang ahistoris.

Istilah “kiri” muncul dilatarbelakangi dengan meletusnya Revolusi Perancis, pada saat itu semboyan-semboyan seperti kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*) dan persaudaraan (*fraternite*) cukup populer dan menjadi daya tarik massa revolusioner, kaum buruh dan tani, serta kaum borjuis. Mereka bersatu menggalang kekuatan untuk meruntuhkan pemerintahan feodalistis. Akan tetapi ternyata persatuan mereka hanya pada saat berjuang saja. Ketika mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan feodal, dan kaum borjuis berhasil mengambil alih kekuasaan, rakyat jelata tidak memperoleh kekuasaan apa-apa. Feodalisme hanya digantikan dengan Borjuisme, yakni kekuatan politik yang didominasi kepentingan kaum lapisan ekonomi atas. Rakyat hanya memperoleh kebebasan, sedangkan persamaan dan persaudaraan hanya menjadi slogan semata.

Dengan kenyataan yang seperti itu, masih ada upaya untuk memeperjuangkan hak-hak rakyat dan menentang borjuisme yang lupa daratan, yakni lewat parlemen. Perjuangan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mewakili rakyat bawah. Sekumpulan orang itu duduk mengelompok di sayap kiri ruangan. Oleh karena itu, mereka disebut “kaum kiri”. Sedangkan para pendukung borjuisme duduk mengelompok di sebelah kanan berhadap-hadapan dengan kaum kiri. Dalam pertemuan itu, kaum kiri mengemukakan pendapat ; meskipun kaum bawah dilibatkan dalam pemilihan anggota parlemen, tetapi mereka tetap tidak bisa memenangkan calon-calon dari golongan mereka, karena selalu kaum borjuislah yang mempunyai modal untuk berkampanye dalam usaha memenangkan calon-calonnya,

sedangkan kaum bawah selalu kalah karena tak cukup modal untuk upaya pemenangan calon-calonnya. Mereka benar-benar kekurangan alat-alat propaganda (ruang rapat, brosur, koran, dll) yang memang mahal harganya. Tak pelak, pada saat itu memang kaum borjuislah yang bisa memegang kendali ekonomi. Pendek kata, hak politik rakyat kecil dan buruh terjebak oleh ilusi demokrasi yang diciptakan kaum borjuis.

Singkatnya antara komunis dan kaum kiri sesungguhnya dari sejarah keberadaannya dan perjuangannya ada kesamaan yakni sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat bawah, hanya komunis di Indonesia karena sudah menjadi “partai” yang disebut PKI sehingga perjuangannya lebih ditekankan kepada politik yakni merebut kekuasaan demi eksistensinya dalam sistim politik Indonesia.

BAGIAN KEDUA: Kepemimpinan Dan Konflik

“Kepemimpinan yang engkau miliki itu bukan digunakan untuk mengurus kepentingan dirimu sendiri, kelompok mu melainkan gunakanlah untuk memecahkan, dan menjawab tantangan, masalah yang dihadapi oleh orang banyak, masyarakat, bangsa dan negara mu sendiri.”

Bab 2

MASA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Terbangunnya Sikap Kritis

Sekolah penulis di SMP Kristen Methodis Kisaran tahun 1968 – 1970. Alasan memilih sekolah di SMP Methodis hanya karena TIGA hal, yang pertama dekat dengan rumah sekitar 100 meter, yang kedua tidak punya izazah Lulus SR/SD dan yang ketiga sekolah SMP Methodis baru berdiri. Dengan modal nekat dan motivasi yang kuat penulis harus lanjut ke jenjang sekolah menengah, tanpa didampingi bapak/mama serta abang dan kakak, penulis mendaftar dan mengurus sendiri syarat-syarat administrasi untuk keperluan masuk sekolah, beruntung bisa diterima di SMP Methodis karena disinilah penulis dididik dengan disiplin yang tinggi dan pendidikan agama (Kristen) yang baik, setiap pagi diadakan upacara kami berbaris di halaman sekolah dan mau masuk kelas diawali dengan bernyanyi rohani “Laskar Kristen” dan berdoa “bapak kami”. Dan apabila mau pulang sekolah (dikelas) kami bernyanyi rohani dan berdoa yang dipimpin oleh siswa secara bergantian.

Tanpa terasa sikap dan prilaku penulis banyak berubah bila dibanding masa sekolah Rakyat (SD) mungkin dipengaruhi pendidikan selama di SMP Methodis, artinya pemahaman tentang Kristen yakni “melayani bukan dilayani” dogma itu menjadi motto dalam hidup penulis dan kelak motto itu pada tahun 2015 menjadi cover majalah HKBP yang memuat wawancara sebagai dekan Fisipol UKI dalam melayani

mahasiswa.

Aneh, waktu di sekolah SR/SD penulis paling pemalu dan takut kepada pelajaran kesenian apalagi disuruh duduk satu bangku dengan anak perempuan penulis menangis sedangkan kalau disuruh nyanyi didepan kelas tidak berani dan lebih baik distraf/dihukum berdiri dikelas daripada bernyanyi, tapi begitu masuk SMP Methodis ditunjuk menjadi ketua kelas siap dan kalau disuruh nyanyi didepan kelas siap artinya, tidak ada lagi rasa takut dan malu terhadap teman-teman.

Tiga tahun bersekolah di SMP Methodis penulis berturut-turut terpilih menjadi ketua kelas dan tahun ketiga terpilih menjadi ketua OSIS. Dengan status yang banyak terlibat dalam kehidupan organisasi sekolah itu mau tidak mau banyak bersentuhan dengan guru - guru artinya, penulis dituntut harus bisa melayani keperluan teman-teman dan guru serta berani menunjukkan kepada guru hal-hal yang kurang sepatasnya/ sepatutnya dilakukan oleh guru dikelas. Itulah sebabnya apabila guru bertindak tidak sepatasnya kepada siswa penulis berani melaporkannya kepada kepala sekolah (direktur panggilannya masa itu). Demikian juga apabila sekolah mau menaikkan uang sekolah penulis paling terdepan menanyakan rencana kenaikan uang sekolah tersebut kepada kepala sekolah yang terkadang ada yang berhasil artinya perjuangan untuk tidak menaikkan uang sekolah berhasil. Pernah ada kasus pemukulan terhadap siswa oleh guru Sonar Siagian, guru ilmu ukur (guru tidak punya ijazah guru hanya tamat SMA) terhadap teman sekelas namanya Pardamean Hutagaol saat upacara pagi mau masuk kelas dilapangan sekolah hanya gara-gara berdirinya tidak dalam sikap sempurna, pak Sonar berlari menuju Pardamean lalu menampar dan menendang perutnya sampai terjatuh dan tersungkur (pingsan). Melihat kejadian itu penulis tidak tinggal diam langsung menghadap direktur ibu Saragih keruangannya dan menuntut agar pak Sonar diambil tindakan, ternyata tuntutan tersebut didengar dan pak Sonar dikenakan sanksi disamping

tidak dibolehkan memimpin upacara sekolah, pak Sonar kena surat peringatan (SP). Seandainya waktu itu sudah ada lembaga komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) penulis yakin pak Sonar akan dituntut dan diajukan kepengadilan dengan tuntutan perlakuan kekerasan terhadap anak dibawa umur dan pastilah pak Sonar masuk penjara.

Pernah suatu ketika pengurus GSKI (Gerakan Siswa Kristen Indonesia) cabang Kisaran, datang ke sekolah kami mencari penulis untuk bertemu dan sekalian memperkenalkan apa itu organisasi GSKI, dan singkatnya mereka mengajak agar masuk menjadi anggota GSKI, tawaran mereka diterima dan jadilah penulis kader GSKI. Dan mulai saat itulah penulis bersentuhan dengan dunia organisasi (politik) yang sedikit banyak mempengaruhi sikap dan perilaku kekritisan terhadap penguasa. Kelak pengalaman menjadi anggota GSKI itu mendorong penulis masuk GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) cabang Yogyakarta saat study di Fakultas SOSPOL UGM.

Pengalaman berorganisasi itu ternyata mempengaruhi sikap penulis yang “kritis” terhadap sesuatu yang kurang pas dalam keseharian sehingga terkadang membuat teman-teman ada yang salah pengertian apabila mendapat kritikan. Tapi dipihak lain penulis juga adalah orang yang sabar dan mau mendengar bahkan sering disebut sebagai pendengar yang baik. Itulah sebabnya terkadang dalam mengamati situasi akhir-akhir ini dalam kehidupan sosial dan perpolitikan Indonesia terjadi benturan kultur yakni luntarnya etika untuk saling menghormati dan budaya mau bersabar dan mendengar orang lain berbicara, sehingga yang diperlihatkan oleh elit-elit politik dalam diskusi dan debat-debat politik diberbagai media terkesan tidak mendidik masyarakat khususnya generasi milenial (zaman now) dan terkadang sikap dan perilaku elit itu mejadi pemicu generasi milenial matau turut mengatur ketertiban dan keamanan njadi apolitis.

Di SMP Methodis anak didik menghormati kemerdekaan

orang lain atau turut mengatur ketertiban dan keamanan umum dan turut menanggung juga tertib damainya keadaan (sosial). Demikian juga masalah "tatakrama" di SMP Methodis mengajarkan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan: Pendidikan budi pekerti, mengajarkan keharusan manusia yang cerdas dan berbudi, untuk dapat memerintah dirinya sendiri, menahan hawa nafsunya, serta pula menetapkan garis tata tertib untuk dirinya sendiri (Najelaa Sihab. 2016). Sangat ditanamkan kepada siswa, sehingga siswa dalam berbicara dengan orang lain terbiasa mendengar lawan bicaranya dulu baru memberikan tanggapan, tidak seperti yang sekarang terjadi didepan media elektronik (TV) dapat dilihat para politisi dan bahkan kalangan kampus berbicara saling serobot terkesan tidak ada lagi rasa saling menghormati diantara elit. Sehingga timbul pertanyaan apakah berbicara saling serobot itu dikarenakan tidak adanya lagi pendidikan "budi pekerti" dibangku sekolah seperti di era tahun 60 an ? Atau karena pendidikan agama (Iman dan Taqwa) lebih ditekankan kepada penghayatan agar menjadi manusia beriman dan Taqwa daripada pengetahuan praktis ? Dan, sedihnya ada anggapan masyarakat bahwa pendidikan agama disekolah diadakan/diarahkan untuk menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi diantara siswa atau kenakalan pelajar/siswa, jadi terkesan pendidikan agama sebagai pemadam kebakaran. Padahal menurut ilmu pendidikan, sekolah itu diadakan untuk mengembangkan pengetahuan dan kepribadian sianak (peserta didik), artinya sekolah itu harus steril/bebas dari doktrin agama, agama hanya dipelajari sebagai pengetahuan bukan sebagai dogma, pengajaran dogma diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang khusus belajar agama (misalnya Sekolah Pesantren dan Sekolah Minggu bagi Kristen). Jadi maksud dan tujuan sekolah ialah untuk membangkitkan dan mengembangkan sikap hidup demokratis. Untuk itu peran guru sangat besar artinya, seorang guru harus bisa memerdekakan/ membebaskan seorang anak. Merdeka, disini adalah suatu kemerdekaan dari kebodohan, bebas dari ketakutan dan yang utama bebas untuk berekspresi bebas

melaksanakan keyakinannya tanpa merasa dibebani hal-hal yang tidak ada kaitannya tersebut.

Oleh karena itu sekolah harus memberikan sebagai bahan pelajaran pengalaman – pengalaman yang berfaedah demi hari depan anak-anak didik dan sekaligus pengalaman itu merupakan hal yang dapat dialami anak didik pada masa sekarang ini.

Sedangkan perguruan tinggi (kampus) merupakan kegiatan pengembangan “sains dan teknologi”. Sebab terjadi paradoks pada sistim pendidikan sekarang ini dimana sekolah yang semula khusus mendidik bidang agama dirubah dan dikembangkan menjadi sekolah umum dan bahkan statusnya menjadi negeri, contoh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dirubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), dan demikian juga Sekolah Madrasah Aliyah (MA) disetarakan dengan SMA, sebaliknya sekolah negeri diarahkan kepada penekanan bidang agama bahkan ditiap sekolah diharuskan membangun rumah ibadah (masjid), padahal masalah agama itu merupakan urusan pribadi (*privat*) bukan urusan publik. Hal itu memang sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan urusan daerah. Jadi kalau diikuti isi UU Otonomi tersebut sesungguhnya pembangunan rumah ibadah disekolah itu tidak boleh menggunakan/memakai anggaran daerah (APBD). Anehnya lagi, guru dan dosen di sekolah / perguruan tinggi agama tersebut menginduk ke “kementrian agama” bukan kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan atau kementrian Ristek dan Perguruan Tinggi.

Kekacauan sistim pendidikan tersebut ternyata pemicunya karena pasal 3 UU 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adanya kalimat “beriman dan bertakwa

kepada Tuhan” tersebut sesungguhnya mengaburkan arti dari tujuan Pendidikan itu sendiri dan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebab tujuan negara itu antara lain “mencerdaskan bangsa”, bukan membentuk manusia yang “beriman dan bertaqwa” kepada Tuhan Yang Maha ESA, dengan pengertian lain urusan meningkatkan “iman” dan “taqwa” merupakan urusan agama bukan urusan Pendidikan.

Akibatnya fungsi sekolah bukan lagi membebaskan peserta didik dari kebodohan **sehingga** berdampak dan berakibat kepada tata krama / **budi pekerti** yang hilang dilingkungan elit politik Indonesia dengan dalih kebebasan dan demokrasi itu berpotensi memunculkan konflik ditengah masyarakat, sebab disadari atau tidak pernyataan-pernyataan elit politik itu sering kebablasan sampai menyinggung ke masalah SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), terutama masalah “*intoleransi*” yang selama ini kita rawat dan jaga. Akibat adanya klaim-klaim sepihak terhadap agama tertentu bisa memunculkan konflik yang bersifat latent dan ini yang kita tidak harapkan terjadi di bumi Indonesia.

Oleh karena itu, pembenahan sistem pendidikan di Indonesia bisa dimulai dari hal-hal sebagai berikut (1) Sederhanakan kurikulum nasional sesuai usianya, dan muatannya harus bersifat mendasar, humanis, dan kultural ; (2) Ajarkan kembali pelajaran Pancasila, sejarah, budi pekerti, agama dalam cakupan rasional dan kontekstual, kesenian dan kebudayaan, khususnya bagi murid SD, SMP dan SMA ; (3) Bebaskan sekolah dan kampus dari ancaman dogma-dogma radikalisme agama ; (4) Bebaskan sekolah dan kampus dari perilaku deskriminatif dari segala bentuk parameter SARA ; (5) Perbaiki mekanisme dan sistem evaluasi pendidikan nasional secara berkala dan rutin.

Negara harus hadir dalam menjamin kualitas pendidikan nasional dan sekolah harus imun dari segala bentuk penyusupan faham-faham ideologi sesat yang dilakukan oleh guru-guru dan alumni yang ujung-ujungnya menggoyahkan Pancasila, keutuhan

NKRI dan merusak Kebhinneka Indonesia.

Radikalisme di sekolah dan kampus bukanlah isapan jempol, namun fakta yang menghadang perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pendidikan nasional dalam ancaman serius dan harus dibenahi secara menyeluruh.

Konflik Sara

Tahun 1968, tahun pertama bersekolah di SMP Methodis penulis menyaksikan rombongan pengungsi yang terdiri dari orang tua, ibu-ibu yang menggendong bayi dan anak-anak kecil dari daerah Kecamatan Airjoman Kab. Asahan, datang mengungsi dan menginap di gereja Methodis dan sekolah kami. Ternyata mereka mengungsi karena didesanya mereka diusir dan gereja mereka dibakar hanya karena mereka beragama Kristen.

Selama ini penulis anggap bahwa konflik itu terjadi karena adanya pengaruh anasir-anasir/orang-orang PKI yang saat itu (1965) existensinya dihabisi oleh rezim ORBA. Tapi, tahun berganti tahun dan kejadian itu sudah berjalan 51 tahun dan Indonesi sudah merdeka 74 tahun dan kini Indonesia memasuki era globalisasi yang ditandai dengan “IT”, dan pemerintahan rezim ORBA sudah berganti kerezim Reformasi, ternyata masalah penutupan rumah ibadah (gereja) masih berlangsung dan pembangunan rumah ibadah (gereja) prosesnya sangat sulit dan cenderung tidak diberi ijin, itu artinya masih ada pihak-pihak yang belum menghayati akan arti sesungguhnya “Bhinneka Tunggal Ika”. Apabila situasi seperti itu artinya, konflik yang bersifat horizontal tidak dapat segera dicegah dan diatasi oleh Pemerintah dengan membangun sikap toleransi dan kesadaran masyarakat bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai “ideologi pancasila”, maka cepat atau lambat dapat diduga Indonesia sebagai suatu “Nation” hanya tinggal kenangan.

Indonesia jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Maria Audrey Lukito seorang anak gadis belia yang berjiwa “Patriot” dalam bukunya (2011) mengatakan: “sesungguhnya,

saya sadar bahwa masalah di Indonesia sangat kompleks dan banyak sekali jumlahnya; banyak pula orang yang menasehati saya bahwa menulis buku ini akan sia-sia belaka. Namun, saya tahu bahwa masa depan bangsa kita terletak ditangan rakyatnya, terutama generasi muda rakyat Indonesia. Saya tidak ingin di masa depan ada banyak tunas bangsa yang mengalami berbagai macam kekecewaan seperti saya, yang cita-cita luhur mereka untuk Negara tidak mungkin tercapai akibat system korupsi dan keserakahan yang melumpuhkan keluhuran budi manusia. Sayapun yakin bahwa langkah pertama untuk membenahi system yang rusak ini adalah dengan membenahi hati dan pikiran kita. Bukan dengan mengganti UU ataupun mengganti menteri dan presiden, melainkan dengan menelaah dan memperbaiki cara berfikir kita masing-masing. Jika mentalitas kita mampu diperbaiki, niscaya prilaku akan mengikuti, dan kita mampu melihat perubahan kearah yang lebih baik dinegara yang tercinta”.

Untuk itulah partai-politik yang ada di Republik ini sudah saatnya melaksanakan fungsi sosialisasinya dan kontrolnya tidak lagi berpangku tangan dan bahkan bersembunyi dibalik bungkus agama sehingga masyarakat yang bhinneka yang merupakan lalang-lalang kering akan muda terbakar. Demikian juga tokoh masyarakat (Toma) dan tokoh agama (Toga) haruslah dapat meredam dan jangan ikut-ikutan memanaskan situasi masyarakat yang membuat chaos, jadilah “ULAMA, ROHANIAWAN dan NEGARAWAN” !!!.

Sikap pemerintah juga harus tegas dan konsisten terhadap ormas yang mencoba menimbulkan intoleransi seperti penyalahgunaan rumah ibadah untuk kegiatan politik, dan mengkafir-kafirkan pihak yang tidak sepaham dengan kelompok ormasnya, tindakan persekusi oleh ormas kepada orang yang berbedah paham. Pemerintah tidak lagi bertindak setelah korban bejatuhan baru aktif. Pemerintah tidak bersikap standart ganda terhadap ormas yang dikategorikan radikal, artinya jangan lagi

ada kata “himbauan” terhadap ormas yang berbuat brutal terhadap rumah ibadah dan tempat-tempat bisnis pariwisata. Seperti kasus ijin rumah ibadah.... Di Bogor yang jelas-jelas ijinnya sudah ada dan ditingkat peradilan yang tertinggi MA sudah dimenangkan tapi sampai hari ini pembangunan tidak boleh dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan dan menimbulkan keanehan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sikap Presiden SBY yang seolah-olah menganggap bahwa urusan agama (rumah ibadah) merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga masalahnya oleh SBY dilempar ke Pemkot Bogor, padahal dalam UU otonomi daerah sudah ditegaskan bahwa masalah agama adalah urusan pemerintah pusat. Demikian juga walikota Bogor tidak mau melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan tertinggi di Indonesia yakni MA dengan alasan yang tidak jelas. Jadi sesungguhnya dalam kasus ijin pembangunan gereja Yasmin Bogor pemerintah pusat (SBY) termasuk yang melanggar konstitusi. Sehingga penulis berharap dipemerintahan Jokowi priode yang kedua pembangunan gereja Yasmin dapat diwujudkan. Hal yang sama juga terjadi ditempat usaha pariwisata dimanasiak pemerintah tidak tegas terhadap tindakan sewenang-wenang ormas, seperti contoh setiap memasuki bulan suci ramadhan justru menteri agama yang menghimbau kepada ormas agar tidak melakukan *Sweping* ke tempat-tempat rumah makan, dan hiburan-hiburan (bisnis pariwisata), aneh tapi nyata pemerintah (eksekutif) koq malah menghimbau kepada ormas yang akan melakukan tindakan diluar hukum ?. Kan, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang penertiban umum, artinya kewenangan penertiban itu ada pada aparat pemerintah bukan ditangan ormas. Jadi apabila ormas melakukan *sweping*, maka pemerintah sesuai dengan otoritas yang dimiliki segera bertindak dan mengambil sanksi hukum, hal ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan Negara yang aman. Dan hal ini juga dimaksudkan dalam rangka menunjang dunia

bisnis pariwisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Destinasi pariwisata membutuhkan kondisi rasa aman, dan tertib, sebagaimana motto pariwisata “sapta pesona” yakni aman, tertib, bersih, indah, nyaman, sejuk dan penuh kenangan.

Demikian juga untuk tidak terjadinya konflik yang bersifat SARA kepada orang-orang berpendidikan tinggi S1, S2, S3 dan bahkan yang bergelar Profesor, hargailah gelar akademisi keserjanaan yang engkau sandang, jangan jadi partisan tapi jadilah “cendikiawan”, yang bisa menarik perbedaan dalam persamaan dan bisa menarik persamaan dalam perbedaan. Ikutlah merawat dan merajut tenun kebangsaan Indonesia.

BAGIAN KETIGA:
Pendidikan Yang Membebaskan

*”Pendidikan itu ditujukan bukan hanya
untuk meningkatkan Iman dan Taqwa
tapi tujuan Pendidikan adalah membebaskan
kebodohan, ketertinggalan dan memerdekaan peserta
didik itu sendiri.”*

Bab 3

MASA SEKOLAH MENEGAH ATAS

SMA Ku Candra Dimuka

SMA Negeri No. 1 Kisaran sering disingkat SMANSAKIS, SMA Negeri inilah yang pertama ada dikota Kisaran sehingga orang-orang yang bersekolah di SMA ini bergengsi dan punya kebanggaan tersendiri apabila bisa bersekolah di SMANSA, jadi disamping karena hanya satu-satunya SMA Negeri dan guru-gurunya berkualitas baik dan punya dedikasi yang tinggi, sehingga kami sebagai siswa dididik dengan disiplin yang tinggi, bagi siswa laki-laki tidak boleh rambutnya gondrong, rambut harus diatas kuping dan cepak, sedangkan bagi siswa perempuan roknya tidak boleh diatas lutut dan setiap hari kami mempunyai tugas rumah (PR). Untuk berjalannya proses belajar – mengajar dengan baik pihak sekolah menugaskan guru pembina yang disebut dengan Counseling pada waktu itu yang jadi guru Pembina adalah ibu CO. Panjaitan, ibu ini oleh siswa lebih ditakuti daripada guru yang lain, karena sebagai guru pembina beliau diberi otoritas untuk membina siswa, itulah sebabnya guru Pembina bisa bertindak tegas dan memberi hukuman kepada siswa baik laki-laki maupun perempuan kalau bersalah dihukum sesuai dengan derajat kesalahannya misalnya laki-laki terdapat rambutnya gondrong, ibu CO langsung menggunting demikian juga apabila siswa ketahuan tidak pakai sepatu karet yang berwarna putih siswa disuruh keluar dari kelas dan dijemur dihalaman sekolah.

SMANSA sebagai candra dimuka, disini kami dididik dengan disiplin tinggi dan budi pekerti yang baik sehingga kami sebagai alumninya sudah tertanam dan terbangun jiwa kebersamaan peduli/care terhadap sesama teman dan orang lain. Pendidikan yang penuh disiplin itu membuahkan hasil yang baik sebab terbukti alumninya siap berkompetitif dengan alumni SMA Medan hal itu dapat dilihat alumni SMANSA bisa masuk perguruan tinggi terkenal di sumut yakni USU bahkan dengan SMA di Pulau Jawa pun alumni SMANSA bisa menembus dan berkuliah di perguruan tinggi bergensi seperti UGM, UI, IPB, ITB, dan UNAIR. Sedangkan didunia profesi sudah banyak alumni SMANSA menduduki posisi-posisi penting di birokrasi baik ditingkat pusat (kementerian dan badan-badan negara) dan di tingkat daerah Provinsi/ kabupaten/kota, demikian juga didunia politik (DPR, DPRD, wakil gubernur, bupati, walikota) bahkan didunia akademik ada yang bergelar doctor dan professor. Demikian juga dibidang militer TNI dan Kepolisian POLRI alumni SMANSA sudah ada yang berpangkat bintang satu dan dua.

Di SMANSA, penulis beruntung naik kelas II masuk kelas PASPAL (Pasti Alam) atau yang lebih dikenal dengan kelas B. Dimasa itu orang yang terpilih masuk kelas paspal punya gengsi bila dibanding dengan kelas SOSBUD (Sosial Budaya) kelas A, karena kelas paspal punya peluang masuk fakultas kedokteran jadi dokter dan masuk fakultas tehnik jadi Insinyur dan jadi taruna AKABRI / militer.

Di kelas prestasi penulis tidaklah menonjol, artinya tidak pernah jadi juara kls tapi tidak pernah dibawah urutan lima artinya selalu bertengger dilima besar. Di kelas I, II, dan III penulis selalu terpilih menjadi ketua kelas bahkan di kelas III terpilih menjadi sekretaris umum OSIS SMANSA.

Tahun kedua kelas kami sudah masuk penjurusan, beruntung penulis naik kelas dan masuk kelas PASPAL (Pasti Alam), kelas 2 B.1 dan tahun ketiga naik kelas 3 B.1. Ada anggapan bahwa orang

yang masuk kelas paspal merupakan orang pilihan dan biasanya jumlah perempuan lebih sedikit dibanding anak laki-laki. Jumlah kami satu kelas kurang lebih 30 orang, kami satu kelas antara lain, Gabungan Simarmata, Timbul Simajuntak, Syaiful, Darwin, Jansen Hutapea, Legiman, Samin, Ponimin, Jannes Panjaitan, Daniel Sitorus, Sukardi, Daud Dolok Saribu, Suracman, Kamal Yusuf Sitepu, Khairudin, Yulianto Karo-Karo, Jaksa Karo-karo, Mauriz Gultom, Nurbaita Hasibuan, Tiar Hayati Marpaung, Romaida Panjaitan, Rosnah Sihite, Bachtiar Hasibuan, Tasman Siagian, Albert Tampubolon, Tety Siregar (tidak lanjut kls 3). Sejak kls 2B1 dan kls 3B1 penulis dipercaya oleh kawan-kawan jadi ketua kelas, suasana kelas kami sangat kompak dan jiwa kebersamaannya sangat baik serta jiwa saling tolong menolong sangat tinggi hal ini terlihat dalam hal membantu kawan yang belum mengerjakan PR (pekerjaan rumah), biasanya Gabungan Simarmata adalah orang yang dijadikan tempat bertanya, demikian juga bila ada kawan yang karena sangat mengantuk pada jam pelajaran dan ingin istirahat diluar sebaagai ketua kelas akan melindunginya dengan cara memberi ijin.

Jadwal pelajaran setiap hari terbagi dalam tiga tahap, tahap pertama 3 jam pelajaran, tahap kedua 2 jam pelajaran dan tahap ketiga 2 jam pelajaran. Biasanya jam yang kami anggap rawan disamping pelajaran “ilmu ukur ruang” yang membutuhkan keseriusan dan juga masaalah “waktu” yakni jam pelajaran tahap ketiga yang biasanya kami anggap jam terbang jam mengantuk. Dan, untuk menghindarkan jam terbang itulah kawan-kawan ada ide atau usul bagaimana caranya menghindari agar tidak ada kegiatan di kelas pada jam tersebut, lalu ada kawan mengusulkan setelah pelajaran jam 4 dan 5 yakni jam Olah Raga, kami cabut (bolos) jalan-jalan ke tali air untuk mandi-mandi padahal jaraknya dari sekolah kami ketali air itu kurang lebih 10 km. Wah... usul atau ajakan ini bagi penulis sangat berat karena sebagai ketua kelas tidaklah mudah untuk meloloskan usul yang tidak masuk akal itu, tapi menolak usul kawan-kawan satu kelas

adalah suatu hal yang sulit juga, sebab tidak dipenuhi/ditolak akibatnya akan menjadi musuh kawan-kawan satu kelas. Disinilah ujian kredibilitas diuji sebagai ketua kelas (pemimpin) disatu pihak harus mengemban kepercayaan sekolah (guru) tapi dipihak lain hubungan (realisasi) dengan kawan-kawan harus dijaga. Akhirnya dengan pikiran pendek diputuskan kami cabut dengan alasan (reasoning) kami cabut bukan perorangan tapi satu kelas artinya walaupun dihukum ya rame-rame bukan penulis sendiri sebagai ketua kelas.

Singkatnya sampai ditali air kami yang laki-laki mandi-mandi dan ada yang berenang dengan pakaian bekas olah raga sedangkan yang perempuan tidak ada satupun yang mandi mungkin karena mereka tidak punya pakaian mandi. Setelah selesai kami bersenang-senang ditali air kamipun pulang tapi kami pulang bukannya kerumah masing-masing melainkan kembali ke sekolah menunggu jam sekolah berakhir, dengan perasaan biasa saja artinya tidak merasa bersalah.

Sampai disekolah kami biasa saja artinya masuk kelas sambil menunggu lonceng sekolah pulang, tapi lagi asyik-asyiknya kami bercanda didalam kelas tiba-tiba ibu CO. Panjaitan datang kekelas dan dengan wajah mengkerut menyuruh kami keluar semua dari kelas dan disuruh berdiri diterik panas matahari dilapangan sekolah, lalu ibu. CO meninggalkan kami dan pergi keruangan direktur (kepala sekolah) Bapak. BP. Silaen nggak berapa lama kami lihat pak.Direktur membawa bambu tiang bendera yang panjangnya kurang lebih 3 meter. Dengan suara keras dan dengan nada marah kami disuruh baris satu persatu lalu bambu yang dipegangnya diayunkannya kepantat kami dengan kuat dan “plak” sakitnya minta ampun.....bekas pukulan itu memar dan merah. Tapi ada juga kawan yang cerdas sebelum gilirannya dipukul oleh pak. Silaen dia lari dengan tergesa-gesa kekelas untuk mengambil buku tebal yang akan digunakan sebagai alat melapis yang diletakan dipantat sehingga waktu dipukulkan dengan bambu yang panjang itu bambunya tidak

langsung kepatat dan selamatlah dia dari pukulan bambu maut itu.

Hukuman dengan pemukulan bambu Panjang tersebut sesungguhnya bertentangan dengan pesan Ki Hadjar Dewan Tara yang mengatakan: “Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup dibawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orangtua, ia tiada akan dapat bekerja kalau tidak dipaksa, kalau tidak ada perintah” (Najelaa Sihab. 2016).

Demikian juga seiring dengan kemajuan peradaban mau tidak mau masalah sistim pengajaran dimasa lalu yang dilakukan oleh guru terhadap murid-muridnya itu kurang tepat bila dikaitkan dengan Pendidikan Era Sekarang. Sebab diferensiasi pengajaran pada tingkatan S.M.A mengandung maksud, menyesuaikan dasar kejiwaan murid dengan aliran pengajaran masing-masing agar memudahkan kemajuan serta berkembangnya akal budinya menurut kodratnya masing-masing.

Pendidikan adalah proses kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang terus menerus secara individual. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan akan terus selalu ada dan tidak akan pernah hilang, seperti yang dijelaskan dalam arti Pendidikan.

Oleh karena itu perlulah kepada peserta didik di dekatkan hidupnya kepada perikehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki “pengetahuan” saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat “mengalaminya” sendiri, dan kemudian tidak hidup berjarak dengan rakyatnya.

Sejalan dengan hal tersebut penulis ingin memperkenalkan teori Pendidikan **Perenialisme**.

Perenialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. **Perenialisme** lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perenialis menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. **Perenialisme** memandang situasi dunia

dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural.

Solusi yang ditawarkan kaum **perenialis** adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban-kuno (Yunani Purba) dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa dari abad keabad (Sa'dullah, 2009).

Pandangan yang telah menjadi dasar budaya manusia tersebut, telah teruji kemampuan dan kekukuhan oleh sejarah. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban Yunani Kuno, serta ajaran Thomas Aquina dari abad pertengahan. Kaum **perenialis** percaya bahwa ajaran dari tokoh-tokoh tersebut memiliki kualitas yang dapat dijadikan tuntutan hidup dan kehidupan manusia pada abad ke dua puluh ini. Mohammad Noor Syam (1984) mengemukakan pandangan perenialisme, bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Perenialisme tidak melihat jalan yang menyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan, bahwa kepribadian manusia yaitu kebudayaan dahulu (Yunani Kuno).

Pendukung filsafat **perenialis** adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler. Hutchins (1963) mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap Great Books (Buku Besar Bersejarah) dan pembahasan buku-buku klasik. **Perenialis** menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban Yunani Kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. Filsafat

perennialisme terkenal dengan bahasa latinnya Philosophia Perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh St. Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13.

Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-epercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukanlah nostalgia (rindu akan hal-hal yang sudah lampau semata-mata) tetapi telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi sikap untuk kembali kemasa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali kemasa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini.

Asas-asas filsafat **perennialisme** bersumber pada filsafat, kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu **perennialisme** yang theologis yang ada dalam pengayoman supermasi gereja Katholik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas, dan **perennialisme** sekular yakni yang berpegang kepada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan H.B Hamdani Ali dalam bukunya filsafat pendidikan, bahwa Aristoteles sebagai mengembangkan philosophia perennis, yang sejauh mana seseorang dapat menelusuri jalan pemikiran manusia itu sendiri. ST. Thomas Aquinas telah mengadakan beberapa perubahan sesuai dengan tuntunan agama Kristen ketika agama itu datang. Kemudian lahir apa yang dikenal dengan nama Neo-Thomisme. Tatkala Neo-Thomisme masih dalam bentuk awam maupun dalam paham gerejawi sampai ke tingkat kebijaksanaan, maka ia terkenal dengan nama **perennialisme**.

Pandangan-pandangan Thomas Aquinas di atas berpengaruh besar dalam lingkungan gereja Katholik. Demikian pula pandangan-pandangan aksiomatis lain seperti yang diutarakan

oleh Plato dan Aristoteles. Semuanya itu mendasari konsep filsafat pendidikan **perennialisme**.

Neo-Scholastisisme atau Neo-Thomisme ini berusaha untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Thomas Aquinas dengan tuntutan abad ke dua puluh. Misalnya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan cukup dipahami dan disadari adanya. Namun semua yang berdasarkan empirik dan eksperimentasi hanya dipandang sebagai pengetahuan yang fenomenal, maka metafisika mempunyai kedudukan yang lebih penting.

Guruku Mengajari Korupsi

SMA kami tiap akhir tahun mengadakan acara perpisahan kelulusan kelas tiga, biasanya dibentuk panitia perpisahan, kebetulan tahun 1973 yang terpilih jadi ketua panitia adalah penulis. Dengan terpilihnya penulis menjadi ketua panitia penulis pun langsung membentuk susunan pengurus lalu konsep kepanitiaan tersebut diserahkan kepada bapak direktur (Kepsek) untuk ditanda tangani beliau, setelah diketik Tata Usaha lalu diserahkan kepada penulis. Penulis melihat Surat Keputusan Direktur SMA tersebut ternyata dari pihak guru ditunjuk menjadi pengawas panitia yakni bapak M.Manik. Setelah mendapat SK kepanitiaan tersebut kami panitia bekerja keras untuk mensukseskan acara perpisahan, respon teman-teman sangat antusias sehingga dalam memberikan sumbangan mereka melebihi uang dari jumlah kewajiban yang ditetapkan. Puji Tuhan acara berlangsung dengan sukses dan meriah, pengisi acara kesenian merupakan sumbangan dari teman-teman yang enggak dibayar sehingga anggaran panitia sisa. Setelah selesai acara perpisahan, bendahara melaporkan kepada penulis bahwa panitia mempunyai uang sisa dan bertanya untuk apa digunakan uang sisa tersebut ? Lalu penulis menjawab sebaiknya kita laporkan dulu kepada guru pengawas panitia Pak. Manik, teman-teman panitia setuju atas usul penulis. Lalu penulis menghadap Pak.Manik keruang Sekretariat / Tata Usaha untuk

melaporkan tentang kegiatan kepanitiaan perpisahan. Tiba kepada pembicaraan masalah adanya uang sisa, disinilah terjadi dialog sebagai berikut: “pak. guru mengatakan uang sisa tersebut kita atur saja berdua kau minum tes (teh) manis saya minum kopi”. Bagi penulis apa yang diinginkan oleh pak. guru itu merupakan dilemma, diikuti bertentangan dengan prinsip yang telah diajarkan oleh kedua orang tua yang selalu mengajarkan penulis jangan ambil yang bukan hakmu. Enggak diikuti keinginan pak. guru itu timbul ketakutan apakah penolakan akan berpengaruh kepada kelulusan penulis ?.

Akhirnya, penulis mengundang teman-teman panitia untuk membicarakan masalah yang dihadapi oleh penulis yakni ajakan pak. guru agar uang sisa dibagi kepada pak. guru. Ternyata teman-teman panitia tidak setuju dengan ajakan pak. guru tersebut, mereka mengatakan sebaiknya uang sisa tersebut digunakan untuk pembubaran panitia, ini sejalan dengan keinginan penulis. Lalu hasil keputusan panitia tersebut penulis sampaikan kepada pak. guru dan respon beliau sangat-sangat diluar dugaan penulis sebab dengan wajah yang tidak bersahabat beliau meninggalkan penulis diruangan, yang anehnya beliau tidak sportif sebab sejak kejadian itu beliau tidak bertegur sapa lagi dengan penulis. Sampai tahun 1977 penulis sudah mendapat gelar sarjana muda (BA) dari Fisipol UGM Yogyakarta pulang liburan ke Kisaran, penulis datang berkunjung ke SMA disekolah senang bisa bertemu dengan ibu/bapak guru, kami bersalaman sambil bercerita kesan kuliah di UGM Yogyakarta, tapi aneh pak. Manik tidak mau ikut gabung dengan kami bahkan beliau melengos pergi begitu saja.

Kisah sedih yang dialami penulis masa bersekolah di SMANSA tidak berhenti hanya disitu, kisah berikutnya adalah pengambilan ijazah kelulusan. Penulis berangkat ke Yogja sesudah diumumkan kelulusan SMA bahwa Penulis dinyatakan LULUS, artinya penulis berangkat ke Yogyakarta tidak punya modal yaitu Ijazah sebagai syarat utama untuk mendaftar ke

Perguruan Tinggi. Penulis berangkat ke Yogyakarta terkesan buru-buru karena bang Victor menyuruh agar segera berangkat biar tidak terlambat mendaftar di UGM jangan tunggu ijazah keluar, benar saja kekhawatiran penulis menjadi kenyataan sebab begitu penulis mau mendaftar di Fisipol dan Fakultas Hukum serta Fakultas Ekonomi UGM, penulis oleh panitia penerimaan mahasiswa baru dimintakan menunjukkan ijazah, dengan adanya permintaan ijazah tersebut dengan harap-harap cemas penulis hubungi orang tua di Kisaran dengan bertanya kenapa ijazah belum dikirim ? Minta tolong agar secepatnya ijazah dikirim ke Yogya sebelum pendaftaran ditutup, aneh jawaban dari orang tua penulis bahwa ijazah belum boleh diberikan dengan alasan yang tidak jelas dari direktur (Kepsek). Keterlambatan pengiriman ijazah tersebut yang pada akhirnya membuat kekecewaan dan kesedihan yang diderita oleh penulis, sebab impian bisa kuliah di UGM rontok sudah... hanya karena bapak saya tidak mau bayar pungutan liar (pungli) kepada bapak direktur / kepsek Pak. BP. Silaen, akhirnya tahun pertama di Yogya (1974) penulis kuliah di FH Atmajaya. Baru tahun berikutnya tahun 1975 terpenuhi impian untuk kuliah di UGM. Melihat kejadian yang dialami oleh penulis itulah, makanya dalam sub tulisan ini diberi judul "GURUKU MENGAJARI KORUPSI".

Di Era Soeharto tepatnya tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. "Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin. Ternyata tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan Negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan

yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. "Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa mengenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya,

mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditengarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin baru negara ini yang akan memulai perjalanan panjangnya periode kedua presiden SBY. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan.

Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru dan ternyata apa yang disampaikannya itu hanya sebagai pelipur lara.

Kaitannya antara Korupsi dengan rezim yang memimpin Indonesia ternyata masalah korupsi belum bisa diberantas secara tuntas, itulah sebabnya ketika diadakan pilpres tahun 2014, penulis penuh harap dengan Jokowi yang akan bisa membawa

Indonesia bebas dari korupsi, ternyata harapan itu belum tercapai 100 %, apakah mungkin karena kesadaran dari pemegang kekuasaan di era Jokowi belum sama komitmennya dengan **Presiden** Jokowi untuk memberantas korupsi? ataukah mungkin karena Jokowi bukan Ketua Umum Partai pemenang / pengusung Capres?. Ataukah mungkin karena tidak satupun partai politik di Indonesia yang secara jelas dan tegas dalam perjuangan partainya berani menyatakan anti korupsi?. Pertanyaan – pertanyaan itulah pada **Pilpres, dan Pileg** tahun 2019, penulis bersimpati kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebab dari semua partai yang ikut pemilu 2019 hanya PSIlah yang secara terang benderang menyebutkan dalam kampanyenya anti korupsi dan secara tegas memerintahkan kepada kader-kadernya yang akan maju dalam PILEG tidak boleh/melarang memberi dan menerima uang dari simpatisan/pendukungnya.

Namun, demikian sikap anomali masyarakat yang tidak selaras dengan reformasi (pemberantasan korupsi) juga sebagai faktor pendorong merajalelanya korupsi, artinya korupsi bukannya berhasil diberantas malah semakin membuat kekacauan disektor ekonomi. Sikap masyarakat yang tidak konsisten itu dapat dilihat dari pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, orang yang sudah menjalani hukuman pidana korupsi malah dipilih menjadi kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) maupun menjadi anggota DPRD, anehnya bisa terpilih dua priode dan lebih aneh lagi menjadi wakil ketua DPRD, contohnya Sdr.Muhammad Taufik ketua Gerindra DKI Jakarta, mantan narapidana kasus korupsi di KPU DKI Jakarta.

Padahal tujuan Reformasi tahun 1998 adalah menggantikan pemerintahan Orde Baru menjadi sistim pemerintahan yang lebih demokratis dan bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun demikian, kenyataan politik, sosial, hukum maupun ekonomi yang terjadi pasca-reformasi bertolak belakang dengan misi perjuangan reformasi. Justru kita dipertontonkan “sinetron”

penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi yang masih jauh dari kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia.

Dikalangan akademisi juga demikian, ada rasa pesimis (Malik Ruslan, 2017) mengatakan kajian akademis seputar korupsi tampaknya masih kurang menarik dibandingkan wacana seputar kecaman terhadap korupsi dan pelakunya yang berproses diruang publik. Sebab menurut wakil ketua KPK Busyro Muqodas 10 Desember 2014 mengatakan “Ada 10 profesor dan 200 doktor terjebak kasus Korupsi (Malik Ruslan, 2017). Publik menginginkan agar koruptor dimiskinkan ternyata mendapat tanggapan ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut. Ini terlihat dari sikap Prof. Dr. Muladi mantan Rektor UNDIP Semarang (Cendikiawan) yang mengatakan: memiskinkan koruptor tidak proporsional dan terlalu berlebihan. ”Memiskinkan orang itu terlalu dramatis, harusnya proporsional saja. Kalau memiskinkan, kita bisa diketawain dunia” (Malik Ruslan, 2017). Dengan demikian masalah pemberantasan korupsi di Indonesia dikalangan cendikiawan menimbulkan Pro – Kontra yang akhirnya menimbulkan kekecewaan dikalangan publik.

Mungkin tidak banyak yang memahami bahwa pemiskinan koruptor yang diinisiasi oleh KPK dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sisi politik, dengan memiskinkan koruptor, KPK sebetulnya mencoba menciptakan keseimbangan baru antara murka publik disatu sisi, dengan runtuhnya wibawa hukum dan Lembaga penegak hukum dimata publik di sisi lain. Itulah sebabnya diperlukan peran Pendidikan, sebab Pendidikan merupakan suatu gerakan pemulihan, bahkan Pendidikan diharapkan menciptakan kebudayaan baru (*produces new culture*). Itulah sebabnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dikaji strategi kebudayaan dan politik, sebab strategi kebudayaan akan dapat menciptakan perubahan - perubahan antara lain: mengubah budaya Indonesia menjadi lahan tandus bagi segala jenis bentuk korupsi ; mengubah segenap

manusia Indonesia untuk berani dan tegas mengatakan tidak pada korupsi ; mengubah pemilih Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang terindikasi korupsi. Sehingga lahirlah individu - individu yang berintegritas yang mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan yang merdeka (independent).

Pemilu Pertama Orba, Sandiwara

Tahun 1971, tahun pertama bersekolah di SMANSAKIS, rezim pemerintahan ORBA melaksanakan pemilihan umum (PEMILU), artinya Pemilu ini merupakan pertama kali bagi penulis karena sudah berumur 17 tahun dan sudah berhak menggunakan hak pilih dan inilah pertama kali terlibat langsung dalam dunia politik yakni memilih partai politik secara langsung umum bebas rahasia yang pada masa itu disebut “luber”. Peserta Partai politik pada waktu itu ada sepuluh yakni GOLKAR, PARKINDO, MUHAMMADIAH, NU, KATHOLIK, IPKI, MURBA, PNI, PSII, PARMUSI.

Menjelang pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru tanggal 5 juli tahun 1971, Menteri Dalam Negeri Amir Macmud menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 1969 seebagai langkah awal membonsai perkembangan partai-partai politik. Peraturan Menteri ini dengan tegas menyatakan pegawai negeri sipil (pns) dilarang menjadi anggota partai politik. Untuk memperkuat Permendagri tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970, yang menetapkan pegawai negeri hanya boleh memiliki “monoloyalitas”. Tujuan kedua peraturan itu jelas: memisahkan para pegawai negeri dari partai-partai politik. Maka, ketika pemilihan umum diselenggarakan, ORBA mengeluarkan intruksi agar pegawai negeri memberikan suaranya kepada Golkar, mesin politiknya selain ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Untuk mengontrolnya, pencoblosan atau pengambilan suara ketika pemilihan umum harus dilakukan pegawai negeri ditempat kerjanya.

Dalam pemilu ini dapat dilihat dengan mata telanjang keterlibatan guru-guru dan intens untuk memenangkan salah satu kontestan - GOLKAR, karena setiap giliran kampanye golkar kami siswa SEMANSA diharuskan ikut kampanye dengan pakaian Bhinneka Tunggal Ika bahkan penulis diharuskan berpakaian adat batak lengkap dengan Ulos (kain selendang), pawai keliling kota Kisaran sekalian berteriak-teriak hidup golkar !!! Guru kami dikelas juga sepertinya menyelipkan kata-kata saat mengajar agar memilih golkar karena golkar merupakan partai pemerintah ORBA dan didukung ABRI. Rezim ORBA dengan kelicikannya bermacam-macam peraturan dibuat yang memasung kebebasan berpolitik masyarakat. Hal itu dilakukan tujuan akhirnya memenangkan kepentingan ORBA melalui kemenangan Golkar lewat pemilu.

Kelicikan rezim ORBA tersebut terbukti waktu kampanye Golkar dilapangan POLISI Kisaran, bagaimana kami siswa SMANSA didayagunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Golkar dan ternyata bukan hanya siswa SMANSA kami saja yang ikut kampanye, ada juga siswa dari SMA lain dan STM serta SMEA yang bersemangat dan berteriak-teriak hidup golkar !!! Tiba giliran acara pidato kampanye dari para juru kampanye (Jurkam) dapat dilihat ada perbedaan penguasaan materi kampanye antara Jurkam tingkat Nasional dengan jurkam daerah. Kalau jurkam kampanye tingkat nasional berpidato penulis tidak ngantuk karena daya tarik dan dengan suara baritonnya berapi-api mengajak agar pada saat pemilu menusuk golkar. Rupanya diantara kawan-kawan kami itu ada yang bercanda dengan mengatakan kalau boleh usul apabila setiap partai politik mau kampanye kita anak SMANSA diikutkan seperti ini, biar kita bisa libur dan berteriak-teriak. Lalu ada kawan kami yang mengatakan: itu tidak mungkin karena golkar adalah partai pemerintah sedangkan partai lain bukan, sehingga kita tidak mungkin ikut kampanye dengan partai lain. Lihat aja partai PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) yang gilirannya

kampanye karena tidak dapat ijin menggunakan lapangan POLISI terpaksa kampanyenya dilakukan door to door dari rumah kerumah di kampong Siderejo I dan II padahal yang kampanye adalah jurkam nasional Sabam Sirait sekjen Parkindo. Dari diskusi itulah muncul pertanyaan diantara kami tentang tekad Golkar untuk menang dan sapu bersih dalam pemilu itu, ternyata kawan-kawan itu tidak semua setuju untuk memilih golkar bahkan ada yang antipasti terhadap golkar hanya karena orang tuanya pengurus partai bukan golkar.

Saat hari pencoblosan disekolah dan kawan-kawan sudah berbaris menunggu giliran untuk masuk bilik suara yang tempat pemilihan suara (TPS) berada dilapangan sekolah kami, disertai pengawasan dari guru-guru. Pencoblosan selesai lalu sekolah kamipun bubar pulang. Tapi aneh, hari senin berikutnya seperti biasanya kami mengikuti upacara apel bendera sekolah tiba-tiba guru yang memimpin upacara (pak.Syarifudin guru bahasa Indonesia) dalam pidatonya dengan nada bercanda mengatakan antara lain, bahwa ternyata ada siswa/pelajar Kelas G.5 yang memilih bukan golkar, pertanyaannya darimana beliau tau dan kalaupun itu benar apa kaitannya hasil pemilu itu dengan beliau ?

Memang harus diakui 32 tahun Soeharto memimpin Pemerintahan ORBA masalah pelaksanaan PEMILU tidak pernah dilaksanakan secara LUBER DAN JURDIL yakni langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana yang selalu digaungkan setiap pemilu, sebab keterlibatan Pemerintah jalur Birokrasi (B), Jalur ABRI (A) serta Jalur Golkar (G) yang dikenal dengan tiga jalur (A, B dan G) merupakan 3 pilar kekuatan pendukung rezim Soeharto. Dikalangan Pns sendiri ada yang sangat ditakutkan atau menghantui mereka dalam setiap pemilu yakni, PP No. 6 tahun 1970 yang tidak membolehkan dan melarang Pns ikut menjadi anggota partai politik tapi ikut GOLKAR (Golongan Karya) boleh, karena golkar bukan partai politik, diksi inilah yang selalu dibangun dikalangan pns agar tidak masuk menjadi

anggota parpol. Padahal dilihat dari fungsi-fungsi politik antara partai politik dengan Golkar sama sekali tidak ada bedanya. Demikian juga masalah tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya ditempatkan didaerah netral tapi dalam kenyataannya TPS ditempatkan dikantor-kantor pemerintah dan bahkan ada yang lokasinya dilapangan sekolah, sehingga TPS tidak setril artinya TPS dengan mudah diawasi oleh instansi yang berwenang yang berpihak ke Pemerintah karena pelaksana pemilu adalah pemerintah, disamping itu tidak adanya suatu lembaga pengawas yang independent seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seperti sekarang ini.

Kecurangan pelaksanaan Pemilu dialami oleh penulis pada Pemilu Tahun 1987, sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta kami sudah diwanti-wanti agar menusuk GOLKAR. Di kantor-kantor Juru – Kampanye Golkar dengan leluasa berkampanye beda dengan dua partai yang lain yakni: PPP dan PDI tidak leluasa seperti GOLKAR. Setiap kampanye GOLKAR kami diharuskan ikut dan terlebih dahulu menanda tangani daftar hadir lalu dibagi kaos serta dapat amplop uang transport.

Pada hari pencoblosan kami terlebih dahulu diabsen untuk mengetahui siapa yang tidak hadir dan sesudah itu baru menuju TPS yang berada didepan/seberang Balaikota DKI, pencoblosan dimulai dari Pukul 08.00 s/d 13.00 wib, aneh kira-kira pukul 14.30 wib ada teman yang menginformasikan bahwa penulis diketahui tidak mencoblos Golkar No.5, sungguh aneh tapi nyata koq penyelenggara bisa tahu siapa yang tidak mencoblos Golkar? Mengetahui hal itu penulis mencoba tenang seolah-olah tidak ada masalah, tapi pada umumnya teman-teman satu kantor sudah tahu kalau penulis tidak mencoblos No.5, sikap mereka ada yang menyesalkan, ada yang jengkel malah ada yang sinis pengurus KORPRI dengan menyindir dengan kata-kata: “enggak tahu diri cari makan di Pemerintah tapi yang dipilih bukan yang kasih makan”. Sanksi akibat tidak memilih Golkarpun jatuh kepada penulis yakni pencopotan jabatan (kasubag pembinaan sumber

pendapatan daerah), digeser menjadi kasubag Kerjasama Antar Daerah.

Itulah sebabnya selama pemerintahan Soeharto kegiatan politik lima tahunan itu, Golkar selalu menang diatas 70 % karena memang dalam pelaksanaannya tidak demokratis.

Sesungguhnya Ide awal dilaksanakannya pemilu merupakan wujud penyampaian hak azasi manusia (HAM) kepada Negara (Presiden, DPD, DPR, DPRD) melalui aktifitas politik dan juga pemilu itu sendiri merupakan salah satu pilar demokrasi, tapi dalam kenyataannya di era rezim Soeharto pemilu itu hanyalah “demokrasi ecek-ecek”, sebab masyarakat/rakyat dalam kenyataannya tidak punya kebebasan berpolitik karena rakyat dibuat sebagai massa mengambang (floating mass), artinya rakyat yang tinggal didesa tidak boleh bersentuhan dengan partai politik dan bahkan dibuat buta politik yang sejatinya bertentangan dengan pendapat ARISTOTELES yang mengatakan bahwa manusia adalah mahluk ZOON POLITICON.

Sangat disayangkan jika perpolitikan di Indonesia sejak jaman ORBA hingga masa reformasi tidak berada di dalam makna “etisnya”. Hubungan komunikasi antar-para politisi, misalnya, tidak dibangun atas dasar kontestasi argumentasi yang dituntun oleh visi, melainkan diwarnai oleh saling cerca dan ancaman yang jauh dari kesantunan politik. Perdebatan bermutu menyangkut pencarian berbagai kemungkinan mencapai kemaslahatan public, sebagaimana yang terjadi pada era Demokrasi Parlementer (1946-1959), tidak lagi dapat dijumpai saat ini.

Disamping itu, dalam rangka membangun basis legitimasi politik, yang muncul bukan tawaran-tawaran rasional kritis yang berisi rancangan hari depan yang berkeadilan. Kondisi semacam ini mengakibatkan politik menjadi korban stigma dan salah kaprah. Saat ini masyarakat awam tidak lagi dapat membedakan antara tindakan tipu daya dan tindakan politik. Keduanya terlanjur dianggap identik. Politik adalah tipu daya: tipu daya

adalah politik. Padahal, berbagai bentuk perilaku semacam itu jelas tak sama dengan makna dasar politik yang sesungguhnya.

Terbangunnya persepsi semacam ini tentu saja bukan kesalahan masyarakat. Para elite politik agaknya merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan kaprahan ini. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah praktik-praktik yang tidak etis yang menggunakan sarana dan lembaga-lembaga politik. Ini berarti bahwa beberapa intitusi dan proses politik sedemikian rupa telah diplintir sehingga semakin menjauh dari tujuan dasarnya.

Jadi bila dibandingkan pemilu masa orde baru dengan pemilu orde reformasi sungguh sangat berbeda. Di jaman pemerintahan orde baru di bawah presiden Soeharto.

Pemilu orde baru: (1) Penyelenggara Pemilu adalah Penguasa/Pemerintah. Bukan lembaga independen ; (2) Partai Pendukung Pemerintah (Golkar) selalu menang mutlak. Itulah sebabnya mengapa Soeharto bisa berkuasa 30 tahun lebih ; (3) Hasil pemilu sudah bisa diketahui, bahkan sebelum pemilu dilaksanakan, orang sudah tahu hasilnya, dan sudah dapat dipastikan siapa yang menang. Lebih cepat dari metode Quick Count sekarang ini ; (4) Semua organisasi yang terkait dengan pemerintah, pejabat pemerintah, eksekutif BUMN, termasuk pegawai negeri dan BUMN dimobilisasi untuk mendukung dan memilih partai Pemerintah (Golkar) ; (5) Sebagian TPS didirikan di kantor lembaga pemerintahan dan kantor BUMN. Hari Pemilu bukan hari libur. Di semua TPS yang didirikan di kantor-kantor, partai pendukung Pemerintah (Golkar) menang 100%. Pegawai Negeri / BUMN yang tidak memilih Golkar akhirnya pasti akan ketahuan/ tertangkap dan diinterogasi habis-habisan, dan akhirnya dapat konduite jelek bahkan bisa dipecat.

Sedangkan Pemilu 2019 sekarang ini sesungguhnya bersih dari kecurangan terstruktur sistematis dan massif, karena (1) Penyelenggara pemilu bukan Pemerintah, melainkan lembaga independen (Bawaslu, KPU). Presiden petahana hanya menang

sekitar 54 % ; (2) Tidak ada TPS di kantor-kantor Pemerintah/ BUMN. Sehingga pegawai negeri / BUMN bebas memilih calon presiden siapapun, dan partai manapun tanpa ketakutan ketahuan pilihannya ; (3) Hari pelaksanaan pemilu ditetapkan sebagai hari libur ; (4) Partai Pendukung Pemerintah ternyata tidak ada yang menang lebih dari 20%. Bahkan di beberapa daerah, presiden petahana bisa kalah telak. Demikian pula dengan partai pendukung Pemerintah/ presiden petahana di beberapa daerah kalah mutlak.

Tentu bukan sebuah kebetulan jika kondisi semacam itu membuat masyarakat dilanda sikap sinis, bahkan apolitis. Sikap semacam ini jelas mengandung resiko berbahaya bagi masa depan perpolitikan di Indonesia. Sebab, upaya mencari kemaslahatan hidup bersama sebagai inti dari tindakan politik tersebut justru dimungkinkan sejauh warga Negara memiliki pengetahuan dan kemampuan politik.

BAGIAN KEEMPAT: Philosophy Pancasila

“Pancasila bukan hanya sebagai Ideologi Negara melainkan juga sebagai Ilmu, sebagai sains Pancasila berlaku umum dan setiap orang dimuka bumi ini bebas mempelajari dan menelitinya”.

Bab 4

MASA STUDY DI YOGJAKARTA

Kuliah Di Fakultas Sosial Politik UGM

Pancasila Sebagai Ilmu

Kuliah semester pertama di Jurusan Pemerintahan (sekarang Jurusan Politik Pemerintahan) Fakultas Sospol UGM, ada mata kuliah Pengantar Ilmu Pancasila yang merupakan mata kuliah pokok artinya mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini, apabila tidak lulus mata kuliah tersebut tidak boleh mengambil mata kuliah Filsafat Pancasila di tingkat 5 (lima). Mata kuliah ini diampuh oleh Bp. Mariun BA. Ada dua topic pokok bahasan yang menarik yakni Pancasila sebagai Ilmu dan Urutan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Pertama, Pancasila sebagai Ilmu?

Dalam kuliah ini Pak. Mariun menjelaskan bahwa Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni mempunyai: objek, metode, bersistem, dan bersifat universal. Berobjek terbagi dua yakni objek material dan objek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal (subject matter) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Sedangkan objek formal adalah titik perhatian tertentu (fokus of interest, point of view) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara

bertindak menurut aturan tertentu. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah.

Pancasila juga memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan hierarkhis dan berbentuk pyramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi.

Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain: pendekatan historis, pendekatan yuridis constitutional, dan pendekatan filosofis.

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:

Asal Mula Bahan (Causa materialis) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.

Asal Mula Bentuk atau Bangun (Causa formalis) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.

Asal Mula Karya (Causa efisien) ialah asal mula yang

meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.

Asal Mula Tujuan (*Causa finalis*) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri (Mutiara yang tersimpan), walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya:

Orang Indonesia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/ dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Orang Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dume, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan

Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Orang Indonesia memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokrasi yang sudah ada sejak dahulu kala, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia ;

Orang Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur Bersama, lumbung desa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.

Pancasila secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi

nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

Pertanyaannya kalau Pancasila sudah terbukti sebagai Ilmu dan juga sumbernya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri, mengapa masih ada orang Indonesia yang masih mau mengganti Pancasila sebagai Ideologi bangsa? Dan bahkan tidak mau mengakuinya sebagai Pokok Kaidah Negara (Staat Fundamental Norm)?

Haluan Ideologi Pancasila

Di tingkat 5 (lima) doctoral, penulis mengambil mata kuliah Filsafat Pancasila yang diampuh oleh Prof. Notonegoro/Afandi. Mata kuliah ini hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang sudah lulus Pengantar Ilmu Pancasila. Salah satu topic bahasan yang menarik adalah tentang “Trisila dan Ekasila”.

Prof. Notonegoro menjelaskan Istilah Trisila dan Ekasila dikemukakan oleh Sukarno. Sukarno mengemukakan soal trisila dan ekasila di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Topik kuliah itu membuka ruang diskusi yang hangat dan menarik dipandu oleh dosen yang bersangkutan, yang di perdebatkan adalah masalah Pengakuan Pancasila oleh Negara apakah Pancasila 1 Juni 1945 atukah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang tertulis pada pembukaan UUD 1945?. Mengapa masalah pengakuan tersebut yang diperdebatkan?, ternyata ada hal yang prinsip dalam susunan/urutan dari sila Pancasila itu dan ciri pokok. Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan yang ada pada Pancasila 1 Juni 1945.

Ternyata diskusi tentang Subtansi Pancasila, Tri Sila dan Eka Sila, 41 (empat puluh satu tahun) yang lalu itu berulang lagi di Era Reformasi tahun 2020 ini, hanya bedanya di era penulis

sebagai mahasiswa didiskusikan di ruang kelas sedangkan di Era Reformasi di diskusikan ditengah jalan. Hal ini dapat dilihat pada saat digulirkannya Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) di Gedung DPR RI terjadi pergolakan politik bahkan menimbulkan polarisasi ditengah masyarakat karena ada yang Pro RUU HIP, Penentang RUU HIP dan Kelompok yang tidak peduli terhadap RUU HIP.

Kelompok penentang RUU HIP tidak fokus kepada apa yang harus diperjuangkan, sebab tuntutan pendemo berbeda-beda, bila di identifikasi ada yang minta digagalkan pembahasan RUU HIP, bahwa Eka Sila merendahkan sila pertama Pancasila yakni KeTuhanan yang berkebudayaan, Pengusul RUU HIP punya motif membangkitkan PKI, dan partai pengusul RUU HIP agar didubarkan, kenapa RUU tidak mencantumkan Tap.MPRS No.XXV TAHUN 1966, bahkan sampai ada pembakaran bendera partai politik. Bagi penentang menganggap RUU HIP membuka luka lama umat muslim di Indonesia. Bahkan ada tuduhan bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila ini dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tertuang dalam Pasal 44. “Penguatan eksekutif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat.”

Bahkan, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut, ada upaya sekularisasi yang dinilai berada dalam batang tubuh RUU HIP. Padahal, inti Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa, bukan sebaliknya, bahkan dicantumkan agama, rohani, dan budaya dalam satu baris. “Hal ini mencerminkan pandangan sekularisme yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujar dia dalam keterangan resminya, (Kompas 10/6). Untuk itu, ia meminta DPR untuk melakukan kajian yang mendalam dan tidak terburu-buru terkait pembahasan draf RUU HIP. GP Ansor menyebut, ada

beberapa kejanggalan dalam RUU tersebut. GP Ansor melihat banyaknya perdebatan dari RUU HIP. Salah satu perdebatan yang timbul adalah RUU itu terkesan sebagai upaya terselubung eks **PKI** dan kelompoknya untuk balas dendam sejarah yang menimpa mereka. Untuk itu, dibutuhkan diskusi dan masukan dari berbagai kalangan sebelum dimulainya pembahasan RUU HIP.

Sesungguhnya dalam Ketentuan Umum RUU Haluan Ideologi Pancasila dijelaskan, bahwa HIP sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial. Sedangkan dalam Bab II Pasal 2, RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi Haluan Ideologi Pancasila; tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila; masyarakat Pancasila; dan demokrasi Pancasila

Adapun yang menuai kontroversi di antaranya Pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pendapat yang pro terhadap RUU HIP mengatakan, bahwa Ketuhanan yg berkebudayaan menurut Bung Karno bahwasanya *“Bangsa Indonesia bukan saja bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan dengan Tuhannya sendiri. Yang Muslim bertuhan menurut*

petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih. Yang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada pada mereka, dan begitu seterusnya agama-agama yang lain. Marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.” Dengan pernyataan itu, Bung Karno hendak menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan tidak akan pernah menjadi negara sekuler. Karena dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, hakikatnya setiap warga bertuhan. “Karena bertuhan, kita sejatinya mempunyai budi pekerti yang luhur, saling menghormati, saling menghargai, tidak egois, dan tidak pula fanatik. Cara bertuhan yang seperti itu, menurut Bung Karno disebut ketuhanan yang berkebudayaan.”

Perbedaan sikap tersebut menurut penulis “Ada pihak-pihak yang secara sengaja hendak menggunakan agama sebagai alat politik yang memecah belah dengan cara menghembuskan fitnah dan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Ini tentunya sangat disayangkan, karena sangat jauh dari esensi Ketuhanan Yang Maha Esa,”

Perdebatan (pro-kontra) tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak punya kesepakatan apa sebenarnya yang menjadi “pokok masalah” artinya dengan mencari faktor-faktor apakah penyebab dari pokok masalah tersebut dan apakah akibat yang terjadi dari pokok masalah tersebut. Dalam perdebatan yang terjadi terhadap RUU HIP itu menimbulkan kesalahan pengambilan kesimpulan, sebagai contoh apa korelasinya pengusul draf RUU HIP itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga kesimpulannya Partai pengusul draf tersebut dituduh PKI dan harus dibubarkan? Padahal PKI sudah dibubarkan berdasarkan Tap.MPRS XXV Tahun 1966. Apa hubungannya antara RUU HIP dengan bendera partai politik? Mengapa massa pendemo

harus melakukan pembakaran? Dan anehnya waktu penulis masih mahasiswa (1979) membahas Pancasila – Trisila – Ekasila tidak dituduh PKI, padahal masa itu Negara dipimpin rezim Otoriter Soeharto yang sangat anti terhadap Komunis. Lebih aneh lagi masa pendemo yang selama ini kurang sejalan dengan Pancasila (pendukung HTI), begitu galaknya menentang/menolak draf RUU HIP, ada apa?. Yang lebih aneh lagi apa korelasinya antara Pembahasan draf RUU HIP dengan turunkan Presiden Jokowi? Bukankah pembahasan suatu Undang-Undang ranahnya DPR (Legislatif)?

Namun demikian, ada hikmah yang didapat dari perdebatan terhadap Draft RUU HIP itu, artinya bisa dilihat bahwa sesungguhnya ada tiga kekuatan besar yang selama ini masih exis berjuang dan mempertahankan kepentingannya. Ketiga kelompok kepentingan (**interest group**) tersebut yang pertama adalah kelompok Cendana (keluarga Soeharto) yang didukung oleh penikmat rezim ORBA, kelompok kedua adalah kelompok yang masih merindukan kembalinya Piagam Jakarta dan kelompok yang ketiga adalah kelompok NKRI harga mati. Jadi pertarungan yang kerap muncul dalam percaturan politik di Indonesia akan mudah membacanya bila melihat pergerakan ketiga kelompok tersebut.

Di Era ORBA untuk mendapatkan posisi pemimpin baik pemimpin politik, ABRI bahkan posisi Penting di Birokrasi harus lewat tangan Cendana (ruling family) dan sepertinya ada suatu konvensi apabila mau jadi Panglima syaratnya: Keluarga Cendana (kerabat), Suku Jawa, Jawa Tengah (Yogja), Meliter (AD) masuk ke hampir semua segi kehidupan sosial Indonesia (Sabam, 2019), Islam, dan anehnya masalah tingkat pendidikan tidak dipermasalahkan yang penting memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan mereka inilah yang penulis sebut sebagai penikmat ORBA. Orang-orang penikmat Orba ini dapat dengan mudah dikenali sebab ciri utamanya dalam perjuangan politiknya adalah membangkitkan dan merebut kembali kejayaan Orba (Soeharto)

dengan menggandeng TNI (Pensiunan Jenderal) serta membangun Isu kebangkitan Komunis. Ingat Pilpres 2014 dan 2019.

Sedangkan kelompok pemimpi piagam Jakarta merupakan kelompok yang berjuang untuk kembalinya Sila Pertama Pancasila dengan menambah tujuh kata, artinya ingin merubah Ideologi Negara dengan membangun isu bangkitnya kembali PKI di Indonesia bahkan menciptakan gerakan yang menggunakan suatu “Agama” tertentu yang sering disebut Religiofikasi dan tidak segan-segan menggunakan rumah-rumah ibadah dan memanfaatkan anak-anak sebagai alat perjuangannya.

Adapun kelompok NKRI harga mati adalah kelompok nasionalis yang dapat diidentifikasi sebagai pembela Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pembelaan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui tulisan-tulisan maupun keterlibatan dalam pengambilan kebijakan baik ditingkat Legislatif maupun Eksekutif. Dan aktif menggerakkan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat dan membina generasi muda untuk mencintai hidup dalam kebhinekaan. Hanya disayangkan kelompok ini masih ada yang toleran dengan Korupsi.

Asrama Mahasiswa Realino Asrama Bhinneka Tunggal Ika

Kenangan Ku Di Asrama Mahasiswa Realino

Oleh: Normin Soaloon Pakpahan (1964)

Yang paling berkesan selama tinggal di Asrama Realino adalah membangun kebersamaan sebagai keluarga besar Realino yang terdiri dari para mahasiswa dengan latar belakang asal, budaya dan agama yang berbeda. Para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari orang Aceh sampai Papua tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap Asrama Realino yang dikelola oleh pater pater Jesuit. Bahkan saat politik adalah panglima yang melanda Indonesia di akhir periode Orde Lama

dan awal Orde Baru antara 1960 sampai 1968; hampir semua organisasi kemahasiswaan terwakili kehadirannya dilingkungan pergaulan anak asrama. Tokoh dan aktifis gerakan gerakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan HMI, GMNI, GMKI dan PMKRI; bahkan CGMI sampai 1965 hidup rukun dan damai di lingkungan asrama Realino. Dialektika politik mahasiswa sektarian keagamaan dan nasionalis hidup dan berkembang dalam bingkai kebersamaan berlandaskan slogan Asrama Realino “SAPIENTIA ET VIRTUS”. Para rohaniwan Katholik yang memimpin dan membimbing kehidupan di Realino menunjukkan makna slogan itu bukan dengan “indoktrinasi” melainkan dengan laku kehidupan bersama sebagai keluarga dimana tanpa disadari para anggota keluarga membangun dan melaksanakan kehidupan sesuai dengan arti dan makna slogan itu. Seingatku sewaktu diwawancara sekitar April 1964 oleh Romo Stolk, pemimpin Asrama pada waktu itu tidak dijelaskan apa itu slogan Sapientia et Virtus yang menjadi landasan hidup bersama di Realino. Saya hanya di Tanya berbagai hal mengenai latar belakang keluarga serta pergaulan anak muda pada umumnya untuk menilai apakah saya sebagai pribadi yang mandiri bisa hidup dalam komunitas kecil mahasiswa yang beragam serta berbeda asal, budaya dan agama bahkan aliran politik. Baru belakangan saya sadari setelah keluar dari Asrama Realino betapa besar arti hidup rukun dan guyub dalam keberagaman dalam bingkai kesatuan keluarga Asrama Realino. Kehidupan di Realino membangun kesadaran menerima orang lain yang berbeda dari kita sendiri serta hidup bersama dengannya di suatu lingkungan kehidupan kekeluargaan. Benar benar terasa dan mengalir dalam diri setiap penghuni asrama bertumbuh dan berkembang ke-Indonesia-an yang “Bhinneka Tunggal Ika” dijiwai oleh semangat “Sapientia et Virtus”. Asrama Realino adalah wadah nyata dari Indonesia Mini. Inilah yang menjiwai setiap alumnus Realino sampai saat ini dalam menjalani kehidupan sebagai warga Negara Indonesia.

Saya merasakan itu dalam tindakan dan sikap pergaulan dengan sesama anak bangsa kelak dalam pergaulan di masyarakat dan di aktifitas profesi di lingkungan Pemerintahan dan masyarakat internasional. Terkadang terjadi “benturan budaya” (*cultural shock*) dalam pergaulan keseharian, namun berbagai konflik antar penghuni asrama yang lazim terjadi berakhir dengan canda dan tawa dimana konflik berubah menjadi candaan yang justru mempererat silaturahmi khas Realino. Misalnya sapaan khas apabila ada orang tua penghuni berkunjung ke asrama, maka yang diteriakkan dengan lantang adalah nama orangtua penghuni tersebut. Sang tamu kaget setengah mati namanya diteriakin memanggil anaknya penghuni asrama. Saya sedikit “shock” melihatnya. Candaan cemoohan dan yang berbau “saru” disikapi sebagai hal yang biasa dalam kehidupan bersama, termasuk panggilan khas bersifat “jorok” kepada pribadi tertentu. Semuanya mewarnai kehidupan dengan toleransi yang tinggi dan persaudaraan yang kental. Pesta Kamar misalnya adalah suatu kejadian peristiwa dimana hukum tidak tertulis mengatakan bahwa penghuni yang pulang dari daerah/kota asal wajib membawa oleh-oleh yang menjadi ajang rebutan sengit yang menimbulkan “kegaduhan” namun dinikmati sebagai pesta yang sangat meriah meski oleh-oleh berserakan dilantai akibat rebutan yang sangat riuh. Justru itulah yang dirindukan apabila sesama mantan penghuni asrama berjumpa dalam reuni. Pesta kamar ala Asrama sudah dikemas lebih “civilised” berhubung para eks penghuni sudah menjadi orang-orang yang mapan.

Selama tinggal di Asrama Realino dan hidup dalam suasana kebersamaan dalam berbagai kegiatan belajar, olah raga, seni dan teristimewa beragam pesta dari pesta kamar sampai pesta besar ulang tahun dan lustrum asrama yang dijiwai oleh “Sapientia et Virtus” saya berkesimpulan bahwa setiap penghuni asrama membangun dalam kegiatan keseharian di asrama empat nilai mendasar yang telah membangun integritas pribadi yang saya rasakan; mencakup **Menghargai Perbedaan, Membina**

Kebersamaan, Menumbuhkan Kepedulian, yang menyatu dalam melatih kualitas **Kepemimpinan** dalam diri pribadi yang kelak sangat berguna sebagai modal dasar dalam pergaulan ditengah tengah masyarakat. Diskusi diskusi dalam forum Realino Discussion Club(RDC) yang rutin dilaksanakan dengan peran aktif sebagai pembicara, penyanggah dan moderator diskusi adalah latihan yang sangat berguna membangun kemampuan berfikir logis serta kritis, runtut diiringi argumen yang ditopang oleh opini berbasis data dan realitas. Saya sangat merasakan manfaat dari latihan RDC itu sesudah aktif di Pemerintahan yang harus mampu meyakinkan mitra kerja dari berbagai unit organisasi di Pemerintahan untuk menerima argumen yang saya sampaikan mewakili kepentingan unit kerja saya. Secara tidak langsung di RDClah saya menerima pelatihan dasar dari negosiasi dan diplomasi di fora internasional baik bilateral maupun multilateral.

Pengalaman yang tidak terlupakan sewaktu tinggal dan hidup di Asrama Realino adalah saat terjadi peristiwa G30S/PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 di pagi hari, seperti biasa sesudah sarapan pagi di refter, kami berkumpul di aula Villa Utara dan Selatan antara lain mendengarkan radio serta membaca koran dinding. Betapa terkejutnya mendengar siaran RRI Jakarta tentang terjadinya upaya kudeta “Dewan Jenderal” dan telah berhasil ditumpas oleh pasukan Angkatan Darat yang dimotori oleh Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa. Tidak jelas keberadaan Presiden Sukarno. Suasana tegang penuh ketidak pastian merebak diantara kami dan saling bertanya “Apa yang sedang terjadi?” Kami berupaya mencari berbagai informasi sepanjang siang dan sore hari tgl 1 Oktober 1965 melalui saluran radio BBC dan ABC namun tidak menemukan jawaban. Siangnya keluar pengumuman di RRI bahwa telah dibentuk Dewan Revolusi dibawah kepemimpinan Letkol Untung yang mengambil alih kekuasaan militer dan pemerintahan. Seingat saya menjelang sore keluar pengumuman dari RRI Jogjakarta dari Dewan

Revolusi Yogyakarta yang juga telah mengambil alih kekuasaan militer dari Korem Pamungkas dan telah “mengamankan” komandannya yang reaksioner antek Dewan Jenderal. Kepada masyarakat diumumkan untuk menaati perintah-perintah Dewan Revolusi Daerah. Dijalan-jalan mulai bergerak kendaraan-kendaraan militer. Pemimpin Asrama mengumpulkan kami untuk siaga dan tetap tinggal di asrama.

Malamnya susasana asrama gelap gulita karena listrik mati dan entah mengapa mesin diesel tidak bisa hidup. Di kegelapan malam, kami semua berkumpul dilapangan basket Vila Utara memantau siaran radio dari radio transistor milik Romo de Blot. Semakin jelas informasi bahwa telah terjadi pengambil-alihan kekuasaan pemerintahan oleh Dewan Revolusi di tingkat pusat dan ditingkat daerah dibentuk Dewan revolusi Daerah.

Kejadian itu berdampak sangat luas dikemudian hari dilingkungan asrama dan Universitas Gadjah Mada pada umumnya. Dewan Revolusi gagal dan berhasil ditumpas dan beberapa hari kemudian terbongkarlah nasib pimpinan Angkatan Darat yang terbunuh dan dikubur di Lubang Buaya. Keberadaan Bung Karno di Halim Perdanakusuma serta apa yang terjadi pada dirinya tetap misteri. Terjadi “*chaos*” dilingkungan Universitas Gadjah Mada dan pasukan tentara yang pro Dewan Revolusi di Jogjakarta dan Jawa Tengah ditumpas oleh pasukan RPKAD dan para milisi bentukannya. Perkuliahan tutup hampir 1 sampai 2 tahun lamanya karena akibat “pembersihan” di lingkungan UGM. Teman-teman para aktifis mahasiswa yang beafiliasi ke aliran komunisme tiba-tiba “menghilang”. Salah satu korbannya adalah rekan penghuni asrama. Pasukan RPKAD ikut membawa para aktifis mahasiswa gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam menumpas G30S PKI di bulan Oktober Nopember 1965. Asrama Realino kedatangan beberapa orang tamu tokoh dan aktifis mahasiswa PMKRI yang menginap di asrama Villa Utara. Mereka bersenjata pistol otomatis yang terselip dipinggian dan mereka berpakaian loreng. KAMI Jogja segera terbentuk dan

mulailah “perburuan” terhadap “musuh” berdampak sangat luas pada para mahasiswa yang secara kebetulan anggota CGMI dan GMNI. Saat itu GMNI pecah dan saling menghabisi antara GMNI “ASU” yang dicap “kiri” melawan GMNI “Osa Usep” yang dicap “kanan”. Para mahasiswa yang masuk golongan GMNI kiri dibersihkan dari kampus. Organisasi mahasiswa berbasis agama menjadi motor KAMI Jogjakarta membantu tentara membersihkan Jogjakarta dan sekitarnya dari kekuatan komunis. Cerita mengenai ratusan korban sepanjang rel kereta api Jogja Klaten dan “pembantaian” ribuan kaum yang ditengerai komunis dan simpatisannya di pulau Jawa dan Bali menjadi perbincangan dari mulut ke mulut dan menjadi torehan sejarah Indonesia diwarnai berbagai peristiwa pada bulan Oktober Nopember 1965 yang melahirkan rejim Orde Baru.

Asrama Realino berangsur sepi karena para penghuninya yang berasal dari kota-kota di pulau Jawa memilih pulang kampung karena perkuliahan di UGM terhenti dan tinggallah para penghuni asrama yang berasal dari luar pulau Jawa. Kiriman dari orangtua menjadi seret alias terganggu karena kekacauan komunikasi. Beruntung kami yang tinggal di asrama yang tetap mendapat dukungan Romo dan Gereja Katolik. Teman-teman mahasiswa dari daerah kebanyakan menjadi aktifis KAMI yang disokong oleh tentara. Saya masih ingat kelompok aktifis KAMI rutin menyambangi KOREM di siang dan malam hari untuk mendapat nasi bungkus. Bulan-bulan Oktober, Nopember dan Desember adalah bulan penderitaan karena tidak menentunya kiriman dari kampung. Suasana asrama tetap rukun dan guyub dan saling menopang satu sama lain. Kesulitan dan ancaman dihadapi bersama.

Segara setelah peristiwa 1 Oktober 1965 itu, penghuni asrama bersama penduduk Mrican membentuk garda keamanan bersama. Maka kami para penghuni secara bergiliran ikut jaga dan ronda terutama pada malam hari berkeliling bersama penduduk Mrican, berkeliling kampung pemukiman sampai asrama Novis suter

suster diutara Realino. Dengan bermodalkan lampu senter dan lampu sentir dan kentongan bambu kami ikut ronda berkeliling kampung Mrican. Saat itu Jalan Gejayan sekitar asrama sampai jauh ke utara masih kampung dan saat itu. Penerangan listrik tidak ada di Mrican. Segala cerita “keberanian” dan ‘kepengecutan” beredar yang dikemas menjadi bahan lelucon dan tawaan. Belakangan diketahui bahwa kampung Mrican adalah basis PKI dan betapa kagetnya kami bahwa beberapa kawan ronda malam dicituk dan kemudian tidak ketahuan rimbanya. Benar benar keadaan gelap penuh ketidak pastian mengenai suasana politik dan keamanan seputar asrama.

Rangkaian peristiwa dan suasana asrama saat menegangkan seputar peristiwa G30S itu tidak akan pernah terlupakan.

Keberadaan Asrama Realino terutama dalam kurun waktu sejak berdiri sampai tahun 1970-an sangat mendukung kehidupan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Secara demografi, rata rata mahasiswa UGM berasal dari daerah daerah di seluruh Indonesia dan berasal dari keluarga sederhana. Pada masa itu hampir tidak kelihatan mahasiswa “borjuis alias kaya”. Asrama Mahasiswa Realino sebagai lahan misi pelayanan pastoral Gereja Katolik sangat berarti. Realino telah dengan sukses menjalankan misi pelayanan yang mengedepankan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Misi itu sudah berhasil membangun dan mempererat kebersamaan dalam bereagaman para pemuda calon calon pemimpin bangsa dilingkungannya. Realino telah berhasil menanamkan kedisiplinan para pater Jesuit kepada para mahasiswa penghuni asrama yang pada gilirannya akan membangun karakter tangguh menghadapi segala permasalahan hidup di dunia nyata. Kesimpulan saya adalah bahwa Asrama Realino sangat relevan pada zaman itu. Apakah masih relevan sistim pelayanan mahasiswa seperti itu zaman sekarang dan yang akan datang? Menurut saya relevansinya diukur dari kebutuhan nyata dari para mahasiswa zaman dan lingkungan Universitas zaman now. Misi pelayanan kasih gerejawi

seyogyanya dikemas dalam wujud yang diperlukan pada tiap zaman. Pelayanan yang sangat berarti dalam setiap zaman kehidupan kemahasiswaan menurut nalar saya lebih diutamakan pada bantuan beasiswa dan riset untuk mahasiswa berprestasi. Kehidupan di asrama model Asrama Realino mungkin sudah tidak relevan lagi karena tata kehidupan telah berubah sesuai perkembangan zaman. Kebersamaan dalam keberagaman dengan kegiatan dan sasaran kongkrit sudah pasti akan memperkuat rasa persatuan bhinneka tunggal ika bangsa Indonesia.

Inilah sekedar catatan yang dapat saya tulis sebagai mantan penghuni Asrama Realino antara tahun 1964 sampai dengan tahun 1968.

**BAGIAN KELIMA:
Sila Pertama Pancasila Dan
Trinitas**

“Sila Pertama Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia sedangkan Trinitas merupakan ideologi umat Kristiani”.”

Bab 5

Masa Study S2 Di Universitas Indonesia

Sila Pertama Pancasila Coba Dibenturkan

Latar Belakang

Fenomena melemahkan Pancasila akhir – akhir ini semakin kelihatan ditengah masyarakat, seperti mengulang sejarah ketika penulis masih duduk di sekolah SR (SD) tepatnya waktu tinggal di kampung Tempel Kisaran 65 tahun yang lalu, ternyata usaha-usaha melemahkan Pancasila khususnya BHINNEKA TUNGGAL IKA itu berulang kembali di era Reformasi dengan terjadinya konflik – konflik yang berbau SARA seperti penutupan rumah - rumah ibadah dan mengkafir – kafirkan orang dan kelompok masyarakat yang tidak seairan. Konflik ini penulis amati diawali dengan Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 dan puncaknya pada Pemilu Presiden RI 2019. Ini sungguh, mengkhawatirkan akan terjadinya konflik horizontal (benturan) ditengah masyarakat.

Benarkah Agama Kristen Bertentangan dengan Pancasila ?

Pelemahan Pancasila itu terlihat dari serangan Dr. Eggi Sujana, SH, MH, aktifis dan pemimpin demo yang termasuk tokoh pendukung Capres Prabowo (02), dalam demonya mempermasalahkan dan mempertentangkan antara Pancasila

dengan ajaran dan keyakinan Agama Kristen tentang TRINITAS, beliau mengatakan bahwa agama Kristen di Indonesia harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila sila pertama. Untunglah Prof. Dr. Mahfud MD sebagai Cendekiawan muslim, negarawan dan mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi) memberikan bantahan dan tanggapan terhadap pernyataan Eggi Sujana tersebut dalam artikelnya yang berjudul Eggi Sujana, Ormas, dan Konsep Trinitas.

Trinitas Bukan Ideologi Negara

Untuk tidak mengurangi dan salah tafsir terhadap pernyataan Eggi Sujana tersebut, penulis kutip artikel Prof. Mahfud MD secara utuh /lengkap sebagai berikut.

Eggi Sudjana, Ormas, dan Konsep Trinitas

Oleh: Mahfud MD

Saya tidak mendedikasikan tulisan ini kepada Eggi Sudjana secara khusus tetapi juga kepada semuanya saja, yang sekedar ingin tahu mengenai konsep Trinitas dalam Kristen.

Benarkah Umat Kristen menyembah Tiga Tuhan?

Dan benarkah hal itu bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama?

Saya tahu Eggi Sudjana sedang sangat sibuk.

Sibuk mengklarifikasi.

Tetapi semoga saja beliau mau meluangkan waktunya barang sebentar, mungkin sebelum tidur untuk membaca tulisan ini.

Ini penting agar Eggi Sudjana menjadi tahu.

Tulisan ini adalah bentuk uji intelektual atas pengetahuan ES yang mungkin terbatas itu atas konsep Ketuhanan Yang Maha Esa.

(Untuk selanjutnya penulisan nama Eggi Sudjana akan saya singkat menjadi ES. Singkat dan bikin adem).

Ormas vs Agama resmi di Indonesia

Setelah membaca dengan agak komprehensif Perppu 2/2017, saya tidak menemukan hal-hal yang membatasi ruang gerak Ormas.

Intinya, asalkan Ormas itu tidak mengganggu ketertiban umum dalam hal apapun dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, tak ada yang perlu dirisaukan.

Berdakwah menyebarkan agama dipersilahkan oleh negara asal sesuai dengan ketentuan.

Tapi kalau mau mengotak-atik sistem negara dengan dakwah dan paham yang bertentangan dengan ideologi negara, negara melarang.

Lalu ES mengkaitkan Perppu 2/2017 ini dengan sila pertama dalam Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi ES sila pertama itu berarti Tuhan yang SATU.

Bahwa ajaran selain Islam bertentangan dengan Pancasila.

Karena menyembah banyak Tuhan.

Tidak satu Tuhan seperti Islam.

“Kristen itu Tritunggal,

Hindu Trimurti dan

Budha..bla bla bla...

Nah, konsekuensi hukum dari Perppu Ormas itu menurut ES, jika Perppu itu diterima, maka ajaran selain Islam harus dibubarkan,” demikian kurang lebih kata ES.

Pengetahuan ES itu keliru.

Alasannya sangat sederhana.

Pertama:

Perppu 2/2017 ini sebenarnya diperuntukan untuk Ormas-Ormas yang paham dan ajarannya oleh pemerintah dianggap berbahaya bagi NKRI.

Mengancam Bhineka Tunggal Ika.

Ingin mengganti ideologi bangsa.

Dalam hal ini adalah Ormas HTI.

Ormas HTI ini jelas melandaskan diri pada salah satu ajaran Islam.

Terbukti ide tentang khilafah itu dan HTI sendiri ditolak oleh MUI.

Apakah karena FPI yang katanya berlandaskan Islam, jika berbuat anarkis lalu Islam yang dibubarkan?

Tidakkan....

HTI ini Ormas yang ingin menegakkan salah satu ajaran Islam mengenai Khilafah.

Tetapi sekaligus pula bahwa di Indonesia tafsir mengenai ide Khilafah itu tidak lagi cocok.

Kenapa?

Karena Indonesia bukan negara Islam.

Jadi apalagi yang mau dibela soal HTI ini, sementara begitu banyak negara Islam di Timur Tengah yang menolak HTI.

Itu yang pertama.

Kedua:

Agama-agama yang disebut ES di Indonesia: Kristen, Hindu dan Budha, dan Islam sendiri, diakui oleh negara.

Ini berarti bahwa agama-agama yang disebut ES itu tidak membahayakan ideologi bangsa.

Tidak berpotensi menghancurkan keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, negara menjamin hak-hak beragama bagi semua pemeluk agama yang sah itu, agama yang diakui oleh negara.

Jadi sangat keliru kalau ES mengatakan bahwa ajaran selain Islam harus dibubarkan bila Perppu 2/2017 diterima.

Dua hal ini tidak sinkron.

Tidak nyambung.

Ajaran atau paham itu sumbernya dari Agama.

Bukan Agama yang bersumber dari ajaran.

Agama itu induk yang melahirkan ajaran-ajaran.

Ajaran itu juga harus ditafsirkan sesuai jaman.

Ajaran boleh dihapus jika tidak sesuai dengan kontak jaman.

Misal, dalam Islam hukum berjinah adalah rajam sampai mati.

Nah, apakah hukum rajam itu sesuai dengan kontek masa kini dan di Indonesia?

Jawabannya tentu saja tidak lagi relevan.

Oleh sebab itu, bentuk hukum itu tidak dipakai di Indonesia.

Sampai di sini paham ya, ES.

Ketiga:

HTI itu adalah Ormas dengan paham radikal.

Kenapa saya sebut radikal?

Karena ingin mengubah dasar negara kita.

Yang tujuannya jelas mengancam kedaulatan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

HTI dengan sangat gamblang dan vulgar menolak demokrasi, mengatakan demokrasi itu haram.

Menolak negara bangsa.

Pemimpin tidak dipilih oleh demokrasi dan DPR tetapi oleh alim Ulama.

“Itu sudah clear:

Gerakan mereka memasukkan ideologi Khilafah mengganti Pancasila,” kata Prof. Mahfud.

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/918922-mahfud-md-hti-memang-ingin-mengganti-Pancasila>.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/05100001/menurut-mui-ideologi-dan-aktivitas-hti-bertentangan-dengan-Pancasila>
a.

Oke, jika sistem Khilafah itu merupakan ajaran Islam.

Tetapi para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara bangsa.

Dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai

ideologinya. Tidak bisa ideologi itu diganggu gugat.

Dengan kata lain tak ada ruang bagi Khilafah di Indonesia.

Sistem Khilafah itu kan hanya salah satu dari sekian ajaran Islam, yang ternyata tidak cocok di Indonesia.

Masih banyak ajaran-ajaran Islam lainnya yang baik, yang bisa selaras dengan ideologi bangsa.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam yang telah membuktikan keselarasan Islam dengan ideologi bangsa ini.

Jadi kesimpulan sementara adalah:

ES tolong bedakan antara ajaran dengan Agama.

Dalam agama ada banyak sekali ajaran-ajarannya, paham-pahamnya.

Tidak boleh satu ajaran agama keliru lalu agamanya dibubarkan.

Apalagi dasar pembubaran hanya karena konsep ke-Esa-an Tuhan.

Dan yang pasti dalam Sila Pertama negara tidak pernah mempersoalkan konsep keTuhanan dalam setiap agama yang dianut oleh warga negara.

Yang ditekankan oleh negara adalah berTuhan dalam konsep masing-masing agama.

Mau Tuhannya tiga kek, lima kek, bukan urusan negara sejauh tidak bertentangan dengan ideologi bangsa.

Yang dipersoalkan negara melalui Perppu 2/17 inikan soal Ormas yang berpaham radikal, ajaran Khilafah HTI yang ingin mengganti ideologi bangsa, mengancam NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Itu pointnya.

Tidak hanya paham dan ajaran HTI kan yang dilarang.

“ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jelaskan pak ES!!

<https://news.detik.com/berita/d-3557287/larangan-untuk-Orma-s-di-Perppu-217-jadi-lebih-luas-ini-isinya>

Konsep Tritunggal dalam Kekristenan: Allah yang satu dan Esa

Nah, ini yang penting.

Point inilah yang menjadi dasar ucapan ES bahwa ajaran selain Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa.

Bahwa Tuhan dalam agama Kristen itu ada tiga maka bertentangan dengan Pancasila yang didefinisikan ES sebagai Tuhan yang tunggal dengan kata ESA.

“Ketuhanan yang Maha Esa” ini tidak lantas berarti Tuhan yang satu. Bahwa setiap orang harus ber-satu Tuhan dalam agama yang harus agama monoteis.

Dalam bahasa sangsekerta satu bukanlah ESA melainkan EKA. Karena Frasa Tuhan yang Maha dan Esa jika diartikan Tuhan Yang Maha Satu, kan kurang cocok, kalau mengikuti pikiran ES. Harusnya Tuhan yang Maha Eka, bukan Maha ESA.

Ini juga hendak menegaskan bahwa seharusnya jika titik berat pada sila pertama ini adalah Tuhan yang satu.

Seharusnya sila pertama ini berbunyi “Tuhan Yang Maha Esa (EKA)”.

Karena awalan ke dan akhiran an pada kata ‘Ketuhanan’ memberi makna baru pada kata itu.

Kata “Maha” (sansekerta) berarti mulia dan besar.

Besar ini bukan dalam satuan ukuran. Melainkan merujuk pada sesuatu yang lebih dari besaran dalam satuan ukuran. Pahami kalau saya sebut Tuhan Maha Pengasih?

Artinya adalah kasih dari Tuhan itu tak terbatas.

ESA/Etad (sansekerta) kata itu lebih menitikberatkan pada arti keberadaan Tuhan itu sendiri.

Sedangkan kata Ketuhanan: diberi awalan ke- dan akhiran an.

Ini otomatis memberi makna yang baru pada kata itu yakni: mengalami hal dan atau merujuk pada sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan.

Jadi Ke-tuhan-an yang Maha Esa kurang lebih dapat diartikan bahwa kita harus beriman pada Tuhan yang memiliki sifat adil, baik, mulia, bijaksana.

Sifat Tuhan yang Maha Mulia, maha Agung, Maha segalanya. Percaya bahwa Tuhan itu ada.

Dengan percaya kepada Tuhan penganutnya diharapkan memiliki rasa adil dan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesamanya.

Jadi pak ES, Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak bisa merujuk pada jumlah Tuhan hanya karena kata “Esa”.

Bahwa Tuhan yang disembah harus satu. Tetapi kepada beriman kepada Tuhan.

Tidak ateis!

<https://oktavianipratama.wordpress.com/matakuliah-umum/ke-warganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/>

Sekarang kita ke persoalan Trinitas.

Ini agak berat pak ES. Jadi simak baik-baik.

Sebenarnya konsep Trinitas ini tidak mudah dipahami.

Juga oleh penganut agama Katolik itu sendiri.

Mereka kadang kesulitan memahami, mencerna dan bagaimana menjelaskan Trinitas ini.

Satu Tuhan dalam tiga pribadi.

Nah, apalagi orang yang bukan Katolik.

Inti paling mendasar dalam beragama Katolik itu adalah iman.

Keterbukaan hati dan kemauan untuk mengakui keterbatasan akal manusia sangat penting untuk dapat memahami sedikit misteri Allah.

Namun bukan berarti bahwa iman itu tidak logis atau tidak dapat diterima akal budi pikiran manusia.

Demikian pula konsep Trinitas. Bukan berarti konsep itu tidak masuk akal. Ia dapat dijelaskan. Namun butuh peran serta iman dalam menjelaskan-Nya. Karena Tuhan itu Maha. Tak sanggup akal manusia menjelaskan misteri Tuhan.

Analogi matahari mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang konsep Trinitas ini.

Lihatlah Matahari.

Matahari hanya SATU. Tetapi terdiri dari cahaya dan panasnya. Cahaya dan panas matahari memiliki peran (pribadi) yang berbeda. Tetapi Matahari itu tetaplah Matahari yang SATU.

Bisakah kita memisahkan cahaya dari Matahari?

Atau memisahkan panas matahari dari Matahari itu?

Kita berterimakasih kepada cahaya matahari:

“terima kasih cahaya, berkat kamu saya bisa melihat keindahan sekeliling saya dan dunia ini”.

Nah, apakah dengan berterimakasih kepada cahaya itu kita lalu menaifkan, mengesampingkan Matahari itu sendiri?

Tidakkan?

Berterimakasih kepada cahaya secara otomatis pula berterima kasih kepada Matahari, yang telah memberikan cahayanya ke dunia ini.

Ingat ini adalah analogi yang sangat sederhana dan terbatas untuk menjelaskan ke-Maha-an Allah Tritunggal.

Ajaran atau konsep Trinitas ini tidak asal muncul begitu saja.

Melainkan memiliki dasar yang kokoh dalam Kitab Suci dan Ajaran Gereja: Dogma.

Untuk menjelaskan mengenai konsep Trinitas ini, saya akan mengutip cukup banyak dari <http://www.katolisitas.org/trinitas-satu-tuhan-dalam-tiga-pribadi/>. dengan tidak merubah atau menambah kata. Silahkan mempir ke situs tersebut untuk mempelajari hal ini dengan lebih

komprehensif.

““Aku dan Bapa adalah satu” (Yoh 10:30); “Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa...” (Yoh 14:9).

Yesus juga menyatakan keberadaan Diri-Nya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia (lih. Yoh 17:5).

Kristus adalah sang Sabda/Firman, yang ada bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah, dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan (Yoh 1:1-3).

Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu, jika Ia bukan Allah sendiri.

“Selain menyatakan kesatuan-Nya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuan-Nya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikan-Nya kepada para murid-Nya dan disebut-Nya sebagai Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, (lih. Yoh 15:26).

Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab Ia adalah Kebenaran (lih. Yoh 14:6).”

“Selanjutnya, kita melihat pengajaran dari para Rasul yang menyatakan kembali pengajaran Yesus ini, contohnya Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman (yang adalah Yesus Kristus), dan Roh Kudus adalah satu (lih. 1 Yoh 5:7); demikian juga pengajaran Petrus (lih. 1 Pet:1-2; 2 Pet 1:2); dan Paulus (lih. 1Kor 1:2-10; 1Kor 8:6; Ef 1:3-14). Rasul Paulus”

Juga dari sejarah gereja: Dogma Tentang Tritunggal Maha Kudus “Konsili Nicea (325): Credo Nicea:

“...Kristus itu sehakikat dengan Allah Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar...”

Berikut ini adalah Dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik, yang telah berakar dari jaman jemaat awal:

Tritunggal adalah Allah yang satu.

((Lihat KGK 253))

Pribadi ini tidak membagi-bagi ke-Allahan seolah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah 'sepenuhnya dan seluruhnya'.

Bapa adalah yang sama seperti Putera, Putera yang sama seperti Bapa dan Bapa dan Putera adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama.

Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putera, seluruhnya ada dalam Roh Kudus;

Putera seluruhnya ada di dalam Bapa dan seluruhnya ada dalam Roh Kudus; Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa, dan seluruhnya di dalam Putera.

Ketiga Pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya:

yaitu Allah Bapa yang 'melahirkan',

Allah Putera yang dilahirkan,

Roh Kudus yang dihembuskan.

((Lihat KGK 254))

Ketiga Pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya.

Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan Ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar Pribadi Allah tersebut.

Bapa dihubungkan dengan Putera, Putera dengan Bapa dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya.

Hakekat mereka adalah satu, yaitu Allah.

((Lihat KGK 255))

Selain dari Kitab Suci dan Dogma gereja sebagai dasar konsep Trinitas ini, yang sekaligus pula menjelaskannya, Filsafat yang sangat erat kaitannya dengan akal budi juga bisa dipakai untuk menjelaskan hal ini: Arti 'substansi/ hakekat' dan 'pribadi':

Mari kita lihat pada diri kita sendiri. 'Substansi' (kadang diterjemahkan sebagai hakekat/ kodrat) dari diri kita adalah 'manusia'.

Kodrat sebagai manusia ini adalah sama untuk semua orang. Tetapi jika kita menyebut ‘pribadi’ maka kita tidak dapat menyamakan orang yang satu dengan yang lain, karena setiap pribadi itu adalah unik. Dalam bahasa sehari-hari, pribadi kita masing-masing diwakili oleh kata ‘aku’ (atau ‘I’ dalam bahasa Inggris), di mana ‘aku’ yang satu berbeda dengan ‘aku’ yang lain. Sedangkan, substansi/ hakekat kita diwakili dengan kata ‘manusia’ (atau ‘human’).

Analogi yang paling mirip (walaupun tentu tak sepenuhnya menjelaskan misteri Allah ini) adalah kesatuan antara jiwa dan tubuh dalam diri kita.

Tanpa jiwa, kita bukan manusia,
tanpa tubuh, kita juga bukan manusia.

Kesatuan antara jiwa dan tubuh kita membentuk hakekat kita sebagai manusia dan dengan sifat-sifat tertentu membentuk kita sebagai pribadi.

Dengan prinsip yang sama, maka di dalam Trinitas, substansi/hakekat yang ada adalah satu, yaitu Tuhan, sedangkan di dalam kesatuan tersebut terdapat tiga Pribadi: ada tiga ‘Aku’, yaitu Bapa, Putera dan Roh Kudus.

Tiga pribadi manusia tidak dapat menyamai makna Trinitas, karena di dalam tiga orang manusia, terdapat tiga “kejadian”/ ‘instances’ kodrat manusia; sedangkan di dalam tiga Pribadi ilahi, terdapat hanya satu kodrat Allah, yang identik dengan ketiga Pribadi tersebut.

Dengan demikian, ketiga Pribadi Allah mempunyai kesamaan hakekat Allah yang sempurna, sehingga ketiganya membentuk kesatuan yang sempurna.

Yang membedakan Pribadi yang satu dengan yang lainnya hanyalah terletak dalam hal hubungan timbal balik antara ketiganya.

((Lihat KGK 252.))

Memang pada akhirnya, Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman, karena ini adalah suatu misteri

((KGK 237.)),

meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut.

Manusia dengan pemikiran sendiri memang tidak akan dapat mencapai pemahaman sempurna tentang misteri Trinitas, walaupun misteri itu sudah diwahyukan Allah kepada manusia.

Namun demikian, kita dapat mulai memahaminya dengan mempelajari dan merenungkan Sabda Allah dalam Kitab Suci, pengajaran para Bapa Gereja dan Tradisi Suci yang ditetapkan oleh Magisterium (seperti hasil Konsili), juga dengan bantuan filosofi dan analogi seperti diuraikan di atas.

Selanjutnya, pemahaman kita akan kehidupan Trinitas akan bertambah jika kita mengambil bagian di dalam kasih Trinitas itu, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan.”

Masih cukup panjang sebenarnya penjelasan mengenai konsep Trinitas ini.

Butuh waktu khusus agar ES bisa mengerti.

Tapi baiklah, dari tulisan singkat ini seharusnya ES menjadi dan pembaca sekalian menjadi tahu bahwa kristen tidak menyembah tiga Tuhan.

Umat Kristen menyembah SATU TUHAN dalam TIGA PRIBADI.

Agama Kristen itu adalah Agama Monoteis.

Menyembah SATU Tuhan, satu Allah.

Ajarannya mengenai Trinitas adalah misteri iman, iman kami.

Konsekwensi dari Kristen agama yang monoteis adalah agama kristen TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, seperti yang ES tuduhkan.

Saya menyadari bahwa kesalahpahaman ini lebih kepada

ketidaktahuan dan ketidaktahuan ES pada konsep Trinitas.

Tidak apa-apa.

Umat Kristen itu sudah “matang”.

Tak mudah marah. Hal-hal begini, kesalahpahaman seperti ini sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu.

Hanya sangat disayangkan hal ini terjadi mengingat bahwa ES adalah pengacara.

Sebuah profesi yang menuntut keluasan wawasan yang berbasis fakta dan data.

Dan Semoga ES paham.

Sekian...

Tanggapan Mahfud MD tersebut, Secara perlahan kemudian dimasukkan secara pandang bahwa integrasi atau kebersamaan dapat dihidupi atau ditopang oleh kesamaan agama atau sosial masyarakat saja.

Dari tanggapan Mahfud tersebut, sesungguhnya yang penulis lihat telah terjadi pencampur adukan antara pengertian Pancasila sebagai Pokok Kaidah Dasar Negara (Staat Fundamental Norm) dengan ajaran aliran agama (Kristen) yang dikaitkan dengan perebutan kekuasaan, artinya untuk melemahkan Pancasila instrument yang digunakan antara lain, PILGUB DKI Jakarta dan PILPRES RI 2014 dan 2019 yang lalu.

Dengan melihat problematik dan kekeliruan pemahaman yang selama ini terjadi, sudah saatnya untuk meninggalkan pemahaman yang keliru dan sikap apriori terhadap Pancasila. Perlu upaya terus menerus untuk mengembangkan pemikiran Pancasila ideologi dasar filosofi bernegara kedalam praksis politik, hukum, kebijakan pemerintah dan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa. Dengan demikian Pancasila menjadi acuan dan dasar bagi kesatuan Negara dan dasar dari persatuan masyarakat yang majemuk.

Pelemahan Pancasila di lingkungan Sekolah.

Pada saat tulisan ini sedang ditulis tepat tanggal 22 Juli 2019, jam 16.00 wib, TV Kompas memberitakan adanya kegiatan sekolah MAN 1 Sukabumi Prov. Jabar, melakukan latihan upacara penaikan bendera "Tauhid" bukannya bendera merah putih, yang membuat miris dan justru memunculkan keperhatian penulis melihat guru dan kepala sekolahnya yang tidak merasa bersalah dan malah didepan Kapolres Sukabumi mengatakan: "bahwa kegiatan anak muridnya merupakan kegiatan extra kurikuler". Sebagai anak bangsa yang memperjuangkan Kebhinnekaan Hidup di Tanah Air Indonesia dan menjunjung tinggi Pancasila agar hidup lestari di bumi Pertiwi ini sangat kecewa dan sedih melihat jawaban guru tersebut, malah sebagai seorang pendidik (dosen) membuat hati miris, kenapa kepala sekolah tersebut tidak melakukan pengawasan (controlling) terhadap kegiatan extra kurikuler ? Sebab bendera Tauhid yang akan dipakai untuk latihan itu secara logika sudah dipersiapkan sebelumnya, artinya tidak dadakan. Dan, kenapa pembina dan pelatih sudah tau kalau bendera Tauhid itu secara hukum tidak diperkenankan untuk dikibarkan di tanah air apalagi disekolah-sekolah SD, SMP dan SMA koq sepertinya ada unsur kesengajaan dan pembiaran?. Dan, klo memang itu merupakan kegiatan Extra Kurikuler kenapa sekolah MAN 1 itu tidak focus membangun nasionalisme kepada siswa didiknya melalui kegiatan kepramukaan ? Padahal Pramuka itu sebagai pembentuk karakter bangsa (Tajuk Rencana, Kompas 15 Agustus 2019). Kegiatan Pramuka bertujuan melatih kepemimpinan, kemandirian, disiplin, toferansi dan berbagai hal baik lainnya. Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada hari jadi ke 58 Gerakan Pramuka Indonesia di Cibubur Jakarta, mengatakan (Kompas, 15 Agustus 2019): bahwa gerakan pramuka diharapkan dapat membentuk karakter manusia Indonesia yang memberikan teladan untuk menyikapi keberagaman di Tana Air. Kekuatan dan kecakapan setiap anggota Pramuka diharapkan juga dapat menjaga kelestarian alam dan tumpa darah Indonesia. Dari Rahim Pramuka, akan

lahir generasi muda yang suka menolong, tabah, cinta tana air, berani dan siap mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan politik untuk mengenalkan dan mensosialisasikan/ menanamkan ideologi negara serta membangun nasionalisme itu harus “ sejak dini “ ditanamkan kepada anak didik, agar kelak anak didik tersebut tidak merasa asing dengan ideologi bangsanya sendiri. Seperti telah diigatkan Ki Hadjar Dewantara: Pilihara dan kuatkanlah rasa cinta nusa dan bangsa dalam hati sanubari murid-murid dan pelajar-pelajar dengan memasukkan semangat kebangsaan dalam segala pelajaran serta meghapuskan segala isi pengajaran yang dapat melemahkan semangat itu (Najelaa Sihab. 2016).

Sehingga tidak terjadi seperti kasus MAN 1 Sukabumi itu. Sekarang ini dikalangan mahasiswa ada yang tidak hapal bahkan tidak lancar mengucapkan sila-sila pancasila. Itulah sebabnya timbul kekhawatiran dikalangan masyarakat tentang menurunnya patriotism dan nasionalisme dikalangan generasi now. Dan, faktor-faktor itulah yang mendorong penulis untuk menulis buku ini, artinya kekekhawatiran terhadap generasi zaman now yakni lunturnya kebanggaan terhadap 4 pilar yakni ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang selama ini diperjuangkan para pendiri bangsa untuk tetap berdiri kokoh di Bumi Nusantara ini.

Kekeliruan Memandang dan Menafsirkan Pancasila

Dari pengamatan penulis, ada beberapa kelompok masyarakat yang melihat ideologi Pancasila tidak lagi sebagai pokok kaidah Negara dan jiwa nasionalisme bisa dikatakan menurun bahkan orang malu menyebut dirinya sebagai seorang “Pancasilais”. Timbul pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi dan apa sebabnya?. Padahal Pancasila (Median Sirait: 2008) adalah pandangan hidup bangsa, selain merupakan ideologi Negara.

Bung Karno menyebutkannya sebagai *weltanschauung* dan *phylososofise grondslag*. Pancasila lima sila, dengan masing-masing sila mempunyai fungsi yang pengaruh – mempengaruhi, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Secara harfiah ideologi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang gagasan – gagasan. Pancasila adalah suatu ideologi, yang mengandung wawasan dan gagasan yang menggambarkan suatu cita-cita. Sebagai ideologi, Pancasila dengan demikian merupakan suatu kerangka atau struktur bangunan yang tersusun dari nilai – nilai, gagasan – gagasan azasi fundamental tentang manusia, yang membentuk suatu sistem. Dan dalam kedudukan sebagai ideologi itu Pancasila menjadi dasar bagi gagasan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Dalam pengertian Pancasila, bila sila – silanya dikatakan kait mengait satu sama lain, itu berarti secara keseluruhan ia bersifat struktural dan fungsi – fungsi dari masing – masing sila itu berjalan dan berpengaruh satu kepada yang lain. Sila kesatu dan kedua terpadu sebagai satu nilai spiritual dasar, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan kesatuan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ketiga, yakni sila persatuan nasional, yang disambungkan dengan pengertian *bhinneka tunggal ika*, menjadi bagian struktur, yang ditopang oleh nilai spiritual tadi. Dengan dasar spiritual itu, persatuan nasional menjadi cita-cita karena fakta kebhinnekaan. Sebaliknya, karena kebhinnekaan tampil persatuan nasional, menjaga bangsa yang memiliki kemajemukan ini tetap utuh sebagai satu bangsa. Dalam persatuan nasional ini terkandung pengertian kesatuan wilayah, patriotisme, cinta tanah air, cinta tanah tumpah darah, ibu pertiwi serta kebanggaan nasional.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini merupakan gagasan penyelenggaraan Negara yaitu kerakyatan atau demokrasi dan keadilan sosial adalah demokrasi yang sesuai

dengan budaya Indonesia dijalankan dengan cara musyawarah. Dalam pengertian musyawarah terdapat pengertian terkait dengan persaudaraan dalam menjalankan demokrasi. Dengan prinsip persaudaraan maka berlaku mekanisme musyawarah dalam pengambilan – pengambilan keputusan mengenai hal – hal yang merupakan kepentingan bersama.

Dikaitkan dengan faktor persaudaraan yang akarnya sebenarnya cukup kuat dalam budaya Indonesia, beberapa fenomena dalam praktek politik di Indonesia saat ini perlu diamati lebih jauh. Fenomena itu berupa makin menguatnya sikap lebih mengutamakan aspek hak dan kebebasan sebagai individu atau kelompok daripada aspek kewajiban, tanggung jawab dan solidaritas sebagai satu bangsa.

Termasuk dalam gagasan penyelenggaraan Negara, selain demokrasi adalah yang tertuang dalam sila kelima, yaitu mengenai keadilan sosial. Pertanyaannya kenapa keadilan sosial ?. Tak lain adalah karena kita menganut nilai – nilai kemanusiaan sebagai bangsa yang berkeTuhanan. Harkat dan martabat manusia, hanya bisa terjaga bila ada keadilan sosial bagi semua, dibidang sosial ekonomi selain dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Itulah sebabnya untuk kepentingan persatuan nasional dalam kebhinnekaan, Indonesia tidak mungkin dikelola secara otoriter, melainkan melalui cara – cara yang demokratis yang mengindahkan kemanusiaan untuk menjamin kepentingan seluruh unsur bangsa.

Dari uraian diatas dikaitkan dengan era reformasi sekarang ini, gejala keengganan terhadap Pancasila di sebagian masyarakat, diperkuat lagi oleh sikap dan pemikiran elite politik pemerintah dan Negara, yang tampaknya juga tidak lagi terlalu melihat Pancasila sebagai acuan pandangan dalam penyelesaian berbagai masalah pemerintahan di pusat maupun daerah, serta masalah kenegaraan pada umumnya. Kemunduran apresiasi terhadap ideologi Pancasila itu tercermin dalam berbagai fenomena berupa keengganan membahas relevansinya dalam

masyarakat dan juga dalam unsur pimpinan pemerintah dan Negara. Bila latar belakang persoalan – persoalan tersebut ditelusuri lebih lanjut, itu semua terkait dengan beberapa kekeliruan pemahaman mengenai ideologi Pancasila yang berkembang dewasa ini.

Dari analisa diatas penulis sependapat dengan Median sirait bahwa paling tidak ada empat kekeliruan dan kesalah pahaman (Median Sirait: 2008) yakni:

Kekeliruan pertama adalah kekeliruan dalam melihat hubungan nilai dan praksis Pancasila dalam masyarakat. Pelaksanaan Pancasila tidak memberikan solusi atas persoalan obyektif bangsa yang sangat mendesak, yaitu tuntutan rakyat untuk segera mendapatkan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kekeliruan kedua, adalah dalam melihat sejarah politik Indonesia umumnya. Kekeliruan ini berpangkal pada kesalahan pemahaman konteks politik Indonesia yang telah berlangsung. Dalam pemahaman ini terjadi penyamaan nilai – nilai Pancasila dengan suatu rezim politik atau orde pemerintahan. Pancasila diidentikkan dengan pemerintahan orde baru dengan segenap kekuasaan presiden Soeharto, dan juga segala jenis indoktrinasinya. Padahal dengan melihat secara jernih setelah reformasi, justru kekuasaan Soeharto cenderung hanya menggunakan Pancasila sebagai bagian alat legitimasi politik dan kebijakannya. Kesalahan Presiden Soeharto dengan kekuasaan monolitiknya seharusnya tidak sama dan tak boleh dipersamakan dengan nilai – nilai Pancasila itu.

Kekeliruan ketiga, adalah penyamaan ideologi sebagai suatu mashab atau varian pemikiran seperti setingkat agama. Dengan demikian muncul pemahaman yang salah seolah – olah agama berhadap – hadapan, *Vis a Vis*, dengan Pancasila. Hal ini timbul sebagai akibat upaya “sakralisasi” Pancasila, sehingga Pancasila tidak patut atau tidak boleh lagi dipertanyakan dan didiskusikan. Disamping itu Pancasila dimaknai sebagai ideologi tertutup dan

kebenaran tafsir yang berlaku hanyalah tafsir yang mendapat legitimasi dari pemerintah atau kekuasaan, dalam hal ini Presiden Soeharto.

Kekeliruan keempat adalah kekeliruan pemahaman yang melihat Pancasila tidak lagi relevan dalam membangun integrasi bangsa. Perpecahan masyarakat disertai kekerasan massive yang pernah terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan Kalimantan dll dianggap sebagai bukti bahwa Pancasila tidak lagi mempunyai daya rekat dan daya ikat kebangsaan kita. Demikian juga dengan konflik – konflik yang berbau SARA seperti penutupan – penutupan rumah ibadah dan mengkafir – kafirkan orang dan kelompok masyarakat yang tidak sealiran yang dimulai dengan Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017 dan puncaknya pada Pemilu Presiden RI 2019 ini sungguh, mengkhawatirkan akan terjadinya konflik horizontal ditengah masyarakat.

BAGIAN KEENAM: Reformasi Pendidikan

“Bahwa pendidikan yang selama ini hampir dianggap sakral, penuh kebajikan tersebut ternyata mengandung juga penindasan”.

Bab 6

Masa Study S3 Di Universitas Negeri Jakarta

Pandangan Kritis Terhadap Sistim Pendidikan Nasional

Latar Belakang

Pengalaman menunjukkan **ada sesuatu yang salah dalam pendidikan dasar yang dialami peserta didik yang pernah mereka jalani**. Salah satu kesalahan yang terjadi adalah beban belajar yang harus dikuasai murid terlalu besar. Pada dasarnya setiap murid memiliki talenta yang unik, sehingga sebagian besar murid hanya menyenangi mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan minatnya dan tidak menyenangi mata pelajaran lainnya yang tidak sesuai dengan minatnya. Hal ini sudah diingatkan Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan bahwa: Sistim Pendidikan pada Zaman sekarang ini terlalu berat pada intelektualisme, kurang memperhatikan keluhuran budi dan karenanya mengakibatkan pincang dan goncangnya hidup kemanusiaan **(Najelaa Sihab. 2016)**.

Itulah sebabnya pendidikan sangat mendesak saat ini untuk Reformasi Pembelajaran.

Untuk membedah Sistim Pendidikan Nasional yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 penulis menggunakan Pandangan Jhon Dewey yang melihat pendidikan sangat mendasar, artinya

Dewey mengatakan hal-hal seperti: bagaimana caranya meletakkan hubungan yang erat antara sekolah dan lingkungan: bagaimana menghubungkan sejarah, pengetahuan dan kesenian dengan si Pelajar, bagaimana mengajarkan permulaan seperti membaca, menulis dan berhitung dengan bahan yang menarik sesuai dengan hidup anak-anak: dan bagaimana caranya membangkitkan minat murid – murid terhadap materi pokok pelajaran.

Perhatian Dewey tidak saja terbatas pada soal-soal akademik sebab ia pun tak putus-putusnya mengupayakan peningkatan mutu kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Ia juga giat memajukan Pendidikan orang dewasa, khususnya dalam bidang politik dan wawasan Internasional.

Dewey beranggapan bahwa maksud dan tujuan sekolah ialah untuk membangkitkan dan mengembangkan sikap hidup demokratis. Oleh karenanya sekolah harus memberikan sebagai bahan pelajaran pengalaman-pengalaman yang berfaedah demi hari depan anak-anak didik dan sekaligus pengalaman itu merupakan hal yang dapat dialami anak didik pada masa sekarang ini.

Konsep Jhon Dewey bila dibandingkan dengan Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku (UU No.20 Tahun 2003), kelihatannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda, contohnya masalah demokrasi (tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan). Dalam hal ini baik Dewey maupun Sistem Pendidikan Nasional menginginkan bahwa Pendidikan akan melahirkan sikap yang demokratis. Yang dimaksud dengan demokratis di sini bahwa Pendidikan itu menjunjung tinggi martabat manusia ; menghargai keragaman dalam segala segi ; toleran terhadap perbedaan ; peka terhadap ketidakadilan dan penindasan ; terbuka dalam pikiran ; solid terhadap yang lemah ; tidak dilanda konflik yang terus menerus.

Tujuan Pendidikan

Pendidikan itu harus dapat mengajarkan kepada masyarakat

untuk dapat menghargai perbedaan. Oleh karena itu tujuan Pendidikan yang menciptakan demokratis sebaiknya dipertahankan dalam sistim Pendidikan Nasional UU No.20 Tahun 2003, sebab penulis berpandangan bahwa Pendidikan itulah yang merubah mental masyarakat, bukan lingkungan yang menciptakan perubahan.

Dewey dengan tegas membedakan antara urusan Agama dengan Pendidikan seperti yang terdapat dalam Pasal 3 UU No.20 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3 tersebut, bila dibandingkan dengan tujuan Negara RI yang terdapat pada alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 sudah bergeser, menyimpang/tidak sesuai, sebab tujuan Negara pada pembukaan UUD 1945 antara lain menyebutkan: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Jadi tujuan Negara itu antara lain “ mencerdaskan bangsa”, bukan membentuk manusia yang “beriman dan bertaqwa” kepada Tuhan Yang Maha ESA, dengan pengertian lain urusan meningkatkan “iman” dan “taqwa” merupakan urusan agama.

Hal ini juga dipertegas oleh amandemen UUD Tahun 1945 perubahan Tahun 2000 pasal 28 E butir 4 disebutkan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran...” lalu pada butir 2, menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan”.

Demikian juga pasal 3 tersebut betentangan dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara yang mengatakan: pengajaran berarti mendidik manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya (Najelaa Sihab. 2016).

Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa tujuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU Sistim Pendidikan Nasional tersebut agar disesuaikan dengan Alinea Pembukaan UUD 1945. Dan disesuaikan dengan pandangan Dewey yang memisahkan antara urusan pendidikan dengan urusan agama.

Tujuan Pembelajaran yaitu: tujuan materi dan tujuan manfaat. Tujuan materi berisi murid mampu menguasai materi mata pelajaran dengan benar. Tujuan manfaat berisi murid mampu memanfaatkan penguasaan materi mata pelajaran dalam semua sendi kehidupan secara konprehensif yang sesuai dengan norma universal dan wawasan kebangsaan.

Setiap mata pelajaran memuat beberapa Kompetensi Dasar (KD) dan setiap KD juga diberlakukan sama dengan mata pelajaran yaitu harus memuat 2 komponen tujuan. Setiap KD memuat materi ajar yang disusun berdasarkan kedua komponen tujuan itu.

Dengan adanya 2 komponen tujuan ini akan memperkuat pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran. Dengan demikian, setiap murid yang lulus diharapkan dapat menjadi manusia berkarakter dan berwawasan kebangsaan yang tinggi terutama melalui mata pelajaran yang diminati tanpa harus mengikuti pendidikan Budi Pekerti secara terpisah.

Metode Pendidikan

Dewey, menekankan pentingnya sistim belajar lewat pengalaman (learning to be doing). Berfikir adalah daya jiwa yang bekerja dengan tujuan memecahkan masalah yang kita hadapi. Orang yang menemukan kesulitan dirancang untuk berfikir, ya menyelidiki dan menguraikan kesulitan tersebut dan menentukan

persoalan yang dihadapi.

Dewey, menentang metode pengajaran yang bersifat dogmatik dan otoriter, sebab menurutnya hidup manusia bersifat dinamis dan tidak statis – all in the making.

Dewey, melihat metode pengajaran dengan cara bahan pelajaran yang dipersiapkan terlebih dahulu dan dipecahkan kesulitannya, menyebabkan anak tinggal mendengarkan, percaya dan menghafal saja. Anak seharusnya mengalami proses berfikir sendiri dari awal hingga akhir. Oleh karena itu metode pembelajaran anak didik sebagai obyek sudah harus ditinggalkan.

Sekarang cara-cara belajar – mengajar yang indoktriner dan menghafal tidak pada tempatnya lagi. Yang perlu dikuasai peserta didik adalah informasi yang telah dilolah sendiri atau belajar mandiri (digested information).

Itulah sebabnya, penulis berpendapat bahwa metode Pendidikan dan pengajaran di masa yang akan datang (masyarakat industri modern) dilakukan dengan cara: (1) Belajar dengan mengolah sendiri informasi yang diterima (mandiri) (2). Belajar kelompok (group learning) (3) Belajar melalui jaringan informasi seperti jaringan TV, Hp, Komputer dll.

Sehingga bila dicermati pandangan Jhon Dewey tersebut, dengan Metode Pendidikan dan pengajaran yang diterapkan pada sistim Pendidikan Nasional sekarang ini “berbeda” atau “bertentangan”. Sebab metode Pendidikan dan pengajaran yang ditetapkan sekarang ini lebih berfokus kepada peserta didik sebagai obyek, kurang memperhatikan bagaimana agar peserta didik bisa berperan dalam setiap topik/mata pelajaran artinya tidak diajarkan, bagaimana peserta didik untuk mengetahui dan memahami tanda “proses” terjadinya sesuatu yang diajarkan hanya “mengetahui” pelajaran tersebut atau dengan kata lain peserta didik belum “merdeka belajar”.

Hebatnya Dewey, ternyata dalam menyongsong abad 21 pandangan beliau tentang metode belajar ini dibangkitkan

kembali oleh dunia internasional yang dipelopori UNESCO (Soedijarto. 2000) yang dikenal dengan empat pilar proses pembelajaran. Dari empat pilar tersebut yang sesuai dengan konsepnya adalah "LEARNING TO BE" yaitu Pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Jadi, kata kuncinya didalam proses pembelajaran harus dimungkinkan peserta didik mengenal dirinya dengan penuh kebahagiaan. Dan ini sukar diperoleh dalam pembelajaran tradisional yang menekankan pada hafalan (Soedijarto. 2000). Itulah sebabnya penulis menyarankan agar metode Pendidikan dan pengajaran sudah waktunya diubah kearah belajar mandiri (digested information) ; belajar kelompok Group Learning ; serta belajar melalui Jaringan Infomasi. Perubahan metode yang disarankan penulis:

Pembagian kelompok kelas.

Setiap mata pelajaran dibagi dalam 2 kelompok kelas yaitu kelas reguler dan kelas UN. Dalam pembagian ini masing2 kelompok diharuskan minimal memiliki murid 30% (maksimal 70%) dari jumlah murid yang mengikuti mata pelajaran itu. Dengan demikian pemusatan minat murid pada mata pelajaran tertentu (dalam arti ada kelompok kelas yang peminatnya kurang dari 30% atau lebih dari 70%) dapat diatasi dengan cara meranking nilai yang diperoleh murid ybs.

Model pengelompokkan ini sangat menguntungkan baik bagi murid, guru, maupun orang tua murid. Bagi murid, dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk lebih berprestasi pada mata pelajaran yang diminati. Bagi guru, lebih mudah melaksanakan tugas pembelajaran karena murid yang dihadapi relatif lebih homogen. Bagi orang tua tidak perlu repot memaksa anak untuk belajar lebih tekun pada mata pelajaran UN yang tidak diminati Anak.

Pembagian kelompok dilakukan pada saat yang berbeda

untuk setiap jenjang pendidikan. Pada SD (atau sederajat) pembagian kelompok dilakukan pada saat murid duduk di kelas 4, pada SMP (atau sederajat) pembagian kelompok dilakukan di kelas 8, dan pada SMA (atau sederajat) pembagian kelompok dilakukan di kelas 11.

Dengan adanya pembagian kelompok ini, tidak ada lagi istilah juara kelas. Yang ada adalah juara mata pelajaran. Dengan demikian murid diuntungkan karena tidak akan terbebani untuk menguasai seluruh mata pelajaran dan bagi murid yang mampu untuk menguasai seluruh mata pelajaran tidak dirugikan. Melalui multi player effect, pembagian kelompok ini diharapkan akan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, saling menghargai, tidak sombong, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan berwawasan kebangsaan. Murid yang berada pada kelompok kelas UN tidak perlu ikut bimbel, namun bagi yang ingin menggali ilmu lebih dalam dapat mengundang pakarnya untuk memberi materi yang diinginkan.

Penentuan naik kelas dan kelulusan.

Kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan oleh rapat Dewan Guru dengan mengacu pada hasil yang diperoleh murid secara kumulatif dan proporsional baik dari ujian harian maupun ujian kenaikan kelas atau ujian akhir (US atau UN).

Kurikulum

Dewey, tidak menghendaki adanya norma atau kaidah yang tetap dan yang terlebih dahulu ditentukan oleh sejarah atau agama. Menurutnya kaidah harus timbul dari masyarakat sendiri yang selalu berubah dari zaman ke zaman.

Berdasarkan gagasan inilah Dewey mengkritik sistem sekolah tradisional. Menurutnya dalam sekolah tradisional terlalu banyak mata pelajaran yang diberikan, karena tujuan sekolah tradisional ialah supaya para siswa kelak dapat/kurikulum meduduki jabatan intelektual. Bahan pelajaran menjadi pusat seluruh kegiatan

sekolah materio sentris.

Bahan pelajaran sekolah tradisional, diberikan secara terpisah, dan tidak memiliki hubungannya dengan kebutuhan anak dalam hidupnya di masyarakat, karena pengalaman yang diperoleh anak dalam sekolah tradisional tidak dapat ia pergunakan dalam kehidupan masyarakat.

Keadaan seperti ini harus diubah berdasarkan sistim sekolah kerja yang diprakarsainya. Masyarakat harus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi Pendidikan warganya supaya mereka tidak bergantung pada dogma melainkan cara berfikir bebas, berdisiplin, obyektif, kreatif, dan dinamis. Materi pelajaran di sekolah harus diberikan secara terpadu dan dipraktekkan dalam masyarakat, anak untuk memenuhi kebutuhannya.

Tak dapat disangkal bahwa kurikulum sekolah tradisional memerlukan cara hidup yang teratur dan suatu disiplin yang bisa mengabaikan kemampuan dan minat alamiah anak.

Kurikulum merupakan sarana dari suatu sistim Pendidikan. Sebagai suatu sarana sudah barang tentu kurikulum sangat berhubungan dengan hasil (output) Pendidikan, artinya berhasil atau gagalnya Pendidikan banyak ditentukan oleh kurikulum. Pandangan Dewey tentang kurikulum sering diangkat dan dikacaukan oleh Gerakan Pendidikan progresif dengan resiko bahwa untuk sekedar memenuhi murid dan guru, materi pelajaran disesuaikan kesenangan-kesenangan yang mungkin tak teratur atau hanya direduksikan kepada latihan kejuruan.

Sebagai suatu sarana didesaian sedemikian rupa, artinya tidak asal jadi dan harus “senyawa” dengan tujuan Pendidikan. Sebab kurikulum itu merupakan salah satu indikator tercapai atau tidaknya tujuan Pendidikan.

Oleh karena itu, dalam hal kurikulum penulis menyarankan agar: kurikulum memprioritaskan Pendidikan sains, Bahasa Indonesia dan beberapa Bahasa asing yang relevan ; kurikulum bersifat fleksibel disesuaikan dengan keperluan masyarakat ;

kurikulum Perguruan Tinggi semakin individualis dan terarah kepada riset dan pengembangan budaya. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab didalam menghadapi globalisasi dan tercapainya masyarakat madani itu harus bisa / dapat menjawab tantangan kedepan. Tidak seperti kurikulum yang berlaku sekarang ini perlu dirubah dimana mata pelajaran yang kurang relevan dimasukkan kedalam kurikulum dan muatannya dalam masyarakat industri modren harus mendapatkan Pendidikan dasar sebagai seorang sarjana murni, ditambah dengan kemampuan sebagai seorang guru.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Tilaar yang mengatakan bahwa guru yang ideal pada masyarakat madani dan masyarakat Industri Modren (MIM) adalah:

Mempunyai pengetahuan profesi guru ilmu mendidik.

Calon guru haruslah menguasai ilmu yang ditekuninya dan yang kemudian akan diajarkan kepada peserta didik secara berkala. Kemampuan tersebut hanya dapat diberikan dalam lingkungan Universitas dari para ahli (guru besar) yang memang ahli didalam bidangnya.

Calon guru haruslah terpilih melalui suatu seleksi yang ketat.

Calon guru harus mempunyai intelengensi yang tinggi dan mempunyai emosi yang stabil dan kemauan yang membaja.

Oleh karena calon guru harus bisa duduk sama rendah dan sejajar dengan calon ilmuwan lainnya.

Calon pendidik harus mempunyai sikap khusus. Sikap khusus dapat diperoleh dalam lingkungan yang sebenarnya, seperti didalam asrama. Kehidupan Bersama dimana seseorang dapat beajar satu dengan yang lain untuk berdiskusi, melatih emosi, tenggang rasa, dan lapang dada.

Bila dikaitkan keadaan guru di Indonesia dengan pandangan Dewey tersebut menurut penulis, "itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru", artinya seorang guru harus bisa memerdekakan/membebasan seorang anak. Merdeka, disini adalah suatu kemerdekaan dari kebodohan bebas dari ketakutan

dan yang utama bebas untuk berekspresi dan bebas melaksanakan keyakinan tanpa merasa dibebani hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keyakinannya tersebut. Sedangkan peranan guru yang ada sekarang menurut penulis jauh dari harapan Dewey, sebab guru di Indonesia belum bisa berlaku sebagai seorang guru (Resi) dan juga belum bisa disebut sebagai seorang “pembebas” dari kebodohan itu. Guru di Indonesia hanya bisa mengajarkan (transformation Knowledge) dan belum mampu mengajarkan anak menjadi orang yang mempunyai “moral”, yang baik sebagai contoh Pendidikan Indonesia belum mampu mendisiplinkan masyarakat, misalnya menyeberang jalan tidak pada tempatnya dan budaya antri (terlalu banyak over load). Sehingga menimbulkan kebosanan bagi peserta didik didalam mempelajari, artinya peserta tidak dapat secara fokus untuk mendalami suatu mata pelajaran.

Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu dirubah kurikulum yang sekarang paling tidak dikurangi (yang relevan), sehingga peserta didik bisa lebih konsentrasi terhadap pelajaran (mata ajaran/yang diminatinya) untuk didalami secara komprehensif, seperti peserta didik yang akan menghadapi pelaksanaan Ujian Negara (UN).

Semua mata pelajaran harus di UN kan, karena setiap mata pelajaran mengandung nilai-nilai kehidupan yang mengacu pada norma universal secara konprehenship (afektif) dan nilai keilmuan (kognitif) yang relatif sama (setara) bobotnya, namun setiap murid hanya boleh mengikuti UN maksimum 6 mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Secara rinci, untuk murid SD (atau sederajat) maksimum 3 mata pelajaran, untuk murid SMP (atau sederajat) maksimum 4 mata pelajaran, dan untuk murid SMA (atau sederajat) maksimum 6 mata pelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar setiap murid diberi kesempatan untuk menampilkan kompetensi yang dimiliki di tingkat nasional pada mata pelajaran yang diminati. Model ini terinspirasi dari model penyelenggaraan PON yang melibatkan semua cabang olah

raga, namun setiap atlet cukup hanya mengikuti 1 cabang olah raga saja. Dan anehnya lagi, hubungan antar sesama atlet (walaupun berbeda cabang olah raganya) *sangat harmonis*.

Dengan demikian setiap murid tidak lagi merasa terbebani untuk menghadapi UN, karena UN yang diikuti sudah sesuai dengan minatnya. Dengan demikian, bagi murid UN tidak lagi dianggap sebagai keterpaksaan, melainkan benar-benar merupakan kebutuhan.

Bagi pemerintah, model penyelenggaraan UN seperti ini sangat menguntungkan karena dapat melakukan pemetaan untuk semua mata pelajaran dan mencakup semua KD yang diujikan secara komprehensif dengan biaya yang relatif sama. Selain itu, hasil UN juga sangat efektif digunakan sebagai alat seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi, terlebih untuk seleksi masuk PTN. PTN dapat menjaring calon mahasiswa yang dijamin lebih berkualitas dengan cara yang sangat mudah tanpa harus melakukan ujian seleksi.

Yang tidak kalah pentingnya lagi pada model ini adalah: semua guru merasa diperlakukan sama, karena tidak ada lagi istilah Guru UN dan Guru non UN.

Guru

Dalam sekolah tradisional, gurulah yang menentukan segala sesuatu. Dialah yang berfikir untuk anak dan memaksakan bahan pelajaran kepada anak didiknya. Dialah yang aktif dan memecahkan soal untuk mereka. Hal ini membuat anak kehilangan spontanitas dan perhatian langsung. Pelajaran dan peraturan yang ada dalam sekolah tradisional seakan-akan memaksa anak pasif.

Si Guru hanya berfungsi sebagai petunjuk jalan dan pengamatan tingkah laku anak untuk mengetahui hal-hal minat si anak. Berdasarkan pengamatan tersebut ia dapat menentukan masalah yang akan dijadikan pusat minat mereka.

Kecerdasan murid harus dikembangkan supaya timbul hasrat

dalam dirinya untuk dapat menyelidiki secara teratur, berfikir secara obyektif dan logis. Yang diutamakan adalah proses berfikir itu sendiri dan bukannya apa yang dia pikirkan, lingkungan sekolah haruslah diatur dan diselenggarakan sedemikian, supaya anak dapat bekerja dengan bebas dan spontan. Jadi guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna kepentingan umum.

Guru dalam masyarakat madani atau masyarakat industri modern adalah "RESI" dalam arti yang modern. Ia menguasai sains dan teknologi, ia membawa peserta didik kepada pengenalan sains dan teknologi itu, dan lebih dari itu adalah sosok personifikasi dari moral dan keyakinan agama. Inilah RESI masyarakat Indonesia Modern, seorang profesional, gabungan ciri-ciri seorang saintis, ulama dan mungkin pula seniman. Karakteristik guru seperti di atas memerlukan program Pendidikan yang sesuai. Untuk menghasilkan seorang RESI diperlukan dasar seorang saintis.

Oleh karena itu menurut penulis kondisi guru perlu diperbaiki. Dan, dalam memperbaiki ini tidak dilakukan secara parsial atau bagian-bagian tertentu saja, harus dilakukan secara menyeluruh (komprehensif).

Yang Harus Direformasi:

Pejabat di lingkungan pendidikan.

Pejabat birokrasi dan fungsional yang menangani guru harus dijabat oleh guru. Hal ini berarti pejabat yang diangkat harus berasal dari guru dan selama melaksanakan tugas sebagai pejabat birokrasi atau fungsional, ybs tetap menjalankan tugasnya sebagai guru dengan durasi 3 jam seminggu. Hal ini dilakukan karena hanya guru yang mampu memahami keadaan guru secara komprehensif. Pejabat yang dimaksud meliputi Dirjend Guru, Direktur di Ditjend Guru, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Lembaga Penyelenggara UN, PPPPTK, LPMP, Kepala Bidang Pembinaan Guru di Dinas

Pendidikan, Widyaiswara, Peneliti, Perekayasa, Pengawas Pendidikan, Konsorsium kelompok mata pelajaran, dan Kepala Sekolah.

Konsorsium kelompok mata pelajaran.

Perlu dibentuk Konsorsium kelompok mata pelajaran yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan Profesi guru. Satu konsorsium terdiri dari beberapa mata pelajaran yang sejenis. Jumlah konsorsium yang dibutuhkan diperkirakan maksimum 10 konsorsium. Konsorsium ada di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota.

Untuk tingkat Nasional, Konsorsium dapat digabung pada PPPPTK. Untuk tingkat Provinsi, konsorsium dapat digabung pada LPMP. Untuk tingkat Kab/Kota, konsorsium dapat digabung pada Dinas Pendidikan. Setiap Konsorsium memiliki data base tentang guru secara komprehensif dan dapat diakses secara transparan melalui internet. Konsorsium berhak menentukan jenjang karir guru. Dengan adanya konsorsium ini diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensinya yang meliputi ketiga aspek profesionalisme guru secara terukur. Konsorsium dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh beberapa pejabat fungsional.

Pembinaan Profesi Guru:

Setiap guru diberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S2 atau S3). Beasiswa diberikan bagi guru yang memenuhi syarat.

Setiap guru diwajibkan mengikuti penyegaran dan peningkatan kompetensi guru 2 kali setahun yang diadakan oleh Konsorsium kelompok mata pelajaran.

Bagi guru SD dan SMP, penyegaran dan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh Konsorsium Kab/Kota.

Bagi guru SMA, penyegaran dan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh Konsorsium Provinsi.

Bagi tenaga fungsional yang ada di Konsorsium Kab/Kota

dan Provinsi, penyegaran dan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh Konsorsium Nasional.

Setiap guru diwajibkan mengikuti diskusi kelompok Mata pelajaran yang diawasi oleh Konsorsium kelompok mata pelajaran setiap minggu pada rayon yang ditentukan.

Dengan demikian, ketiga aspek profesionalisme guru (pedagogik, kepribadian, dan sosial) dapat dipantau secara komprehensif.

Pembinaan Karir Guru.

Setiap guru yang sudah berpengalaman minimal 10 tahun diwajibkan mengajar di daerah terpencil pada Provinsi lain sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan peningkatan pendidikan di daerah terpencil agar dapat mengejar ketertinggalannya dibanding daerah lain. Bagi guru yang tidak mengikuti ketentuan ini, diberi sanksi berupa tidak bisa naik pangkat ke golongan IV.

Status kepegawaian guru.

Semua guru baik yang berasal dari sekolah negeri maupun sekolah swasta diangkat dengan status sebagai Aparat Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan karena murid yang dididik oleh guru adalah anak bangsa Indonesia (bukan anak bangsa asing). Ketentuan ini tidak berlaku bagi guru yang mengajar pada sekolah internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Untuk Pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dapat dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

Sederhanakan kurikulum nasional sesuai usianya, dan muatannya harus bersifat mendasar, humanis, dan kultural.

Ajarkan kembali pelajaran Pancasila, sejarah, budi pekerti, agama dalam cakupan rasional dan kontekstual, kesenian dan kebudayaan, khususnya bagi murid SD, SMP dan SMA.

Bebaskan sekolah dan kampus dari ancaman dogma-dogma radikalisme agama.

Bebaskan sekolah dan kampus dari perilaku diskriminatif dari

segala bentuk parameter SARA.

Perbaiki mekanisme dan sistem evaluasi pendidikan nasional secara berkala dan rutin.

Negara harus hadir dalam menjamin kualitas pendidikan nasional dan sekolah harus imun dari segala bentuk penyusupan faham-faham ideologi sesat yang dilakukan oleh guru-guru dan alumni yang ujung-ujungnya menggoyahkan Pancasila, keutuhan NKRI dan merusak Kebhinnekaan Indonesia. Radikalisme di sekolah dan kampus bukanlah isapan jempol, namun fakta yang menghadang perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

PENUTUP

Semangat kebangsaan kita bertumbuh pada bahasa persatuan dalam kesetaraan tanpa suasana mayoritas-minoritas: Merayakan persatuan diatas keragaman. Mengakui keragaman bukan untuk diseragamkan, melainkan untuk dirayakan dalam semangat bersama. Budaya etnis di Indonesia belum mati, dan oleh para pelakunya dipertahankan dan dikembangkan. Budaya etnis (dalam arti luas dan tidak hanya terbatas pada salah satu perwujudannya; kesenian misalnya) dipertahankan karena masih berfungsi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lihatlah, misalnya, adat perkawinan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Pilar Learning to live together ternyata diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Unsur-unsur budaya yang telah terintegrasi dalam budaya Indonesia yang sekarang berasal dari budaya lain, seperti sistem pemerintahan, pendidikan, ilmu, perekonomian, hukum dan teknologi yang kita miliki sekarang banyak unsur-unsurnya yang berasal dari budaya lain, turut memperkuat culture masyarakat yang hidup (Learning to do). Dalam masa transisi, transformasi, atau apapun istilahnya, selalu terdapat ketegangan, diskuilibrium, dan konflik dengan berbagai corak dan kedalaman atau gradasi (Learning to know).

Menjadi orang Indonesia berarti siap untuk diterpa proses perubahan. Dari suku Jawa a, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Batak, dan yang lainnya menjadi Indonesia, artinya siap hidup berdampingan dengan suku atau penganut agama lain, dalam komunitas baru yang bernama Indonesia (Learning to live

together).

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia baru yakni masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai keragaman dalam segala segi, toleran terhadap perbedaan, peka terhadap ketidakadilan dan penindasan, terbuka dalam pikiran dan sikap, solider terhadap yang lemah, serta tidak dilanda konflik yang terus menerus (Learning to live together).

Walaupun ada dampak “Negatif” arus “globalisasi” budaya nasional terhadap budaya-budaya etnis, dapat diramalkan bahwa keetnisan masyarakat Indonesia tidak akan hilang sama sekali.

Bahwa pendidikan (politik) ikut berkontribusi terhadap konflik atau benturan antar suku (budaya) karena pendidikan yang dilaksanakan belum tepat menggunakan pedagogik. Disamping itu pilar pendidikan belum diterapkan secara konsisten.

Membicarakan masalah budaya yang hidup di tengah kesukuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu keharusan, mengingat Indonesia berpenduduk multi culture yang rawan terhadap konflik sosial dan konflik antar peradaban.

Bangsa ini harus berani mengambil sikap tegas terhadap isu SARA, membuka wawasan dan memaknai kehidupan sosial yang lebih terbuka, serta bijaksana memahami segala bentuk keragaman budaya sebagai langkah awal membina persatuan dan kesatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, Syaiful Kadir, 2017. *Kepemimpinan Pendidikan dan Budaya Mutu*. Penerbit Safir Publishing Kadisoka RT.05 RW.02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571
- Alfian dan Nazaruddin Syamsudin (Penyunting). 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Arikunto, S. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Edisi Revisi cet.11). Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, Azyumadi. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban. Globalisasi, Radikalisme, & pluralitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baasir, Faisal. 2003. *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2015. *Fisafat Politik dan Kotak Pandora Abad ke-21*. Yogyakarta. Percetakan. Jalsutra. Yogyakarta.
- David A. Noebel. 2007. *Perjuangan Untuk Kebenaran. Mempertahankan Kerangka Berfikir Kristen Di Dalam Pasar Ide-Ide*. Jakarta. Published by Harvest House Publishers.
- Djadijono, I Made Leo, Wiratama, T.A. Legowo. 2006. *Membangun Indonesia Dari Daerah*. Percetakan Kanisius
- Elga, A. Yusriantoro. 2013. *Apapun Partainya, Korupsi Hobinya*. Yogyakarta: IRCISoD.
- Gunawan, Ilham. 1993. *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Geist, J.R. (2002). *Predictors of Faculty Trust in Elementary Schools: Enabling Bureaucracy, Teacher Professionalism,*

and Academic Press. Disertation of The Ohio State Universty,
[diakses dari <http://www.osu.edu.com>]

- Kamil. Sukron. 2009. *“Korupsi Sebagai Persoalan Kebudayaan: Mencari Akar Masalah Korupsi Di Indonesia dan Solusinya”*, Dalam Wijayanto dan Ridwan Zahrie (Penyunting), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hassan, Fuad. 2004. *“Pendidikan Adalah Pembudayaan”*, dalam Tonny D.Widiastono (Editor), *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hergenhahn, B. R. dan Olson, M. H. 2008. *Theories of Learning*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hyoscyamina, D. E. 2011. *Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak*. Jurnal Psikologi Undip, 10, 144.
- Hoy. Wayne K, Miskel Cecil G. 2013. *Educational Administration. Theory, Research and Practice*. Published by McGraw-Hill, a business unit of the McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 avenue of the Americas, New York, NY 10020
- Ira Shor, & Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka*. Penerbit LKiS Yogyakarta, Journal of Resources Development and Management www.iiste.org Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 4 No. 3 Nopember 2017, hal 265-272 ISSN 2422-8397 An International Peer-reviewed Journal Vol.16, 2016 1. Penjahitan 91 Yogyakarta 55141
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi, Buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Jakarta KPK.
- M. Arif Khoirudin, *“PERAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN”*, Jurnal Komunikasi Vol. 23 No. 1 Januari 2012.
- Mulder, Niels. 1999. *Agama, Hidup sehari-hari dan perubahan Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka utama.
- Malik Ruslan. 2017. *Politik Anti Korupsi Di Indonesia*. Depok: LP3ES.

- Maria Audrey Lukito. 2011. *Patriot*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Maarif, Akhmad Syafii. 2014. "*Budaya Politik Indonesia*" (*Republika*).
- Maurits Simatupang. 2002. *Budaya Indonesia Yang Superetnis*. Penerbit. Papas Sinar Sinanti.
- Media Sirait. 2008. *Revitalisasi Pancasila*. Penerbit. Kasta Hasta Pustaka. Jln. RS. Fatmawati No.20. Jakarata.
- Mulyasa. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 1974. *Sebuah pendekatan untuk mempelajari system sosial Indonesia*. Yogyakarta. Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan politik, Universitas Gajah Mada.
- Najelaa Shihab. 2016. *Belajar Dari Ki Hadjar*. Penerbit. Literati. Tangerang Selatan, Banten.
- Noeng Muhadir. 2000. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta. Penerbit. Rake Sarasin.
- Rhenald Kasali. 2017. *Distruption*. Jakarta. PT. Gramedi Pustaka Utama.
- Rachmawati, I. 2016. *Model Pembelajaran Group Investigation: Pengertian hingga Kelamahan*, (Online) (<http://portal-ilmu.com/metode-pembelajaran-group-investigation/>. Diakses 8 November 2019).
- Zona. 2018. *Pengertian Pembelajaran Menurut Para Ahli*, (Online) (<http://www.zonareferensi.com/pengertian-pembelajaran/>. diakses 27 Oktober 2019).
- Sairin. Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial masyarakat Indonesia. Perspektif antropologi*. YogJakarta: Pustaka pelajar.
- Sairin, Weinata. 2001. *Pendidikan yang mendidik. Butir-butir pemikiran strategis- Reflektif Di seputar pendidikan*. Jakarta: Yudhistira.
- Soedijarto. 2000. *Pendidikan nasional sebagai wahana*

- mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban Negara-bangsa.* Jakarta: center for information and national policy studies (CINAPS)
- 2003. *Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional melalui sekolah sebagai pusat pembudayaan.* Jakarta.
- 2003. *Beberapa catatan tentang membangun budaya nasional di tengah terpaan globalisasi dalam mempertahankan NKRI.* Jakarta
- Sabam Sirait. 2019. *Berpolitik Bersama 7 Presiden.* Penerbit: Q Communication.
- Samuel P. Hutington. 2002. *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia.* Yogyakarta. Penerbit Qalam.
- Soedjito Sosrodihardjo. 1972. *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa.* Suatu Analisa.
- Sondang Siagian. 1999. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan.* Penerbit. Rineka Cipta.
- Suwarsono, Alvin Y. SO. 1994. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan.* Jakarta. Penerbit. PT. Pustaka.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Prakteknya.* Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sindhunata, 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi.* Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Schein, Edgar. 1992. *Organizational Culture and Leadership.* San Francisco, Jossey-Bass.
- Tilaar, H. A. R. 2012. *Perubahan sosial dan pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.* Jakarta. Grasindo.
- 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta. Penerbit. Rineka Cipta.
- Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik. 2016. *Sisi Lain Akuntabilitas KPK Dan Lembaga Pegiat Antiorupsi: Fakta Dan Analisis.* Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Poespowardoyo, Soerjanto. 1986. *“Masalah Perubahan Nilai dan Strategi Kebudayaan”*, dalam Deny JA (Penyunting), *Tranformasi Masyarakat Indonesia*. JaKarta. Kelompok Studi Proklamasi.
- Patricia Jones, Larry Kahaner. 1999. *MISI Dan VISI 50 Perusahaan Terkenal di Dunia*. Penerbit. Interaksara Pustaka.
- Pendidikan, Dosen. 2019. *Pengertian Hasil Belajar Menurut Para Ahli*, (Online) (<http://www.dosenpendidikan.co.id/hasil-belajar/>). diakses 27 Oktober 2019).
- P21. (2016). *Framework for 21st Century Learning*. Washington, DC, [diakses dari <http://www.p21.org>
- William F. O’neil. 2001. *Ideologi - Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- William N. Dunn. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press.

TENTANG PENULIS

Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tidak terasa umur penulis hari ini tanggal 20 Oktober 2019 sudah 65 tahun.

Penulis lahir di Kampung Tempel Gang Berdikari Kisaran Kab. Asahan Sumatra Utara, hari rabu tanggal 20 Oktober 1954. Bapak bernama Pipin Tambunan dan Ibu bernama Kani br.Batubara adalah pedagang kecil di Kisaran. Penulis diberi nama oleh Orang tua Witarsa Tambunan tapi lebih sering dipanggil “UCOK”, nama witarsa konon katanya dari bang Victor Bachtiar yang diambil dari nama pemain bola terkenal PERSIB Bandung, Endang Witarsa. Ternyata nama Witarsa itu membawa keberuntungan tersendiri bagi penulis, sebab masa mahasiswa di Yogja penulis dipanggil “WITARSO”, sedangkan dikantor pemprov DKI Jakarta dipanggil “Pak. WIT” lain lagi kalau teman – teman di Pemprov Bali penulis dipanggil “Nyoman Witarse” sedangkan kalau bertugas ke Pemprov. Sumut penulis dipanggil “Pak Tambunan” yang jelas kalau ada orang memanggil Ucok berarti dia adalah teman kecil dan dapat penulis pastikan sulit mengenalnya sebab dia sudah menjadi WAGUB (Wah... Gundul Begitu).

Sekolah penulis sejak dari SD - SMP dan SMA diselesaikan di kota Kisaran. Akhir Tahun 1973 selesai SMA penulis tinggalkan kota kelahiran Kisaran untuk study di Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM Yogyakarta selesai tahun 1980. Tahun 1999 mengikuti Pendidikan Magister S2 Kebijakan Publik di Fisip UI Jakarta. Tahun 2003 lanjut ikut pendidikan Doktorat S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selesai study di Yogyakarta, mangadu keberuntungan di ibukota Jakarta dan Puji Tuhan.... penulis diterima menjadi PNS di Pemprov DKI Jakarta. Pada awal bertugas ditempatkan pada Biro Bina Tata Pemerintahan DKI tahun 1981, Tahun 1983 dipromosi menjadi Kasubag Bina Pendapatan Daerah. Tahun 1989 dirotasi mejadi Kasubag Kerjasama Antar Daerah dalam negeri. Tahun 1993, lagi-lagi..... keberuntungan berpihak kepada penulis, dengan pangkat III/C dua tahun mendapat promosi menjadi Kepala Bagian (Kabag) di Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) DKI. Ehhh... nasib masih berpihak kepada penulis, Tahun 2001 dipromosi menjadi Kasudin Pariwisata di Kantor Walikota Jakarta Timur sampai dengan tahun 2006 dan tahun 2006 dirotasi menjadi Ka.Bid Tata Ruang Pariwisata di Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Tahun 2008 dirotasi menjadi Kasudin Pariwisata di Kantor Walikota Jakarta Barat sampai dengan tahun 2010. Dan November 2010 berakhirlah pengabdian penulis di Pemprov DKI Jakarta.

Purna tugas sebagai PNS di Pemprov DKI Jakarta, penulis beralih profesi menjadi dosen (tukang jual obat pintar) di berbagai Perguruan Tinggi Jakarta, antara lain UKI, Universitas Sahid, Universitas Binawan dan STEIN Pariwisata Internasional (mengudurkan diri thn 2014). Puji Tuhan tahun 2014 mendapat kepercayaan diangkat menjadi Dekan Fisipol UKI Jakarta (sudah purna).

Didalam kehidupan rumah tangga, penulis beruntung karena Tuhan memberi seorang istri Selvina Manotor Panjaitan yang baik dan tangguh dalam membina kehidupan rumah tangga kami, yang sudah kami bina selama 37 tahun.

Puji Tuhan.... kami dikarunia dua orang anak laki-laki, yang pertama kami beri nama Paulo Rossi Tambunan, S.Com, MT yang sekarang bekerja sebagai ASN di Pemprov DKI Jakarta, penulis beri nama Paulo Rossi pemain bola Itali, karena pada tahun 1982 kesebelasan Itali favourit dalam World Cup menjadi juara dunia dan.... Paulo Rossilah yg mencetak goal kemenangan dan penentu

Itali jadi juara dunia hehe....

Anak yang kedua Michael Platini Tambunan, penulis beri nama tersebut karena Michael Platini adalah pemain bola terkenal Prancis dan juga sebagai kapten kesebelasan Prancis, disamping itu Michael Platini pemain club terkenal di Itali AC Milan. Michael Platini adalah seorang dokter yang sekarang sedang study mengambil “spesialis penyakit dalam” di UNDIP (Universitas Diponegoro) Semarang Jawa Tengah.

Beruntunglah penulis sebagai orangtua karena tugas dan kewajiban untuk membesarkan, mendidik titipan Tuhan itu telah dilakukan dengan kasih sayang penuh suka dan duka. Penulis telah berhasil mengantarkan mereka untuk study lanjut (S.2) di Perguruan Tinggi, Paulo Rossi meraih magister dari ITB Bandung dengan mendapat tugas belajar dari Pemprov DKI Jakarta dan Michael Platini di UNDIP Semarang.

Disamping itu, mereka sudah kawin (menikah). Beruntunglah penulis punya sahabat baik Dubes Rusia yang sekarang jadi Dubes Cina (RRT) Broer Jauhari Oratmangun yang memperkenalkan Paulo Rossi dengan dr.Sarah Ficadela SP.OG yang saat itu lagi study di Moscow Rusia. Pada tanggal 9 - 9 - 2016 mereka menikah dan diberkati di gereja HKBP Cibubur Jakarta Timur.

Adapun Michael Platini menikah dengan dr. Cory Marpaung, mereka diberkati di gereja HKBP Kebayoran Lama Jakarta Selatan 25 April 2017.

Diumur 65 tahun ini, ternyata penulis hidup bebas lepas dari kebiasaan yang selama ini berangkat bekerja jam 05.30 wib dan pulang pukul 22.00 malam, serta memberi hormat kepada atasan dan menyapa dengan senyuman kepada bawahan di kantor, artinya penulis sekarang tidak perlu lagi menghindari bos (atasan) apabila bertemu di jalan, sekarang posisi tinggi dan posisi rendah sudah sama haha....

SAMBUTAN

DR. BINTANG R.SIMBOLON, M.SI

(Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia)

Membaca Buku 65 Tahun Hidup dalam Kebhinekaan (Pandangan Kritis Dari Sisi Pendidikan Politik), yang ditulis Bapak.Dr.Drs.Witarsa Tambunan,M.Si,kita dapat mengetahui perjalanan hidup beliau mulai dari masa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, S1, S2 dan S3, ternyata kesan saya beliau adalah seorang yang “kritis” terhadap kehidupan yang meyangkut IPOLEKSOSBUD di tengah gejolak masyarakat.

Banyak sekali masalah yang dipotret oleh beliau, baik yang memuaskan maupun tidak memuaskan dirinya tersirat dalam buku ini. Kerangka pemikirannya yang cerdas, tampak dari kepastian sasaran – sasaran yang ingin dicapainya dalam kedudukan dirinya sebagai seorang akademikus. Dengan menyadari perkembangan keadaan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional serta Internasional yang dihadapkan dengan nilai moral itu, beliau berusaha keras menerapkan metode yang ia pilih dari berbagai kemungkinan cara menganalisa, dalam menghadapi berbagai macam masalah, baik yang sensitif maupun tidak. Dari bukunya ini, yang tentu merupakan ungkapan pikirannya, karakteristik dari kecendikiawanannya dapat terbaca.

Akhirnya, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 65 buat Pak.Witarsa Tambunan, Panjang umur, sehat selalu dan selalu dimudahkan rezkinya. Saya selaku Direktur Program Pascasarjana UKI berterimakasih atas terbitnya buku ini, semoga

teman-teman dosen di Program Pascasarjana termotivasi untuk menulis buku berikutnya.

Jakarta, 20 Oktober 2020

SAMBUTAN

DR.HOTNER TAMPUBOLON, MM

Ketua Dewan Pakar PKPI (2018 - 2024)

Membaca buku 65 Tahun Hidup Dalam Kebhinnekaan (Tinjauan Kritis Dari Sisi Pendidikan Politik), ini saya sebagai Politisi merasa bangga melihat analisisnya yg tajam, tentang peran parpol terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, yang menurut saya sesuai dgn kondisi yg sedang dihadapi bangsa ini.

Selamat Ulang Tahun pak.Witarsa Tambunan, sehat terus...

SAMBUTAN
HARIS SITORUS
(Direktur Gramedia)

Sesama anak Kota Kisaran dan satu Sekolah SMA Neg.1

sungguh, saya salut dan terenyuh melihat penulis yang daya ingatnya masih tajam dan segar mengingat kejadian masa kanak-kanak dan masih mengingat nama teman-temannya masa di Kisaran secara berurutan, lalu bagaimana penulis mengkisahkan pembontakan PKI terhadap Pancasila tahun 1965 yang eknesnya thn 1966 dan 1967 kota Kisaran penuh dengan demo dan pembantaian terhadap orang yang dituduh terlibat PKI.

Saya mengakui apa yang dikisahkan penulis tersebut adalah benar, sebab orang tua saya (Bapak) adalah Ketua Parkindo (Partai Kristen Indonesia) Kab.Asahan yang pada masa itu aktif dalam perjuangan melawan pemberontakan PKI.

Pada Bagian ketiga buku ini penulis menceritakan kisah Pemilu tahun 1971 di masa Orba, sesungguhnya apa yang diceritakan oleh penulis adalah benar apa adanya, bagaimana keterlibatan guru dan aparat Pemerintah Daerah untuk memenangkan GOLKAR. Kami pelajar SMANSA digiring dan dipaksa untuk ikut kampanye GOLKAR pawai berkeliling kota Kisaran yang kami sendiripun belum paham kenapa harus memilih GOLKAR, sebab waktu itu ada 10 Partai Politik peserta pemilu, mengapa bukan partai yang lain ?

Sebagai orang yang pernah bekerja di Gramedia saya menilai, Buku ini menarik dan perlu dibaca.